

Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan ISSN 1410 - 1831

Volume 24 Nomor 1, Januari 2019

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 24 Nomor 1, Januari 2019

SADDAM CHALED, SUSI SARUMPAET

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 45
Pada Organisasi Nirlaba Di Bandar Lampung

DIMAS RIJALUL FANNY, DR. RATNA SEPTIYANTI, DEWI SUKMASARI

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay* Pada Perusahaan
Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015

FADHILAH NURAINI, KIAGUS ANDI, YUNIA AMELIA, FITRA DHARMA

Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Di Indonesia
(Studi Pada Provinsi Di Jawa Dan Di Sumatera)

OFTIKA SARI, EINDE EVANA, NINUK DEWI KESUMANINGRUM

Pengaruh Financial Distress, Opini Audit, dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag

BAHARUDIN LUDFI SYUHADA, SUSI SARUMPAE

Earnings Management Pada Titik Kritis Perubahan
Tahap Life Cycle: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia

DIDIK PRAYITNO, EINDE EVANA, USEP SYAIPUDIN

Pengaruh *Budget Planning Model* Terhadap Kinerja Penyusunan
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur

SARI INDAH OKTANTI SEMBIRING, MEGA METALIA

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Restatement* Laporan Keuangan
(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI)

NENY DESRIANI, PIGO NAULI

Analisis Kelayakan Investasi Penambahan Setoran
Modal Pemerintah Kota Xyz Pada Pt Bank Lampung

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

<http://fe-akuntansi.unila.ac.id/download/jak>

Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan ISSN 1410 – 1831

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 24 Nomor 1, Januari 2019

Penanggung Jawab:

Farichah

Ketua Penyunting:

Dewi Sukmasari

Penyunting Pelaksana:

Neny Desriani

Penyunting Ahli/Mitra Bestari:

Zaki Baridwan

Universitas Gadjah Mada

Lindrianasari

Universitas Lampung

Mahatma Kufepaksi

Universitas Lampung

Susi Sarumpaet

Universitas Lampung

Rindu Rika Gamayuni

Universitas Lampung

Anggota Administrasi/Tata Usaha:

Suleman

Alamat Redaksi/Penerbit:

Redaksi Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Lampung

Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 705903, Fax. (0721) 705903

dewsukma@gmail.com/nyenydesriani82@gmail.com

Frekuensi terbit: enam bulanan

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 24 Nomor 1, Januari 2019

Daftar isi i

SADDAM CHALED, SUSI SARUMPAET

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 45
Pada Organisasi Nirlaba Di Bandar Lampung

1 - 16

DIMAS RIJALUL FANNY, DR. RATNA SEPTIYANTI, DEWI SUKMASARI

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay*
Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015

17 - 43

FADHILAH NURAINI, KIAGUS ANDI, YUNIA AMELIA, FITRA DHARMA

Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Di Indonesia
(Studi Pada Provinsi Di Jawa Dan Di Sumatera)

44-57

OFTIKA SARI, EINDE EVANA, NINUK DEWI KESUMANINGRUM

Pengaruh Financial Distress, Opini Audit,
dan Profitabilitas Terhadap Audit Report Lag

58 -73

BAHARUDIN LUDFI SYUHADA, SUSI SARUMPAE

Earnings Management Pada Titik Kritis Perubahan Tahap Life Cycle: Studi Empiris Pada
Perusahaan Manufaktur di Indonesia

74-88

DIDIK PRAYITNO, EINDE EVANA, USEP SYAIPUDIN

Pengaruh *Budget Planning Model* Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pemerintah
Daerah Kabupaten Lampung Timur

89 -103

SARI INDAH OKTANTI SEMBIRING, MEGA METALIA

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Restatement* Laporan Keuangan
(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI)

104-118

NENY DESRIANI , PIGO NAULI

Analisis Kelayakan Investasi Penambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Xyz Pada Pt
Bank Lampung

119-132

EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN No. 45 PADA ORGANISASI NIRLABA DI BANDAR LAMPUNG

Saddam Chaled

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Susi Sarumpaet

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

email: susi.sarumpaet@feb.unila.ac.id

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 45 for non-profit organizations in Bandar Lampung in year 2012. Non-profit entities obtain resources from sponsors who do not expect repayments or economic benefits proportional to the amount of resources provided. This study uses a sample of 22 non-profit entities in Bandar Lampung. However, for this study purpose, 4 nonprofit organizations have been selected as they met the criteria according of financial reporting standards. Data were evaluated using the focus group discussion method. The results of the study found that the PSAK No. 45 on the reporting of financial position, statement of activities, and cash flow statements have not been implemented by non-profit entities in Bandar Lampung. An exception is of one organization which prepared those as a requirement to submit a proposal for international funding.

Keywords: not for profit, PSAK 45, focus group discussion

A. PENDAHULUAN

Karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam entitas nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam entitas bisnis, seperti penerimaan sumbangan.

Organisasi nirlaba meliputi organisasi keagamaan, rumah sakit, sekolah negeri, organisasi jasa sukarelawan. Organisasi non profit menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia. Untuk pihak internal tujuan laporan keuangan adalah untuk mengetahui situasi keuangan yang ada dalam organisasi tersebut, sedangkan untuk pihak eksternal bertujuan untuk mengetahui apakah dana yang ada telah dipergunakan dengan baik dan terlampir dalam laporan keuangan organisasi tersebut. (Cintokowati, 2010).

Sejak ditetapkannya peraturan standar akuntansi keuangan PSAK No. 45 tahun 2009 hingga revisi tahun 2011 ini belum ada penelitian secara khusus mengenai penerapan atau implementasi standar akuntansi keuangan PSAK No. 45 tentang organisasi nirlaba khususnya di kota Bandar Lampung ini sendiri. Belum diketahui apakah penerapan standar akuntansi

keuangan PSAK No. 45 pada organisasi nirlaba di kota Bandar Lampung ini bermanfaat dalam pengelolaan sumber dana dan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel, ataukah justru membuat pengelola menjadi tidak mengerti dalam pembuatan laporan keuangan dan pengelolaan sumber dana yang diberikan dari *stockholder* menjadi terbengkalai dan tidak transparan.

Entitas organisasi nirlaba di kota Bandar Lampung terdapat 1.267 Mesjid, 138 Gereja Kristen, 58 Gereja Katolik, 87 Kuil, 5 Vihara, 32 Yayasan Aliyah, 127 Tsanawiyah, 206 Ibtidaiyah, 27 Diniyah, 76 Pesantren, 16 Panti Asuhan, dan Lembaga Amil Zakat. Dari pengamatan awal ke beberapa lembaga organisasi yang berada di Bandar Lampung, maka terpilihlah lima entitas organisasi nirlaba yang mendekati laporan keuangannya sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan PSAK No. 45, seperti: Gerakan Mubaligh Islam, Gereja Protestan Indonesia, Mesjid al-hidayah, zakat dan infaq yang terdapat di kementerian kota Bandar Lampung dan Panti Asuhan Kemala Puji, terdapat beberapa lembaga organisasi yang belum menerapkan laporan keuangan organisasinya dan ada yang sudah menerapkan laporan keuangan organisasinya tetapi belum sesuai dengan peraturan standar akuntansi yang berlaku, dengan ini mereka memerlukan bagaimana cara memproses laporan keuangan sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dari pengamatan awal ke beberapa organisasi nirlaba yang berada di Bandar Lampung, terdapat beberapa permasalahan yang ada di organisasi nirlaba tersebut sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penerapan Standar Akuntansi Organisasi Nirlaba – Prop. Lampung

No	Organisasi Nirlaba	Permasalahan
1	Gerakan Mubaligh Islam	Membuat laporan keuangan, tetapi tidak menerapkan sesuai PSAK No. 45 yang berlaku.
2	Masjid Al-Hidayah	Membuat laporan keuangan tetapi hanya mencatat masuk keluarnya arus kas, dan tidak mengaplikasikan ke dalam komputer.
3	Panti Asuhan Kemala Puji	Membuat laporan keuangan, tetapi hanya mencatat masuk keluarnya kas, dan tidak mengaplikasikan kedalam komputer.
4	Zakat dan Infaq Kementerian Agama Kota Bandar Lampung	Membuat laporan keuangan, tetapi hanya mencatat masuk keluarnya kas, dan tidak mencatat aset kedalam aset lancar atau aset bersih.
5	Gereja Protestan Indonesia	Membuat laporan keuangan, tetapi hanya mencatat arus kas masuk dan arus kas keluar, tidak adanya pembuatan neraca.

Penelitian ini mengevaluasi apakah organisasi nirlaba yang berada di Bandar Lampung telah menyusun laporan posisi keuangan yang meliputi total aset, liabilitas dan aset neto. Laporan arus kas yang meliputi penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan aktivitas yang dimaksud meliputi beban menurut klasifikasi fungsional, kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung, sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK) nomor 45.

Penelitian ini menggunakan organisasi nirlaba keagamaan, yang berada di kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan peraturan standar akuntansi keuangan No. 45 yang meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan laporan keuangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengevaluasi organisasi yayasan keagamaan yang telah menyusun laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan laporan aktivitas pada organisasi nirlaba yang berada di Bandar Lampung, (2) mengevaluasi organisasi nirlaba yang telah menyusun laporan keuangan dan telah menerapkan standar akuntansi keuangan no 45 yang dibuat IAI.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman tentang penerapan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45) di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti maupun para pengambil keputusan, khususnya terkait penyusunan dan efektifitas penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45). Bagi para pengelola organisasi nirlaba penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan pada perusahaan nirlaba.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada dasarnya, melakukan perubahan merupakan usaha untuk memanfaatkan peluang untuk mencapai keberhasilan. Karena ketika melakukan perubahan mengandung resiko, yaitu adanya resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan adalah tindakan yang berbahaya dalam lingkungan yang penuh dengan persaingan ketat. Beberapa faktor resistensi yang lazim terjadi dalam perubahan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kebiasaan kerja. Orang sering resisten terhadap perubahan karena menganggap kebiasaan yang baru dianggap merepotkan atau mengganggu.
2. Keamanan. Seperti takut dipecat, atau kehilangan jabatan.
3. Ekonomi. Faktor ekonomi seperti gaji paling sering dipertanyakan, karena orang sangat tidak mengharapkan gajinya turun.
4. Sesuatu yang tidak diketahui.

Sumber: (Lim dan Loh, 2002).

Istilah lain yang sering dipakai mengenai resistensi terhadap perubahan adalah karena setiap perubahan akan mengganggu zona nyaman (*comfort zone*), yaitu kebiasaan-kebiasaan kerja yang selama ini dirasakan nyaman. Sonnenberg tahun (1994), mengidentifikasi tujuh alasan mengapa orang resisten terhadap perubahan, yaitu:

1. *Procastination*. Kecenderungan menunda perubahan, karena merasa masih banyak waktu untuk melakukan perubahan.
2. *Lack of motivation*. Orang berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak memberikan manfaat sehingga enggan berubah.
3. *Fear of failure*. Perubahan menimbulkan pembelajaran baru. Orang takut kalau nantinya ia tidak memiliki kemampuan yang baik tentang sesuatu yang baru tersebut sehingga ia akan gagal.
4. *Fear of the unkown*. Orang cenderung merasa lebih nyaman dengan hal yang diketahuinya dibandingkan dengan hal yang belum diketahui. Perubahan berarti mengarah kepada sesuatu yang belum diketahui.
5. *Fear of loss*. Orang takut kalau perubahan akan menurunkan *job security*, *power* atau status.
6. *Dislike the innitiator of change*. Orang sering sulit menerima perubahan jika mereka ragu terhadap kepiawaian inisiator perubahan atau tidak menyukai anggota agen perubahan.
7. *Lack of communication*. Salah pengertian akan apa yang diharapkan dari perubahan, informasi yang disampaikan tidak utuh dan komprehensif.

PSAK No. 45 Akuntansi Organisasi Nirlaba

Di Indonesia, Pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Organisasi penyusunan standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di Amerika Serikat atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia di Indonesia karena karakteristik entitasnya berbeda. Entitas nirlaba tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberi pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan laba.

SAK ETAP dan PSAK 45 adalah standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar akuntansi ini menjadi sebuah acuan, jika suatu perusahaan atau entitas menyusun laporan keuangan untuk pihak eksternal. Jika donatur mensyaratkan adanya laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut disusun dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia (yaitu SAK ETAP dan PSAK 45).

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, rumah sakit, lembaga swadaya masyarakat, masjid, zakat infaq, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. (IAI, 2004).

Terdapat beberapa hal yang membedakan antara organisasi nirlaba dengan organisasi laba lainnya. Dalam hal kepemilikan, tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi

nirlaba, apakah anggota, klien, atau donatur. Pada organisasi laba, pemilik jelas memperoleh untung dari hasil usaha organisasinya. Dalam hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan. Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan usahanya. Dalam hal tanggung jawab, pada organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur Pelaksana. Sedangkan pada organisasi nirlaba hal ini tidak mudah dilakukan.

Laporan Keuangan Sesuai PSAK 45

No. 1 (2011: 04) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah: Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2007).

Kemudian oleh IAI di dalam PSAK nomor 45 tentang Pelaporan Organisasi Nirlaba (2011) pengertian ini diterjemahkan menjadi: (1) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. (2) Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. (3) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas. Akuntansi organisasi nirlaba meliputi bentuk laporan keuangan dan nama-nama rekening berdasarkan pola PSAK No.45. Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45:

Laporan posisi keuangan

Secara umum, Laporan posisi keuangan atau Neraca adalah sebuah daftar aset dan liabilitas suatu perusahaan pada saat tertentu. Neraca merupakan pernyataan dari persamaan akuntansi dasar. Komponen Laporan Posisi Keuangan terdiri dari (1) Aset atau Harta, yang merupakan sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa mendatang diharapkan akan diperoleh entitas, (2) Liabilitas, yaitu kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi, dan (3) Ekuitas, yang merupakan hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas atau dalam kata lain, ekuitas adalah kekayaan pemilik dalam suatu perusahaan. Pada perusahaan perorangan dan persekutuan, pencatatan akun ini diikuti oleh nama pemilik. Pada perseroan terbatas, kekayaan pemilik hanya

dinyatakan dengan modal saham dan laba ditahan (laba yang tidak dibagi kepada pemegang saham).

Laporan Posisi Keuangan diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu: (1) Bagian lancar (current) atau jangka pendek (short-term), seperti aset lancar dan hutang lancar, dan (2) Bagian tidak lancar (non-current) atau jangka panjang (long-term), seperti aset tidak lancar dan hutang tidak lancar.

Aset Lancar adalah aset yang tingkat likuiditasnya tinggi. Artinya, aset tersebut dapat dengan segera berubah dalam waktu kurang dari satu tahun. Aset tidak lancar adalah aset yang tidak memenuhi kriteria yang dimiliki oleh aset lancar. Aset tidak lancar dapat berupa investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset netto. Aset netto merupakan aset atau harta, sebuah entitas nirlaba setelah dikurangi dengan utang atau kewajiban. Kemudian aset netto menunjukkan bagian harta sebuah LSM atau yayasan yang merupakan milik LSM atau yayasan tersebut.

Laporan aktivitas

Laporan aktivitas organisasi nirlaba ini sebenarnya sama seperti laporan laba rugi di perusahaan bisnis. Laporan aktivitas ini menyajikan perubahan atas aset netto dari periode ke periode, berapa banyak sumbangan yang diterima periode ini, berapa besar beban manajemen dan umum yang dikeluarkan dalam periode ini dan lain sebagainya. Aktivitas operasi adalah penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional lembaga. Adapun aktivitas investasi terdiri dari semua penerimaan dan pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian atau penjualan aktiva tetap, penempatan atau pencairan dana deposito atau investasi lain. Aktivitas pendanaan terdiri dari perkiraan yang terkait dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan atau penurunan aktiva bersih dari surplus ke defisit.

Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dilakukan dengan salah satu metode berikut metode langsung dan metode tidak langsung. Dengan metode langsung kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Sedangkan dengan metode tidak langsung laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (*defferal*) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. (IAI, 2007)

Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar dan setara kas suatu entitas untuk suatu periode tertentu. Tujuan utama Laporan Arus Kas adalah untuk menyajikan informasi tentang perubahan menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas bagi investor dan kreditor,

yaitu (1) membantu pembaca laporan keuangan dalam memperkirakan perbedaan antara laba bersih dengan penerimaan serta pengeluaran kas yang terkait dengan pendapatan tersebut dan (2) membantu menentukan pengaruh transaksi kas dan non kas dari aktivitas pendanaan dan investasi terhadap posisi keuangan suatu entitas.

Laporan arus kas dapat disusun dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung memperinci arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Ketika metode ini digunakan maka informasi dapat diperoleh dari catatan akuntansi entitas atau dengan menyesuaikan penjualan, beban pokok penjualan, dan pos-pos lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Adapun metode tidak langsung Dengan metode ini arus kas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba rugi neto.

C. METODE PENELITIAN

Sumber dan Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sesuai dengan masalah yang terkait dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan yang belum diterapkan berdasarkan dengan PSAK no 45, jadi penulis mengambil data kualitatif seperti rekaman, studi pustaka, wawancara dan *focus group discussion*, data kuantitatif seperti laporan keuangan penerimaan, pengeluaran dan realisasi anggaran pada organisasi nirlaba yang berada di Bandar Lampung.

Metode *focus group discussion* berhubungan erat dengan alasan atau justifikasi utama penggunaan FGD itu sendiri sebagai metode pengumpulan data dari suatu penelitian. Justifikasi utama penggunaan FGD adalah memperoleh data/informasi yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari interaksi para individu yang berada dalam suatu kelompok diskusi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yaitu metode yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Dalam metode ini tidak menggunakan teknik analisis statistik untuk mengetahui dan menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai, maka data diperoleh sebagian besar dari wawancara dan observasi.

Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan organisasi nirlaba di kota Bandar Lampung sebagai Badan Layanan Umum diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan dua unsur, yaitu: (1) Peraturan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 45 Organisasi Nirlaba, (2) Laporan Keuangan organisasi nirlaba di kota Bandar Lampung 2012.

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur analisis data adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan
- Mengidentifikasi pengklasifikasian asset bersih
- Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih
- Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan
- Mengidentifikasi perlakuan terhadap beban
- Mengidentifikasi perlakuan terhadap keuntungan
- Mengidentifikasi perlakuan terhadap kerugian
- Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban
- Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa
- Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktik dalam penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba. Pada analisis ini dilakukan perbandingan apakah format laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan PSAK No. 45 atau masih perlu dilakukan penyesuaian.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD). Wawancara (*Interview*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dan diperoleh dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian-bagian yang berkepentingan dan terlibat langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga menggunakan metode studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif. Metode ini merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi - informasi yang dibutuhkan melalui dokumen - dokumen, buku - buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya (*findings*) yang berhubungan dengan proses akuntansi Badan Layanan Umum.

Untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyingkap berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan. Data dari hasil interaksi dalam diskusi kelompok tersebut dapat memfokuskan atau memberi penekanan pada kesamaan dan perbedaan pengalaman dan memberikan informasi atau data yang padat tentang suatu perspektif yang dihasilkan dari hasil diskusi kelompok tersebut. Metode ini digunakan dalam rangka untuk mendapatkan data primer berupa hasil interaksi sejumlah partisipan suatu penelitian dan untuk mendapatkan informasi laporan keuangan dari entitas nirlaba tersebut.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Organisasi nirlaba yang dipilih untuk diadakannya penelitian oleh peneliti adalah Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini disajikan beberapa penerapan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba, antarlain: laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.

Data dari hasil peneletian ini deperoleh dengan menggunakan metode *Focus group discussion*, Metode FGD merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian dengan hasil akhir memberikan data yang berasal dari hasil interaksi sejumlah partisipan suatu penelitian, seperti umumnya metode-metode pengumpulan data lainnya. Berbeda dengan metode pengumpul data lainnya, metode FGD memiliki sejumlah karakteristik, diantaranya, merupakan metode pengumpul data untuk jenis penelitian kualitatif dan data yang dihasilkan berasal dari eksplorasi interaksi sosial yang terjadi ketika proses diskusi yang dilakukan para informan yang terlibat (Lehoux, Poland dan Daudelin, 2006).

Metode *focus group discussion* memiliki karakteristik jumlah individu yang cukup bervariasi untuk satu kelompok diskusi. Satu kelompok diskusi dapat terdiri dari 4 sampai 8 individu (Twin, 1998). Tehnik pengumpulan data ini menggunakan tim *focus group discussion* diantara lain:

- a. Moderator : Saddam Chaled
- b. Co-fasilitator : Susi Sarumpaet, S.E, MBA,. Ph.D., Akt.
- c. Notulen : M. Bangga Pribadi
- d. Narasumber : Junaidi (Gerkan Mubaligh Islam)
: Sulton (Masjid)
: Subianto (Mentri Agama Kota)
: Roy (Gereja Protestan Indonesia)

Focus group discassion ini diadakan pada hari selasa tanggal 7 Juli 2015, yang bertempat di Gedung Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, pada pukul 10.00 s/d 12.00 wib.

Laporan posisi keuangan Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung, hanya terdiri atas modal, pendapatan, arus kas masuk, arus kas keluar, pengeluaran, dan hutang. Dalam kesempatan *focus group discussion* yang dilakukan dengan narasumber, bapak Roy menyatakan bahwa laporan Gereja Protestan Indonesia hanya membuat arus kas masuk dan arus kas keluar. Berikut kutipannya:

“jadi pembuatan laporan keuangan hanya sebatas kas, arus kas masuk, arus kas keluar (Roy).”

Unsur – unsur mengenai laporan keuangan standar akuntansi PSAK No. 45 akan diklasifikasikan sebagai berikut:

Aset. Aset organisasi nirlaba ini disajikan kedalam kelompok inventaris dan tidak membedakan aset yang mempunyai masa umur ekonomis kurang dari satu tahun kedalam aset lancar dan aset yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun kedalam aset tidak lancar. Dalam kesempatan diskusi dengan bapak Junaidi, beliau menyatakan bahwa, segala aset seperti motor atau computer, itu dicatat ke dalam inventaris kantor. Berikut kutipannya:

“kalau GMI ada, itu punya infentaris.....kalau motor untuk kota satu (Junaidi).”

Petikan diskusi bapak Roy juga menerangkan hal yang sama, bahwa aktiva tetap di catat ke dalam infentaris gereja. Berikut kutipannya:

“kalau dari gereja sendiri itu masuk inventaris.....aktiva ibadah seperti alat musik, dan itu memang pernah dilakukan pencatatan. (Roy).”

Petikan diskusi bapak Subianto juga menerangkan hal yang sama, bahwa barang-barang yang terdapat di kantor Kementerian Agama Kota, dicatat ke dalam inventaris. Berikut kutipannya:

“iya masuk ke inventaris....tapi itu sumber dana nya dari APBN (Subianto).”

Liabilitas. Liabilitas organisasi nirlaba tidak disajikan didalam laporan posisi keuangan per periode nya, ini disebabkan Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung. Berdasarkan hal ini organisasi yang terdapat di Bandar Lampung tidak menerapkan PSAK No. 45 tahun 2011.

Aset Neto. Dalam organisasi nirlaba ini menyajikan aset neto yang dalam hal ini pada perusahaan komersial merupakan modal pemilik yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan, dimana pada saat perusahaan memperoleh laba keuntungan maka akan dibagikan kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham.

Pembahasan

Berdasarkan data penelitian yang telah dipaparkan tersebut, dalam hal komponen laporan keuangannya dari organisasi nirlaba diatas, Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung, tidak sesuai dengan PSAK No. 45 tahun 2011 yaitu yang terdiri dari laporan keuangan seperti, aset, leabilitas dan aset neto. Pelaporan keuangan organiasi nirlaba tersebut hanya membuat, arus kas masuk, arus kas keluar, pencatatan pendapatan, pencatatan pengeluaran dan modal kas, serta aset dicatat di inventaris tidak digolongkan kedalam aset lancar atau aset tidak lancar.

Organisasi nirlaba ini hanya menyajikan laporan aktivitas berupa pendapatan, pengeluaran dan saldo awal. Berdasarkan hal ini maka organisasi yang berada di Bandar Lampung tidak melaporkan laporan aktivitasnya sesuai standar PSAK No. 45 tahun 2011.

Tradisi pencatatan organisasi nirlaba biasanya hanya terdiri pendapatan, pengeluaran, arus kas masuk, arus kas keluar dan saldo. Oleh karena itu tentunya akan sulit untuk memunculkan sebuah kebiasaan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi PSAK No. 45 tahun 2011.

Organisasi Nirlaba yang berda di kota Bandar Lampung dalam hal ini seperti Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung. Organisasi ini hanya menerapkan pelaporan keuangan yang hanya berbasis standar tidak berpedoman pada standar akuntansi PSAK No. 45 yang berlaku. Faktor-faktor tersebut perlu dipersiapkan lebih matang, ini dikarenakan mengingat kendala - kendala untuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar PSAK No. 45 tidak mudah. Seperti yang di sampaikan bapak Jamaludin berikut ini:

“jadi gini, pertama ini khususnya untuk saya, kita kan bukan basis dari akuntansi, kan gitu, kemudian anggota mempercayai saya untuk memegang karena itu kaitannya dengan amanah, ... saya berusaha untuk belajar kemudian cara pembuatannya seperti apa dan ketika laporan itu ada yang lebih sempurna kenapa tidak.(jamaluddin).”

Termasuk bapak Roy dari Gereja Protestan Indonesia menyatakan bahwa, dulu sempat diadakannya pembuatan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.45, tetapi seiring berjalannya waktu tidak diterapkan lagi pelaporan keuangan tersebut, ini dikarenakan sumber daya manusia (SDM) yang tidak mampu dalam menerapkan peraturan standar tersebut. Berikut kutipannya:

*“pada tahun 2010, itu pembuatan nya seperti ini, dalam artian sebagai kontrol dari asset-aset tadi. Tapi itu ada kendala, mungkin karena, dari pengurus itu **memang** background pendidikan nya pun mungkin dari SMA, atau mungkin memang bukan dari bidang akuntansi. Dulu ada kakak yang latar belakang nya dibidang keuangan, kemudian dia mensarankan untuk membuat laporan ini, tapi mungkin memang faktor SDM tadi, rata-rata mereka sulit mengikuti , sistem atau bentuk format dari standar laporan keuangan secara akuntansi, karena kalau di akuntansikan dari buku besar nya kan di posting lagi (Roy).”*

Dari hasil pendapat yang di utarakan oleh bapak Roy, ini berkaitan dengan teori Resistensi. *Dislike the innitiator of change*. Orang sering sulit menerima perubahan jika mereka ragu terhadap kepiawaian inisiator perubahan atau tidak menyukai anggota agen perubahan (Sonnenberg, 1994).

Bapak Subianto juga memaparkan pernyataan nya tentang penerapan standar PSAK No. 45 tidaklah mudah untuk diterapkan kedalam organisasi nirlaba, kutipannya sebagai berikut:

“seharusnya untuk organisasi nirlaba kan kebanyakan kan memang besik nya kan rata-rata tidak ada membuat laporan keuangan, ... terutama juga orang awam juga baca laporan keuangannya kan, agak ribet gitukan, agak bingung, mereka biasanya baca yang standar – standar aja, jadi kalau mengikuti PSAK gak nyambung gitu.”(Subianto).

Dari hasil pendapat yang diutarakan oleh bapak Subianto, ini berkaitan dengan teori Resistensi. *Lack of communication*. Salah pengertian akan apa yang diharapkan dari perubahan, informasi yang disampaikan tidak utuh dan komprehensif (Sonnenberg, 1994).

Laporan keuangan yang berbasis peraturan standar akuntansi keuangan no. 45 menyediakan informasi keuangan yang lebih baik. Pengelolaan seluruh sumber daya akan lebih terperinci selama satu periode, sehingga seluruh pihak yang berkepentingan seperti masyarakat dan *stockholder* dapat melihat laporan keuangan dan kinerja organisasi nirlaba lebih transparan.

Hal ini juga disadari oleh organisasi nirlaba, berikut ini petikan diskusi yang diungkapkan oleh bapak Junaidi:

“saya berusaha untuk belajar kemudahan cara pembuatannya seperti apa dan ketika ada pelaporan yang lebih sempurna kenapa tidak, ... Karena kita berkeinginan kedepan akan lebih bagus dari semua aspek, ... kalau ini oke lah dari semua sisi transparansi dari laporan yang real seperti ini, tetapi mungkin dari sisi keilmuan, dari sisi intelektual kan perlu kita pelajari (Junaidi).”

Laporan keuangan organisasi nirlaba yang hanya mencatat pendapatan, pengeluaran, kas masuk, kas keluar dan saldo, hanya sebatas pencatatan standar saja, ini dikarenakan tidak adanya pengetahuan terhadap peraturan standar akuntansi yang berbasis PSAK No. 45 tahun 2011.

Organisasi nirlaba ini adanya peraturan standar PSAK No. 45 yang berlaku, ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi atau pelatihan khusus tentang peraturan standar PSAK No. 45 dan tidak adanya pengetahuan yang cukup dari sumber daya manusia (SDM) itu sendiri. Terlepas dari penting dan manfaat penerapan standar akuntansi PSAK No. 45 tahun 2011, para narasumber juga mengungkapkan kendala - kendala yang mereka hadapai ketika ingin menerapkan PSAK No. 45 ini. Berikut petikan diskusi dari bapak Sulton:

“kalau masjid, kalau ada yang bagus kenapa tidak, mungkin dari SDM itu, tapi kalau memang ada yang lebih bagus apa salahnya (Sulton).”

Bapak Roy juga menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) itu sendiri tidak terbiasa menggunakan peraturan standar PSAK No. 45 dan tidak adanya sosialisasi tentang peraturan standar tersebut, berikut kutipan pernyataannya:

“ya namanya juga orang tua, kalau diajari ini kan mereka akan cepat lupa juga dan terlihat lebih sedikit rumit juga, ... kebanyakan juga memang tidak terlalu mengetahui kalau memang ada PSAK yang mengatur tentang pelaporan nirlaba,

gitu, ... pertama faktor tidak tahu kemudian kalau kita ikut kesitu, kita mau melaporkan keuangan ini kemana, karena selama ini mereka berfikir, jamaat sudah percaya dengan laporannya (Roy)."

"karena memang ilmu pengetahuan laporan keuangan itu hanya sebatas, kas masuk kas keluar kemudian saldo, ... dan mereka tidak tahu bahwa ada peraturan yang mengatur laporan keuangan nirlaba, seperti itu (Roy)."

Dari hasil pendapat yang diutarakan oleh bapak Roy, ini berkaitan dengan teori Resistensi. *Lack of motivation*. Orang berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak memberikan manfaat sehingga enggan berubah (Sonnenberg, 1994).

Bapak Subianto juga menjelaskan bahwa pelaporan keuangan nirlaba ini khusus nya di bagian zakat dan infaq yang berada di kantor Kementerian Agama Kota, tidak adanya pelaporan khusus yang harus mengikuti pelaporan standar PSAK No. 45, ini dikarenakan tidak adanya perintah langsung dari kantor Kementerian Agama pusat nya, berikut kutipannya:

"kalau dari kita gak ada masalah, asalkan organisasi pusatnya memerintahkan seperti itu, nah biasanya kita ikuti dan biasanya kita ada pelatihan dulu (Subianto)."

Dari hasil pendapat yang diutarakan oleh bapak Subianto, ini berkaitan dengan teori Resistensi. *Procastination*. Kecenderungan menunda perubahan, karena merasa masih banyak waktu untuk melakukan perubahan (Sonnenberg, 1994).

Organisasi nirlaba seperti seperti Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung, berharap agar pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan PSAK No. 45, dapat disosialisasikan dan para pihak yang bersangkutan agar memberi informasi terhadap pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Para narasumber mengungkapkan harapan - harapannya terkait penerapan standar akuntansi PSAK No. 45 untuk organisasi nirlaba ini. Berikut kutipan diskusi dari bapak Subianto:

"seharusnya untuk organisasi nirlaba kan kebanyakan rata-rata tidak ada yang membuat laporan keuangan, sebaiknya ada sosialisasi atau bagaimana... (Subianto)."

Bapak Roy juga menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"kalau kita tidak ada masalah, selagi masih ada sosialisai pengenalan...(Roy)."

Bapak Juanidi juga menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"mungkin akan lebih bermanfaat, pengajaran konteks tektual, yang lebih relevan, ... jadi ada yang menginginkan, atau misalkan dari unila ada atau bagian dari keuangan, dipanggil dan membimbing kita, itu kan lebih bagus, bersyukurlah kita (Junaidi)."

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Organisasi nirlaba Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung, belum menerapkan peraturan standar akuntansi PSAK No. 45 tahun 2011. Dalam standar akuntansi PSAK No. 45, komponen laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas dan laporan arus kas, laporan keuangan organisasi nirlaba ini hanya mencatat pendapatan, pengeluaran, arus kas masuk, arus kas keluar dan saldo. Berikut ini simpulan hasil analisis laporan keuangan organisasi nirlaba dengan PSAK No. 45 tahun 2011.

Laporan posisi keuangan organisasi nirlaba ini seperti Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung. laporan keuangan organisasi nirlaba ini hanya mencatat pendapatan, pengeluaran, arus kas masuk, arus kas keluar dan saldo. Pendapatan dan pengeluaran hanya dicatat atau dilampirkan dalam bentuk format standar dan aset dicatat sebagai infentaris kantor, secara keseluruhan, implementasi laporan Keuangan Organisasi Nirlaba di Bandar Lampung dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan standar akuntansi PSAK No. 45 tahun 2011.

Pendapatan yang tidak disajikan oleh Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung ini sebagai penambah aset bersih tidak terikat, organisasi nirlaba ini juga tidak mengklasifikasikan unsur - unsur pendapatan dan penghasilan kedalam kelompok pendapatan oprasional dan non oprasional. tidak menyajikan perubahan aset bersih yang bersifat terikat temporer dan tidak menyajikan perubahan aset bersih yang berasal dari sumbangan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa laporan aktivitas organisasi nirlaba di Bandar Lampung tidak sesuai dengan penerapan standar PSAK No. 45 tahun 2011.

Aliran kas masuk organisasi nirlaba seperti Masjid Al-hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung ini di peroleh dari pendapatan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Sedangkan aliran kas keluar dari aktivitas operasi digunakan untuk biaya pelayanan, biaya umum, biaya administrasi dan pengeluaran pajak. Aliran kas dari aktivitas investasi, bertujuan untuk mendapatkan penghasilan dari arus kas masa depan yang berasal dari pembelian investasi. Aliran kas dari aktivitas pendanaan, bertujuan untuk memprediksi klaim para *stockholder* terhadap sumber daya yang dimiliki. Dalam hal ini laporan arus kas pada organisasi nirlaba ini tidak sesuai dengan peraturan standar PSAK No. 45 tahun 2011 yang berlaku, dikarenakan tidak adanya pembuatan neraca pada organisasi nirlaba tersebut.

Saran

Mengingat laporan keuangan organisasi nirlaba yang berada di Bandar Lampung dengan menerapkan laporan yang hanya berbasis standar dan tidak sesuai dengan laporan akuntansi PSAK No. 45 tahun 2011, maka dari hasil analisis dan simpulan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

Untuk organisasi nirlaba seperti Masjid Al-Hidayah, Gereja Protestan Indonesia, Zakat dan Infaq yang terdapat di Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dan Gerakan Mubaligh Islam yang terdapat di kota Bandar Lampung, perlu segera menerapkan pelaporan standar akuntansi keuangan yang berlaku, sesuai dengan peraturan standar PSAK No. 45, sehingga pelaporan keuangan yang dibuat sesuai dengan peraturan standar akuntansi keuangan PSAK No. 45 tahun 2011, yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

Berdasarkan kendala yang ditemukan dalam penelitian ini, maka saran untuk organisasi nirlaba di kota Bandar Lampung, agar segera meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal pengetahuan tentang peraturan standar akuntansi PSAK No. 45 sehingga dapat mewujudkan pelaporan keuangan yang akuntabel.

Universitas Lampung sebagai sarana pendidikan dan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai pencetus laporan standar akuntansi keuangan agar dapat memberikan informasi, pelatihan atau sosialisasi mengenai tentang peraturan standar akuntansi PSAK No. 45 tahun 2011 kepada Organisasi Nirlaba yang terdapat di kota Bandar Lampung, agar dapat terwujudnya kesinambungan antara peraturan standar akuntansi yang dibuat IAI dan Organisasi nirlaba sebagai pembuat laporan keuangan

REFERENSI

- Ahmed,P K, Lim,K K, & Loh, A,Y,E.,(2002), *Learning Through Knowledge Management*. London: Butterworth – Heinemann.
- Chenly. 2013, Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 pada Gereja BZL. Jurnal EMBA. Vol 1. No. 3, Hal 129 – 139. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Cintokowati, Chindi. 2010. Akuntansi Masjid vs Gereja, Organisasi Nirlaba. Tanggal akses 14 November 2010.
- Hasibuan, David. 2010, Penerapan PSAK No. 45 pada Yayasan dalam Kaitanya Dengan Kualita Informasi Pelaporan Keuangan. Jurnal Ilmiah. Vol 12. No. 1. STIE Kesatuan.
- Harahap, Sofyan Syahri. 2007. *A Statement Of Basic Accounting Theory (ASOBAT)*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, mamduh M dan Halim, Abdul. 2002. *Analisis laporan keuangan*. Penerbit: UPP STIM YKPN.
- Hadi, Sudharto P. 2005. Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Sosial: Kuantitatif, Kualitatif, dan Kaji Tindak. Program Magister Ilmu Lingkungan. UNDIP. Semarang.

- Hollander, J.A. (2004). *The social contexts of focus groups*. *Journal of Contemporary Ethnography*, 33, 5, 602-637.
- Hendrawan, Ronny. 2011. Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Ibrahim, Ridwan dan Handayani, Tri, 2009. Penerapan Pernyataan Standar akuntansi keuangan Nomor 45 Pada Baitul Mal Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Skripsi. Vol 2. No. 2, Hal 183 – 197. Universitas Syiah Kuala Aceh.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2007, Standar Akuntansi Keuangan No. 45, Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2009.Standar Akuntansi Keuangan No. 45. Salemba Empat. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2011.Standar Akuntansi Keuangan No. 45. Salemba Empat. Jakarta
- Kitzinger, J. (1994). *The Methodology Of Focus Group Interviews: the importance of interaction between research participants*. *Sociology of Health and Illness*, 16, 103-121.
- Lehoux, P., Poland, B., & Daudelin, G. (2006). *Focus Group Research and “The Patient’s View.” Social Science & Medicine*, 63, 2091-2104.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tahun 2011, pelaporan keuangan organisasi nirlaba.
- Sutarti dan Prayitno, Deni. 2007, Analisis PSAK No. 45 dalam Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Studi kasus pada Rumah Sakit X. Skripsi. Vol 7, No. 1, Hal 30 – 36. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan. Bogor.
- Supomo, Bambang dan Indrianto, Nur, 1999, Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen, Yogyakarta: BPF.
- Sonnenberg, F,K. (1994). *Managing With A Conscience: How to improve performance through integrity, Trust, and Commitment*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Sundjaya, Ridwan S dan Barlian, Inge. 2001. Manajemen Keuangan Satu Edisi Kedua, Jakarta: Literatur Lintas Media.
- Setrawati, Lilis. 2011. Gampang Menyusun Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. PT Alexmedia Komputindo. Jakarta.
- Twinn, S. (1998). *An Analysis Of Theeffectiveness Of Focus Groups As A Method Of Qualitative Data Collection With Chinese Populations In Nursing Research*. *Journal of Advanced Nursing*, 28, 3, 654-661.
- Uma Sekaran. (1995). *Reserch Methode for Business, Sage Publication, International Educational and Professional Publisher, London*.
- Widodo, hertanto dan kustiawan, Teten. 2001. Akuntansi dan Manajemen Kinerja Untuk Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *AUDIT DELAY*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2015**

Dimas Rijalul Fanny
Jurusan Akuntansi FEB Unila
Email: dimas.rijalul@yahoo.co.id

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si., Akt
Jurusan Akuntansi FEB Unila
Email: rseptiyanti@yahoo.com

Dewi Sukmasari, S.E., M.S.A., Akt.
Jurusan Akuntansi FEB Unila
Email: dewsukma@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that affect audit delay of financial reports on the manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange. The examined factors of this research are profitability, solvability and firm size as the independent variables while audit delay as the dependent variable. Audit delay measured from the year of closure years of the book to the date issued the audit report.

The sample in this research was secondary data and selected by using purposive sampling method consisting of 246 companies listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) and submitted financial reports consistently in the period 2013-2015. The analysis method of this research used multiple regression analysis.

The result of this research showed that profitability and firm size had negative influence to audit delay. Meanwhile solvability did not have any effect to audit delay.

Keywords: *audit delay, profitability, solvability and firm size*

A. PENDAHULUAN

Pelaporan keuangan merupakan cara untuk menyampaikan informasi- informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki dan kinerja kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan atas informasi tersebut. Unsur utama dalam pelaporan keuangan adalah laporan keuangan itu sendiri. Laporan keuangan merupakan proses akhir dari proses akuntansi yang dirancang untuk memberikan informasi kepada calon investor, calon kreditor, dan pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Bagi

pihak manajemen, laporan keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan manajemen perusahaan untuk periode mendatang.

Audit delay adalah senjang waktu audit, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk menghasilkan laporan audit atas kinerja laporan keuangan suatu perusahaan. Senjang waktu audit ini dihitung dari selisih tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan sampai dengan tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP. Hal ini sesuai dengan definisi Halim (2007: 5) *Audit delay* didefinisikan sebagai lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan audit.

Ketertundaan dalam publikasi laporan keuangan berkala akan berdampak pada tingkat ketidakpastian keputusan yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan (Iskandar dan Trisnawati, 2010). Subekti dan Widiyanti (2004), menunjukkan bahwa pengumuman laba yang terlambat menyebabkan abnormal returns negatif sedangkan pengumuman laba yang lebih cepat menyebabkan hal sebaliknya. Suatu ketertundaan pelaporan keuangan secara tidak langsung diartikan oleh investor sebagai sinyal buruk bagi perusahaan. Investor akan menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kesehatan perusahaan sehingga akan berdampak negatif juga terhadap reaksi pasar.

Menurut Trianto (2006), standar pekerjaan lapangan memuat pernyataan bahwa audit harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai. Hal ini yang kadang menyebabkan lamanya suatu proses pengauditan dilakukan, sehingga publikasi laporan keuangan yang diharapkan secepat mungkin menjadi terlambat.

Hasan (2012) melakukan penelitian yang menguji ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, opini auditor dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitiannya yang signifikan adalah profitabilitas, opini auditor, ukuran Kantor Akuntan Publik yang berhubungan negatif dengan audit delay. Widosari (2012) melakukan penelitian yang menguji kualitas auditor, opini auditor, ukuran perusahaan, jumlah komite audit dan kompleksitas operasi perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas auditor dan opini auditor yang memiliki hubungan negatif terhadap *audit delay*.

Menurut hasil penelitian Kartika (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* antara lain ukuran perusahaan, laba/rugi operasi, opini, tingkat profitabilitas, dan reputasi auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu penyelesaian audit cenderung singkat apabila ukuran perusahaan menjadi semakin besar, mengalami laba dan mendapatkan *unqualified opinion*.

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa ketepatan penyampaian laporan keuangan sangat penting terutama bagi pengguna-pengguna informasi keuangan dalam memprediksi dan mengambil keputusan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian terdahulu dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015**”.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Sulistiyo (2010) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan teori agensi sebagai hubungan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemilik). Prinsipal yang dalam hal ini diwakili oleh *shareholders* menuntut akuntabilitas dari agen yang diwakili oleh manajer melalui pelaporan informasi keuangan. Agen bertindak sebagai pihak yang mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan, sedangkan prinsipal merupakan pihak yang mengevaluasi.

Profitabilitas

Wirakusuma (2004) menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kerugian mungkin akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya, jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi, maka perusahaan berharap laporan keuangan audit dapat diselesaikan secepatnya sehingga *good news* tersebut segera dapat disampaikan kepada investor dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Tinggi rendahnya profitabilitas mempengaruhi lama atau cepatnya penyampaian laporan keuangan seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Yugo Trianto (2006) pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2004 hasil penelitiannya telah membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*

Solvabilitas

Solvabilitas sering disebut *leverage ratio*. *Leverage* perusahaan menunjukkan seberapa besar ekuitas yang tersedia untuk memberikan jaminan terhadap total hutang perusahaan baik hutang lancar maupun jangka panjang. Penggunaan hutang yang efektif akan meningkatkan pendapatan maupun ekuitas perusahaan (Munawir, 2001). Semakin besar tingkat *leverage* menunjukkan besarnya resiko dalam pembayaran hutang perusahaan.

Rasio hutang terhadap ekuitas yang tinggi mencerminkan tingginya resiko keuangan dan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat. Pihak manajemen akan berusaha menekan *debt to equity ratio* serendah-rendahnya sehingga cenderung akan menunda penyampaian laporan keuangan yang berisi berita buruk tersebut (Utami,2006). Semakin tinggi rasio hutang terhadap modal akan semakin panjang keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit.

Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *Audit Delay*

Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki perusahaan. Hal yang mendasari hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit delay* adalah perusahaan besar akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan, dan pemerintah. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan berskala besar cenderung mengalami tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan audit lebih awal.

Hasil penelitian Sistya Rachmawati (2008:8), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay* yang berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek *audit delay* dan sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin panjang *audit delay*. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya sistem pengendalian internal perusahaan besar sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

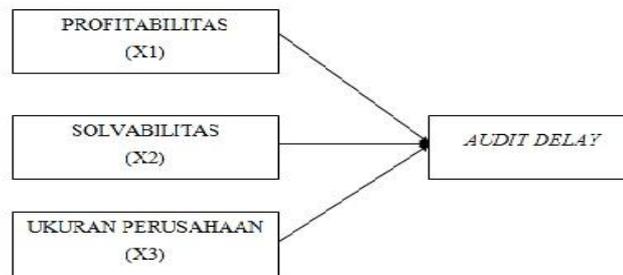
Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Audit Delay*

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen yang telah diuraikan diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih dari sejumlah populasi yang memenuhi kriteria tertentu dan dianggap dapat mewakili.

Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Perusahaan manufaktur terdaftar di BEI secara konsisten dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dan tidak pernah di delisting pada kurun waktu tersebut.
2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang menampilkan data yang mendukung analisis faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
3. Perusahaan manufaktur menggunakan mata uang rupiah dalam data laporan keuangannya.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk data sekunder. Data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun untuk dipublikasi atau tidak dipublikasikan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Data yang dimaksud adalah laporan tahunan (*annual report*) dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 yang memuat secara lengkap informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Variabel dan Pengukuran Variabel

Tabel 1 Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran Variabel
<i>Audit Delay</i>	Tanggal laporan audit dikurang tanggal laporan keuangan
Profitabilitas	Total pendapatan bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%
Solvabilitas	Total hutang dibagi dengan total modal dikali dengan 100%
Ukuran Perusahaan	Logaritma natural total aset Ln(Total aset)

Pengujian Data

Penelitian ini dirancang untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay*. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan *software* bantuan program aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) 22.

Persamaan Regresi Linear Berganda:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + e$$

Keterangan:

Y = *audit delay*

α = konstanta

x_1 = profitabilitas

x_2 = solvabilitas

x_3 = ukuran perusahaan

$\beta_1 - \beta_3$ = koefisien regresi dari masing-masing variabel independen

E = *error term*

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penentuan Sampel

Dari populasi yang ada, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 2 Sampel Penelitian Periode 2013-2015

Kriteria	Jumlah
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015	145
Perusahaan yang tidak menyediakan data secara lengkap	(63)
Jumlah sampel perusahaan	82
Jumlah tahun pengamatan	3
Jumlah pengamatan yang dijadikan sampel selama periode penelitian	246

Sumber : www.idx.co.id, data diolah tahun (2017)

Uji Hipotesis

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,295 ^a	,087	,076	14,183454	1,816

a. Predictors: (Constant), LNASSET, SOLV, PROF

b. Dependent Variable: AD

Sumber: Data yang diolah di SPSS 22

Besarnya Adjusted R² adalah 0,076 yang berarti sebesar 7,6 % variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel variasi dari variabel independen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sebesar 7,6% *audit delay* dipengaruhi oleh variabel profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan. Sedangkan sisanya sebesar 92,4% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji Statistik F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4652,022	3	1550,674	7,708	,000 ^b
	Residual	48683,230	242	201,170		
	Total	53335,252	245			

a. Dependent Variable: AD

b. Predictors: (Constant), LNASSET, SOLV, PROF

Sumber: Data yang diolah di SPSS 22

Selanjutnya, Dari uji ANOVA atau *F-test*, dihasilkan nilai F hitung sebesar 7,708 dengan signifikansi 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas, solvabilitas dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *audit delay*.

Tabel 5 Hasil Uji Statistik t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	100,430	8,074		12,439	,000		
PROF	-27,548	8,201	-,210	-3,359	,001	,964	1,037
SOLV	,154	,164	,058	,940	,348	,998	1,002
LNASSET	-1,445	,559	-,161	-2,583	,010	,966	1,035

a. Dependent Variable: AD

Sumber: Data yang diolah di SPSS 22

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa hasil pengujian yang dilakukan antara variabel variabel profitabilitas memiliki nilai t-hitung sebesar -3, 359 dengan nilai sig 0, 001. Nilai sig sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay* dengan arah koefisien negatif. Oleh karena itu, H_1 yang menyatakan terdapat hubungan negatif antara profitabilitas terhadap *audit delay* **terdukung atau diterima**. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hasan (2012) yang menemukan pengaruh negatif profitabilitas terhadap *audit delay*. Tinggi rendahnya profitabilitas mempengaruhi lama atau cepatnya penyampaian laporan keuangan auditan.

Pengujian hipotesis yang kedua yang merupakan pengujian pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung variabel solvabilitas memiliki nilai t-hitung sebesar -0, 940 dengan nilai sig 0, 348. Nilai sig $0,348 > 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi rasio hutang terhadap modal tidak dapat menyebabkan lamanya waktu penyampaian laporan keuangan auditan. Oleh karena itu, H_2 yang menyatakan solvabilitas berpengaruh positif terhadap *audit delay* **tidak terdukung atau ditolak**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yugo Trianto (2006) yang tidak menemukan pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*. Kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya dengan ekuitas yang dimilikinya tidak dapat dijadikan indikator dalam *audit delay*.

Pengujian hipotesis yang ketiga yang merupakan pengujian pengaruh dewan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung variabel ukuran perusahaan yang memiliki nilai -2, 583 dengan nilai sig 0, 010. Nilai sig $0,010 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *audit delay* dengan arah koefisien negatif. Oleh karena itu, H_3 yang menyatakan

terdapat hubungan negatif antara ukuran perusahaan terhadap *audit delay* **terdukung atau diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Sisty Rachmawati (2008:8), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit delay* yang berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin pendek *audit delay* dan sebaliknya semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin panjang *audit delay*. Hal ini disebabkan oleh semakin baiknya sistem pengendalian internal perusahaan besar sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memiliki waktu mengaudit laporan keuangan lebih cepat.
- b. Solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya melalui ekuitas yang dimilikinya tidak dapat dijadikan indikator dalam *audit delay*.
- c. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan jumlah total aset perusahaan dapat dijadikan indikator dalam *audit delay*.

Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya untuk menyempurnakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi *audit delay*.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai populasi penelitian.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah periode tahun yang dijadikan sampel penelitian.

REFERENSI

- Andi, Kartika. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7. Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah. Edisi Revisi. Jakarta. Salemba Empat.
- Iskandar, Meylisa Januar dan Trisnawati, Estralita. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Report Lag* pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- Jensen, M. C dan Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics*.
- Munawir. 2001. Akuntansi Keuangan dan Manajmen, Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFPE.
- Rachmawati, Sistya. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan terhadap *Audit Delay* dan *Timeliness*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10.
- Subekti, Imam dan Wulandari W, Novi. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Report Lag* di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar.
- Sulistiyo. 2010. Metode Penelitian. Jakarta. Penaku.
- Trianto, Yugo. 2006. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan *Go Public* di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
- Utami, Wiwik. 2006. Analisis Determinan *Audit Delay* Kajian Empiris di Bursa Efek Jakarta. *Buletin Penelitian* No. 09 Tahun 2006.
- Widosari, Shinta Altia. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010. Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wirakusuma, Made Gede. 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rentang Waktu Penyajian Laporan Keuangan ke Publik. Simposium Nasional Akuntansi VII: 1202-1222.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk
2	SMCB	Holcim Indonesia Tbk
3	SMGR	Semen Gresik Tbk
4	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk
5	ARNA	Arwana Citra Mulia Tbk
6	IKAI	Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk
7	KIAS	Keramika Indonesia Asosiasi Tbk
8	MLIA	Mulia Industrindo Tbk
9	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk
10	ALKA	Alaska Industrindo Tbk
11	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk
12	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk
13	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk
14	INAI	Indal Alumunium Industry Tbk
15	JKSW	Jakarta Kyoei Steel Work LTD Tbk
16	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk
17	BUDI	Budi Acid Jaya Tbk
18	DPNS	Duta Pertiwi Nusantara Tbk
19	EKAD	Ekadharna International Tbk
20	INCI	Intan Wijaya International Tbk
21	SRSN	Indo Acitama Tbk
22	AKPI	Argha Karya Prima Industry Tbk
23	APLI	Asiaplast Industries Tbk
24	BRNA	Berlina Tbk
25	IGAR	Champion Pasific Indonesia Tbk
26	SIAP	Sekawan Inti Pratama Tbk
27	TRST	Trias Sentosa Tbk
28	YPAS	Yana Prima Hasra PersadaTbk
29	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
30	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
31	MAIN	Malindo Feedmill Tbk
32	SIPD	Siearad Produce Tbk

33	TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk
34	ALDO	Alkindo Naratama Tbk
35	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
36	KBRI	Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk
37	SPMA	Suparma Tbk
38	ASII	Astra International Tbk
39	AUTO	Astra Auto Part Tbk
40	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
41	IMAS	Indomobil Sukses International Tbk
42	INDS	Indospring Tbk
43	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk
44	NIPS	Nippres Tbk
45	SMSM	Selamat Sempurna Tbk
46	HDTX	Pan Asia Indosyntec Tbk
47	MYTX	Apac Citra Centertex Tbk
48	TRIS	Trisula International Tbk
49	UNIT	Nusantara Inti Corpora Tbk
50	BIMA	Primarindo Asia Infrastructure Tbk
51	JECC	Jembo Cable Company Tbk
52	KBLI	KMI Wire and Cable Tbk
53	SCCO	Sumpreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk
54	VOKS	Voksel Electric Tbk
55	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk
56	DLTA	Delta Djakarta Tbk
57	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
58	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
59	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk
60	MYOR	Mayora Indah Tbk
61	PSDN	Prashida Aneka Niaga Tbk
62	ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk
63	STTP	Siantar Top Tbk
64	ULTJ	Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
65	GGRM	Gudang Garam Tbk
66	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
67	RMBA	Bentoel International Investama Tbk
68	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
69	INAF	Indofarma Tbk

70	KAEF	Kimia Farma Tbk
71	KLBF	Kalbe Farma Tbk
72	MERK	Merek Tbk
73	PYFA	Pyridam Farma Tbk
74	SCPI	Schering Plough Indonesia Tbk
75	SQBB	Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk
76	TSPC	Tempo Scan Pasific Tbk
77	MBTO	Martina Berto Tbk
78	MRAT	Mustika Ratu Tbk
79	TCID	Mandom Indonesia Tbk
80	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
81	KICI	Kedaung Indag Can Tbk
82	LMPI	Langgeng Makmur Industry Tbk

Lampiran 2 : Audit Delay Tahun 2013

No	Kode Perusahaan	Lap. Audit	LK	Audit Delay
1	INTP	07/03/2014	31/12/2013	66
2	SMCB	17/02/2014	31/12/2013	48
3	SMGR	14/02/2014	31/12/2013	45
4	AMFG	27/03/2014	31/12/2013	86
5	ARNA	18/02/2014	31/12/2013	49
6	IKAI	27/03/2014	31/12/2013	86
7	KIAS	20/02/2014	31/12/2013	51
8	MLIA	21/03/2014	31/12/2013	80
9	TOTO	20/03/2014	31/12/2013	79
10	ALKA	28/03/2014	31/12/2013	87
11	ALMI	21/03/2014	31/12/2013	80
12	BTON	24/03/2014	31/12/2013	83
13	GDST	20/03/2014	31/12/2013	79
14	INAI	21/03/2014	31/12/2013	80
15	JKSW	27/03/2014	31/12/2013	86
16	JPRS	21/03/2014	31/12/2013	80
17	BUDI	21/03/2014	31/12/2013	80
18	DPNS	25/03/2014	31/12/2013	84
19	EKAD	17/03/2014	31/12/2013	76
20	INCI	24/03/2014	31/12/2013	83
21	SRSN	10/03/2014	31/12/2013	69
22	AKPI	19/03/2014	31/12/2013	78
23	APLI	19/03/2014	31/12/2013	78
24	BRNA	27/03/2014	31/12/2013	86
25	IGAR	14/02/2014	31/12/2013	45
26	SIAP	25/02/2014	31/12/2013	56
27	TRST	18/03/2014	31/12/2013	77
28	YPAS	28/03/2014	31/12/2013	87
29	CPIN	26/03/2014	31/12/2013	85
30	JPFA	21/03/2014	31/12/2013	80
31	MAIN	24/03/2014	31/12/2013	83
32	SIPD	28/03/2014	31/12/2013	87
33	TIRT	20/03/2014	31/12/2013	79
34	ALDO	18/03/2014	31/12/2013	77

35	FASW	03/03/2014	31/12/2013	62
36	KBRI	27/03/2014	31/12/2013	86
37	SPMA	27/03/2014	31/12/2013	86
38	ASII	26/02/2014	31/12/2013	57
39	AUTO	20/02/2014	31/12/2013	51
40	GJTL	24/03/2014	31/12/2013	83
41	IMAS	14/03/2014	31/12/2013	73
42	INDS	26/03/2014	31/12/2013	85
43	LPIN	28/03/2014	31/12/2013	87
44	NIPS	27/03/2014	31/12/2013	86
45	SMSM	25/03/2014	31/12/2013	84
46	HDTX	19/03/2014	31/12/2013	78
47	MYTX	25/03/2014	31/12/2013	84
48	TRIS	03/03/2014	31/12/2013	62
49	UNIT	20/03/2014	31/12/2013	79
50	BIMA	27/03/2014	31/12/2013	86
51	JECC	21/03/2014	31/12/2013	80
52	KBLI	20/03/2014	31/12/2013	79
53	SCCO	21/03/2014	31/12/2013	80
54	VOKS	20/03/2014	31/12/2013	79
55	CEKA	07/03/2014	31/12/2013	66
56	DLTA	27/03/2014	31/12/2013	86
57	ICBP	17/03/2014	31/12/2013	76
58	INDF	17/03/2014	31/12/2013	76
59	MLBI	17/03/2014	31/12/2013	76
60	MYOR	26/03/2014	31/12/2013	85
61	PSDN	14/03/2014	31/12/2013	73
62	ROTI	17/02/2014	31/12/2013	48
63	STTP	27/03/2014	31/12/2013	86
64	ULTJ	24/03/2014	31/12/2013	83
65	GGRM	17/03/2014	31/12/2013	76
66	HMSP	27/03/2014	31/12/2013	86
67	RMBA	27/03/2014	31/12/2013	86
68	WIIM	14/03/2014	31/12/2013	73
69	INAF	21/02/2014	31/12/2013	52
70	KAEF	19/02/2014	31/12/2013	50
71	KLBF	11/03/2014	31/12/2013	70

72	MERK	14/02/2014	31/12/2013	45
73	PYFA	10/03/2014	31/12/2013	69
74	SCPI	01/04/2014	31/12/2013	91
75	SQBB	19/03/2014	31/12/2013	78
76	TSPC	17/03/2014	31/12/2013	76
77	MBTO	17/03/2014	31/12/2013	76
78	MRAT	24/03/2014	31/12/2013	83
79	TCID	05/03/2014	31/12/2013	64
80	UNVR	25/03/2014	31/12/2013	84
81	KICI	03/03/2014	31/12/2013	62
82	LMPI	14/03/2014	31/12/2013	73

Lampiran 3 : *Audit Delay* Tahun 2014

No	Kode Perusahaan	Lap. Audit	LK	Audit Delay
1	INTP	05/03/2015	31/12/2014	64
2	SMCB	17/02/2015	31/12/2014	48
3	SMGR	13/02/2015	31/12/2014	44
4	AMFG	25/03/2015	31/12/2014	84
5	ARNA	18/02/2015	31/12/2014	49
6	IKAI	26/03/2015	31/12/2014	85
7	KIAS	18/02/2015	31/12/2014	49
8	MLIA	12/03/2015	31/12/2014	71
9	TOTO	25/03/2015	31/12/2014	84
10	ALKA	27/03/2015	31/12/2014	86
11	ALMI	24/03/2015	31/12/2014	83
12	BTON	25/03/2015	31/12/2014	84
13	GDST	17/03/2015	31/12/2014	76
14	INAI	20/03/2015	31/12/2014	79
15	JKSW	27/03/2015	31/12/2014	86
16	JPRS	23/03/2015	31/12/2014	82
17	BUDI	20/03/2015	31/12/2014	79
18	DPNS	25/03/2015	31/12/2014	84
19	EKAD	20/03/2015	31/12/2014	79
20	INCI	24/03/2015	31/12/2014	83
21	SRSN	27/03/2015	31/12/2014	86
22	AKPI	09/04/2015	31/12/2014	99

23	APLI	20/03/2015	31/12/2014	79
24	BRNA	23/03/2015	31/12/2014	82
25	IGAR	09/02/2015	31/12/2014	40
26	SIAP	27/03/2015	31/12/2014	86
27	TRST	16/03/2015	31/12/2014	75
28	YPAS	06/03/2015	31/12/2014	65
29	CPIN	27/03/2015	31/12/2014	86
30	JPFA	25/02/2015	31/12/2014	56
31	MAIN	27/03/2015	31/12/2014	86
32	SIPD	27/05/2015	31/12/2014	147
33	TIRT	25/03/2015	31/12/2014	84
34	ALDO	18/03/2015	31/12/2014	77
35	FASW	10/03/2015	31/12/2014	69
36	KBRI	23/03/2015	31/12/2014	82
37	SPMA	30/03/2015	31/12/2014	89
38	ASII	26/02/2015	31/12/2014	57
39	AUTO	20/02/2015	31/12/2014	51
40	GJTL	25/03/2015	31/12/2014	84
41	IMAS	23/03/2015	31/12/2014	82
42	INDS	30/03/2015	31/12/2014	89
43	LPIN	30/03/2015	31/12/2014	89
44	NIPS	27/03/2015	31/12/2014	86
45	SMSM	25/03/2015	31/12/2014	84
46	HDTX	16/03/2015	31/12/2014	75
47	MYTX	29/04/2015	31/12/2014	119
48	TRIS	17/03/2015	31/12/2014	76
49	UNIT	25/03/2015	31/12/2014	84
50	BIMA	30/03/2015	31/12/2014	89
51	JECC	24/03/2015	31/12/2014	83
52	KBLI	20/03/2015	31/12/2014	79
53	SCCO	23/03/2015	31/12/2014	82
54	VOKS	15/04/2015	31/12/2014	105
55	CEKA	26/03/2015	31/12/2014	85
56	DLTA	27/03/2015	31/12/2014	86
57	ICBP	12/03/2015	31/12/2014	71
58	INDF	12/03/2015	31/12/2014	71
59	MLBI	16/03/2015	31/12/2014	75

60	MYOR	27/03/2015	31/12/2014	86
61	PSDN	18/03/2015	31/12/2014	77
62	ROTI	20/03/2015	31/12/2014	79
63	STTP	27/03/2015	31/12/2014	86
64	ULTJ	30/03/2015	31/12/2014	89
65	GGRM	24/03/2015	31/12/2014	83
66	HMSP	18/03/2015	31/12/2014	77
67	RMBA	27/03/2015	31/12/2014	86
68	WIIM	23/03/2015	31/12/2014	82
69	INAF	20/02/2015	31/12/2014	51
70	KAEF	20/02/2015	31/12/2014	51
71	KLBF	12/03/2015	31/12/2014	71
72	MERK	27/02/2015	31/12/2014	58
73	PYFA	16/03/2015	31/12/2014	75
74	SCPI	01/04/2015	31/12/2014	91
75	SQBB	13/03/2015	31/12/2014	72
76	TSPC	19/03/2015	31/12/2014	78
77	MBTO	25/03/2015	31/12/2014	84
78	MRAT	26/03/2015	31/12/2014	85
79	TCID	05/03/2015	31/12/2014	64
80	UNVR	27/03/2015	31/12/2014	86
81	KICI	04/03/2015	31/12/2014	63
82	LMPI	09/03/2015	31/12/2014	68

Lampiran 4 : *Audit Delay* Tahun 2015

No	Kode Perusahaan	Lap. Audit	LK	Audit Delay
1	INTP	10/03/2016	31/12/2015	70
2	SMCB	22/02/2016	31/12/2015	53
3	SMGR	15/02/2016	31/12/2015	46
4	AMFG	29/03/2016	31/12/2015	89
5	ARNA	29/03/2016	31/12/2015	89
6	IKAI	29/03/2016	31/12/2015	89
7	KIAS	15/03/2016	31/12/2015	75
8	MLIA	28/03/2016	31/12/2015	88
9	TOTO	29/03/2016	31/12/2015	89
10	ALKA	28/03/2016	31/12/2015	88

11	ALMI	28/03/2016	31/12/2015	88
12	BTON	24/03/2016	31/12/2015	84
13	GDST	21/03/2016	31/12/2015	81
14	INAI	28/03/2016	31/12/2015	88
15	JKSW	28/03/2016	31/12/2015	88
16	JPRS	22/03/2016	31/12/2015	82
17	BUDI	21/03/2016	31/12/2015	81
18	DPNS	30/03/2016	31/12/2015	90
19	EKAD	18/03/2016	31/12/2015	78
20	INCI	11/03/2016	31/12/2015	71
21	SRSN	11/03/2016	31/12/2015	71
22	AKPI	17/03/2016	31/12/2015	77
23	APLI	28/03/2016	31/12/2015	88
24	BRNA	30/03/2016	31/12/2015	90
25	IGAR	19/02/2016	31/12/2015	50
26	SIAP	25/04/2016	31/12/2015	116
27	TRST	14/03/2016	31/12/2015	74
28	YPAS	10/03/2016	31/12/2015	70
29	CPIN	29/03/2016	31/12/2015	89
30	JPFA	22/02/2016	31/12/2015	53
31	MAIN	24/03/2016	31/12/2015	84
32	SIPD	09/05/2016	31/12/2015	130
33	TIRT	23/03/2016	31/12/2015	83
34	ALDO	18/03/2016	31/12/2015	78
35	FASW	28/03/2016	31/12/2015	88
36	KBRI	28/03/2016	31/12/2015	88
37	SPMA	28/03/2016	31/12/2015	88
38	ASII	25/02/2016	31/12/2015	56
39	AUTO	20/02/2016	31/12/2015	51
40	GJTL	28/03/2016	31/12/2015	88
41	IMAS	24/03/2016	31/12/2015	84
42	INDS	18/03/2016	31/12/2015	78
43	LPIN	30/05/2016	31/12/2015	151
44	NIPS	26/03/2016	31/12/2015	86
45	SMSM	29/03/2016	31/12/2015	89
46	HDTX	15/03/2016	31/12/2015	75
47	MYTX	21/03/2016	31/12/2015	81

48	TRIS	14/03/2016	31/12/2015	74
49	UNIT	21/03/2016	31/12/2015	81
50	BIMA	26/03/2016	31/12/2015	86
51	JECC	24/03/2016	31/12/2015	84
52	KBLI	21/03/2016	31/12/2015	81
53	SCCO	18/03/2016	31/12/2015	78
54	VOKS	07/04/2016	31/12/2015	98
55	CEKA	16/03/2016	31/12/2015	76
56	DLTA	29/03/2016	31/12/2015	89
57	ICBP	23/03/2016	31/12/2015	83
58	INDF	23/03/2016	31/12/2015	83
59	MLBI	14/03/2016	31/12/2015	74
60	MYOR	22/03/2016	31/12/2015	82
61	PSDN	29/03/2016	31/12/2015	89
62	ROTI	24/03/2016	31/12/2015	84
63	STTP	21/03/2016	31/12/2015	81
64	ULTJ	29/03/2016	31/12/2015	89
65	GGRM	18/03/2016	31/12/2015	78
66	HMSP	01/03/2016	31/12/2015	61
67	RMBA	17/03/2016	31/12/2015	77
68	WIIM	18/03/2016	31/12/2015	78
69	INAF	25/02/2016	31/12/2015	56
70	KAEF	23/02/2016	31/12/2015	54
71	KLBF	11/03/2016	31/12/2015	71
72	MERK	04/03/2016	31/12/2015	64
73	PYFA	21/03/2016	31/12/2015	81
74	SCPI	18/04/2016	31/12/2015	109
75	SQBB	22/03/2016	31/12/2015	82
76	TSPC	18/03/2016	31/12/2015	78
77	MBTO	21/03/2016	31/12/2015	81
78	MRAT	29/03/2016	31/12/2015	89
79	TCID	03/03/2016	31/12/2015	63
80	UNVR	30/03/2016	31/12/2015	90
81	KICI	28/03/2016	31/12/2015	88
82	LMPI	17/03/2016	31/12/2015	77

Lampiran 5 : Data Keuangan Perusahaan Tahun 2013

No	Kode	Net Income	Total Asset	ROA	Total Debt	Total Equity	DER	Size
	Perusahaan							
1	INTP	5012294	26607241	0,188381	3629554	22977687	0,15796	17,09669
2	SMCB	952305	14884990	0,063978	6112043	8772947	0,696692	16,51586
3	SMGR	5354298	30792883	0,173881	8988908	21803975	0,41226	17,24279
4	AMFG	338358	3539393	0,095598	778666	2760727	0,282051	15,07947
5	ARNA	237697	1135243	0,20938	366754	768489	0,47724	13,94236
6	IKAI	-25698	482056	-0,05331	276648	205408	1,346822	13,08582
7	KIAS	75360	2270904	0,033185	223804	2047100	0,109327	14,63569
8	MLIA	-474045	7189899	-0,06593	5999787	1190112	5,041363	15,78819
9	TOTO	236557	1746177	0,135471	710527	1035650	0,686069	14,37294
10	ALKA	-315	241912	-0,0013	182253	59659	3,054912	12,39633
11	ALMI	26118	2752077	0,00949	2094736	657341	3,186681	14,82787
12	BTON	25882	176135	0,146944	37318	138817	0,268829	12,07901
13	GDST	91885	1191496	0,077117	307084	884412	0,347218	13,99072
14	INAI	5019	765880	0,006553	639563	126317	5,063159	13,54878
15	JKSW	-7968	262386	-0,03037	670190	-407804	-1,64341	12,47757
16	JPRS	15045	376540	0,039956	14019	362521	0,038671	12,83878
17	BUDI	42886	2382875	0,017998	1497754	885121	1,692146	14,68382
18	DPNS	66813	256371	0,260611	32944	223427	0,147449	12,45438
19	EKAD	39450	343600	0,114814	105893	237707	0,445477	12,74723
20	INCI	10331	136141	0,075885	10050	126091	0,079704	11,82145
21	SRSN	15994	420781	0,03801	106406	314375	0,338468	12,94987
22	AKPI	34620	2084566	0,016608	1055230	1029336	1,025156	14,55007
23	APLI	1881	303594	0,006196	85871	217723	0,394405	12,62345
24	BRNA	-12219	1125132	-0,01086	819251	305881	2,678332	13,93341
25	IGAR	35030	314745	0,111296	89003	225742	0,394269	12,65952
26	SIAP	-5779	272597	-0,0212	172583	100014	1,725588	12,51575
27	TRST	32965	3260919	0,010109	1551242	1709677	0,90733	14,99752
28	YPAS	6221	613878	0,010134	443067	170811	2,593902	13,32755
29	CPIN	2528690	15722197	0,160836	5771297	9950900	0,579977	16,57058
30	JPFA	640637	14917590	0,042945	9672368	5245222	1,844034	16,51805
31	MAIN	241632	2214398	0,109119	1351915	862483	1,567469	14,61049
32	SIPD	8377	3155680	0,002655	1870560	1285120	1,455553	14,96471
33	TIRT	-137918	723176	-0,19071	664163	59013	11,25452	13,49141
34	ALDO	22589	301478	0,074928	161595	139883	1,155215	12,61645
35	FASW	-249057	5692060	-0,04376	4134128	1557932	2,6536	15,55458
36	KBRI	-24216	788748	-0,0307	95512	693236	0,137777	13,5782
37	SPMA	-23856	1767105	-0,0135	1011571	755534	1,338882	14,38485
38	ASII	22297000	2,14E+08	0,104195	1,08E+08	1,06E+08	1,015237	19,18146
39	AUTO	999766	12484843	0,080078	3058924	9425919	0,324523	16,34003
40	GJTL	120330	15350754	0,007839	9626411	5724343	1,681662	16,54668
41	IMAS	621139	22315022	0,027835	15655152	6659870	2,350669	16,92077

42	INDS	147608	2196517	0,067201	443652	1752865	0,253101	14,60238
43	LPIN	8554	196390	0,043556	52980	143410	0,36943	12,18786
44	NIPS	33872	798406	0,042425	562461	235945	2,383865	13,59037
45	SMSM	338223	1712710	0,197478	695957	1016753	0,68449	14,35359
46	HDTX	-218654	2378727	-0,09192	1658609	720118	2,303246	14,68208
47	MYTX	-49787	2095468	-0,02376	2199025	-103557	-21,2349	14,55529
48	TRIS	51984	475427	0,109342	172797	302630	0,570984	13,07197
49	UNIT	831	459102	0,00181	217066	242036	0,896834	13,03703
50	BIMA	-16149	118008	-0,13685	321975	-203967	-1,57856	11,67851
51	JECC	22553	1239821	0,018191	1092161	147660	7,396458	14,03048
52	KBLI	73530	1337021	0,054995	450372	886649	0,507948	14,10595
53	SCCO	104962	1762032	0,059569	1054421	707611	1,490114	14,38198
54	VOKS	39092	1955830	0,019987	1354581	601249	2,252945	14,48633
55	CEKA	65068	1069626	0,060832	541352	528274	1,024756	13,88282
56	DLTA	270498	867039	0,311979	190482	676557	0,281546	13,67284
57	ICBP	2235040	21267470	0,105092	8001739	13265731	0,603189	16,87269
58	INDF	3416635	77611416	0,044022	39719660	37891756	1,04824	18,16723
59	MLBI	1171229	1782148	0,657201	794615	987533	0,804647	14,39333
60	MYOR	1013558	9710223	0,104381	5816323	3893900	1,493701	16,08869
61	PSDN	21322	681831	0,031272	264232	417599	0,632741	13,43254
62	ROTI	158015	1822688	0,086693	1035351	787337	1,315004	14,41582
63	STTP	114437	1470058	0,077845	775930	694128	1,117849	14,20081
64	ULTJ	325127	2811620	0,115637	796474	2015146	0,395244	14,84927
65	GGRM	4383932	50770251	0,086348	21353980	29416271	0,725924	17,74282
66	HMSF	10818486	27404594	0,394769	13249559	14155035	0,936032	17,12622
67	RMBA	-1042068	9232016	-0,11288	8350151	881865	9,468741	16,03819
68	WIIM	132322	1229010	0,107666	447651	781359	0,572913	14,02172
69	INAF	-54222	1294510	-0,04189	703717	590793	1,19114	14,07364
70	KAEF	215642	2471938	0,087236	847584	1624354	0,521798	14,72051
71	KLBF	1970452	11315060	0,174144	2815103	8499957	0,33119	16,24165
72	MERK	175444	696945	0,251733	184727	512218	0,360641	13,45446
73	PYFA	6195	175118	0,035376	81217	93901	0,864922	12,07322
74	SCPI	-12167	746401	-0,0163	736010	10391	70,83149	13,52302
75	SQBB	149521	421187	0,354999	74135	347052	0,213614	12,95083
76	TSPC	638535	5407957	0,118073	1545006	3862951	0,399955	15,50338
77	MBTO	16162	611769	0,026418	160451	451318	0,355517	13,32411
78	MRAT	-6700	439583	-0,01524	61792	377791	0,163561	12,99358
79	TCID	160148	1465951	0,109245	282961	1182990	0,239191	14,19801
80	UNVR	5352625	13703468	0,390604	9448798	4254670	2,220806	16,43316
81	KICI	7419	98295	0,075477	24319	73976	0,328742	11,49573
82	LMPI	-12040	822189	-0,01464	424769	397420	1,068816	13,61973

*dalam jutaan rupiah

Lampiran 6 : Data Keuangan Perusahaan Tahun 2014

No	Kode	Net Income	Total Asset	ROA	Total Debt	Total Equity	DER	Size
	Perusahaan							
1	INTP	5274009	28884973	0,182587	4100172	24784801	0,165431	17,17883
2	SMCB	668869	17195352	0,038898	8436760	8758592	0,963255	16,66015
3	SMGR	5573577	34314665	0,162426	9312214	25002451	0,372452	17,35108
4	AMFG	458635	3918391	0,117047	733749	3184642	0,230402	15,18119
5	ARNA	261651	1259174	0,207796	346944	912230	0,380325	14,04597
6	IKAI	-26511	518546	-0,05113	339889	178657	1,902467	13,15878
7	KIAS	92239	2352542	0,039208	235745	2116797	0,111369	14,67101
8	MLIA	125013	7215152	0,017326	5893580	1321572	4,459522	15,79169
9	TOTO	293803	2027288	0,144924	796096	1231192	0,646606	14,52221
10	ALKA	2659	244877	0,010859	181642	63235	2,872491	12,40851
11	ALMI	1948	3212438	0,000606	2571403	641035	4,01133	14,98254
12	BTON	7630	174157	0,043811	27517	146640	0,18765	12,06771
13	GDST	-13938	1354621	-0,01029	484174	870447	0,556236	14,11903
14	INAI	22058	897281	0,024583	751439	145842	5,152418	13,70712
15	JKSW	-9631	302951	-0,03179	720387	-417436	-1,72574	12,62133
16	JPRS	-6930	370966	-0,01868	15334	355632	0,043118	12,82387
17	BUDI	28499	2476982	0,011506	1563631	913351	1,711972	14,72255
18	DPNS	14519	268876	0,053999	32794	236082	0,138909	12,50201
19	EKAD	40756	411348	0,099079	138149	273199	0,505672	12,92719
20	INCI	11028	147991	0,074518	10872	137119	0,079289	11,90491
21	SRSN	14456	463346	0,031199	134510	328836	0,409049	13,04623
22	AKPI	34690	2227041	0,015577	1191196	1035845	1,149975	14,61618
23	APLI	9626	273125	0,035244	47868	225257	0,212504	12,51768
24	BRNA	56998	1334085	0,042724	967711	366374	2,64132	14,10376
25	IGAR	54898	349894	0,156899	86443	263451	0,328118	12,76539
26	SIAP	7382	4979635	0,001482	221617	4758018	0,046578	15,42087
27	TRST	30084	3261285	0,009225	1499792	1761493	0,851432	14,99763
28	YPAS	-8931	320494	-0,02787	158615	161879	0,979837	12,67762
29	CPIN	1746644	20862439	0,083722	9919150	10943289	0,906414	16,85346
30	JPFA	384846	15730435	0,024465	10440441	5289994	1,973621	16,57111
31	MAIN	-84778	3531219	-0,02401	2453334	1077885	2,276063	15,07715
32	SIPD	2064	2800914	0,000737	1513908	1287006	1,176302	14,84546
33	TIRT	23140	713714	0,032422	631560	82154	7,687514	13,47824
34	ALDO	21061	356813	0,059025	197391	159422	1,238167	12,78497
35	FASW	86745	5580999	0,015543	3936322	1644677	2,393371	15,53488
36	KBRI	-17526	1299314	-0,01349	622269	677045	0,919095	14,07735
37	SPMA	48602	2091957	0,023233	1287357	804600	1,599996	14,55361
38	ASII	22125000	2,36E+08	0,093738	1,16E+08	1,2E+08	0,961612	19,27947
39	AUTO	956409	14380926	0,066505	4244369	10136557	0,418719	16,48141
40	GJTL	269868	16042897	0,016822	10059605	5983292	1,681283	16,59078
41	IMAS	-67093	23471397	-0,00286	16744375	6727022	2,489121	16,97129

42	INDS	127657	2282665	0,055925	454347	1828318	0,248505	14,64085
43	LPIN	-4130	185594	-0,02225	46315	139279	0,332534	12,13132
44	NIPS	50134	1206854	0,041541	630960	575894	1,095618	14,00353
45	SMSM	420436	1749395	0,240332	602558	1146837	0,525409	14,37478
46	HDTX	-105481	4221696	-0,02499	3607059	614637	5,8686	15,25575
47	MYTX	-158271	2041304	-0,07753	2310084	-268780	-8,5947	14,5291
48	TRIS	35944	523900	0,068609	214390	309510	0,692676	13,16906
49	UNIT	352	440522	0,000799	198280	242242	0,81852	12,99572
50	BIMA	10048	104059	0,096561	297977	-193918	-1,53661	11,55271
51	JECC	23844	1062475	0,022442	891120	171355	5,200432	13,87611
52	KBLI	70080	1337350	0,052402	396594	940756	0,421569	14,1062
53	SCCO	137618	1656006	0,083102	841614	814392	1,033426	14,31992
54	VOKS	-85393	1553904	-0,05495	1038049	515855	2,012288	14,25628
55	CEKA	41001	1284149	0,031929	746598	537551	1,388888	14,06561
56	DLTA	288073	991946	0,290412	227473	764473	0,297555	13,80742
57	ICBP	2531681	24910211	0,101632	9870264	15039947	0,65627	17,03079
58	INDF	5146323	85938885	0,059884	44710509	41228376	1,08446	18,26915
59	MLBI	794883	2231051	0,356282	1677254	553797	3,028644	14,61798
60	MYOR	409824	10291107	0,039823	6190553	4100554	1,509687	16,14679
61	PSDN	-28175	620927	-0,04538	242353	378574	0,640173	13,33897
62	ROTI	188577	2142893	0,088001	1182771	960122	1,231897	14,57767
63	STTP	123465	1700203	0,072618	882610	817593	1,079522	14,34626
64	ULTJ	283360	2917082	0,097138	651985	2265097	0,28784	14,88609
65	GGRM	5395293	58220600	0,09267	24991880	33228720	0,752117	17,87975
66	HMSM	10181083	28380630	0,358734	14882516	13498114	1,102563	17,16122
67	RMBA	-2278718	10250546	-0,2223	11647399	-1396853	-8,33831	16,14284
68	WIIM	112304	1332907	0,084255	478482	854425	0,560005	14,10287
69	INAF	1164	1248343	0,000932	656380	591963	1,108819	14,03733
70	KAEF	236531	2968183	0,079689	1157040	1811143	0,638845	14,90346
71	KLBF	2121090	12425031	0,170711	2607556	9817475	0,265604	16,33522
72	MERK	181472	716598	0,253241	162908	553690	0,294222	13,48227
73	PYFA	2657	172735	0,015382	76177	96558	0,788925	12,05951
74	SCPI	-62461	1317315	-0,04742	1361171	-43856	-31,0373	14,09111
75	SQBB	164808	459351	0,358784	90473	368878	0,245265	13,03757
76	TSPC	584293	5592729	0,104474	1460391	4132338	0,353406	15,53698
77	MBTO	2925	619382	0,004722	165633	453749	0,365032	13,33648
78	MRAT	7371	498785	0,014778	114841	383944	0,299109	13,11993
79	TCID	174314	1853234	0,094059	569730	1283504	0,443886	14,43244
80	UNVR	5738523	14280670	0,401838	9681888	4598782	2,105316	16,47442
81	KICI	4703	96745	0,048612	18065	78680	0,229601	11,47983
82	LMPI	1710	808891	0,002114	409761	399130	1,026635	13,60342

*dalam jutaan rupiah

Lampiran 7 : Data Keuangan Perusahaan Tahun 2015

No	Kode	Net Income	Total Asset	ROA	Total Debt	Total Equity	DER	Size
	Perusahaan							
1	INTP	4356661	27638360	0,157631	3772410	23865950	0,158067	17,13472
2	SMCB	175127	17321565	0,01011	8871708	8449857	1,049924	16,66746
3	SMGR	4525441	38153118	0,118613	10712320	27440798	0,390379	17,45712
4	AMFG	341346	4270275	0,079935	880052	3390223	0,259585	15,26719
5	ARNA	71209	1430778	0,049769	536050	894728	0,599121	14,17373
6	IKAI	-108888	390041	-0,27917	321009	69032	4,650148	12,87401
7	KIAS	-163719	2124390	-0,07707	310906	1813484	0,171441	14,569
8	MLIA	-155911	7125800	-0,02188	6010681	1115119	5,39017	15,77923
9	TOTO	285236	2439539	0,116922	947997	1491542	0,635582	14,70732
10	ALKA	-1175	144627	-0,00812	82595	62032	1,33149	11,88191
11	ALMI	-53613	2189037	-0,02449	1623926	565111	2,873641	14,59897
12	BTON	6323	183115	0,03453	34011	149104	0,228103	12,11787
13	GDST	-55212	1183933	-0,04663	379524	804409	0,471805	13,98435
14	INAI	28615	1330258	0,021511	1090438	239820	4,546902	14,10088
15	JKSW	-23096	265281	-0,08706	705813	-440532	-1,60218	12,48854
16	JPRS	-21989	363265	-0,06053	30806	332459	0,092661	12,80289
17	BUDI	21072	3265953	0,006452	2160702	1105251	1,954942	14,99906
18	DPNS	9859	274483	0,035918	33187	241296	0,137536	12,52264
19	EKAD	47040	389691	0,120711	97730	291961	0,334736	12,87311
20	INCI	16960	169545	0,100032	15494	154051	0,100577	12,04087
21	SRSN	15504	574072	0,027007	233993	340079	0,688055	13,26051
22	AKPI	27644	2884242	0,009584	1776677	1107565	1,604129	14,87477
23	APLI	1854	308620	0,006007	87059	221561	0,392935	12,63987
24	BRNA	-7159	1820783	-0,00393	992869	827914	1,199242	14,41478
25	IGAR	51416	383935	0,133919	73471	310464	0,236649	12,85823
26	SIAP	-36848	277981	-0,13256	253767	24214	10,48018	12,53531
27	TRST	25314	3357358	0,00754	1400438	1956920	0,715634	15,02666
28	YPAS	-9880	279189	-0,03539	128790	150399	0,856322	12,53964
29	CPIN	1832598	24684915	0,07424	12123488	12561427	0,965136	17,0217
30	JPFA	524484	17159466	0,030565	11049774	6109692	1,808565	16,65806
31	MAIN	-62097	3962067	-0,01567	2413482	1548585	1,558508	15,19228
32	SIPD	-362030	2246769	-0,16113	1512527	734242	2,059984	14,625
33	TIRT	-865	763167	-0,00113	672006	91161	7,371639	13,54523
34	ALDO	24079	366010	0,065788	195081	170929	1,141298	12,81042
35	FASW	-308896	6993634	-0,04417	4548288	2445346	1,859977	15,76051
36	KBRI	-155746	1455930	-0,10697	934677	521253	1,793135	14,19116
37	SPMA	-42597	2142682	-0,01988	1390005	752677	1,846748	14,57757
38	ASII	15613000	2,45E+08	0,063614	1,19E+08	1,27E+08	0,939692	19,31854
39	AUTO	322701	14339110	0,022505	4195684	10143426	0,413636	16,4785
40	GJTL	-313326	17509505	-0,01789	12115363	5394142	2,246022	16,67825
41	IMAS	-22489	24860956	-0,0009	18163865	6697091	2,712202	17,02881

42	INDS	1933	8553927	0,000226	6634889	1919038	3,457404	15,9619
43	LPIN	-18173	324054	-0,05608	207564	116490	1,781818	12,68867
44	NIPS	30671	1547719	0,019817	938717	609002	1,541402	14,25229
45	SMSM	602997	2220108	0,271607	779860	1440248	0,541476	14,61307
46	HDTX	-355659	4878367	-0,07291	3482406	1395961	2,49463	15,40032
47	MYTX	-263871	1944326	-0,13571	2512252	-567926	-4,42356	14,48043
48	TRIS	37448	574346	0,065201	245138	329208	0,74463	13,26099
49	UNIT	385	460539	0,000836	217565	242974	0,895425	13,04015
50	BIMA	-771	99558	-0,00774	301570	-202012	-1,49283	11,5085
51	JECC	2464	1358463	0,001814	990707	367756	2,693925	14,12186
52	KBLI	115371	1551798	0,074347	524437	1027361	0,51047	14,25492
53	SCCO	159119	1773143	0,089738	850791	922352	0,922415	14,38826
54	VOKS	277	1536243	0,00018	1026591	509652	2,014298	14,24485
55	CEKA	106549	1485825	0,07171	845932	639893	1,32199	14,21148
56	DLTA	192045	1038321	0,184957	188700	849621	0,222099	13,85312
57	ICBP	2923148	26560624	0,110056	10173713	16386911	0,620844	17,09494
58	INDF	3709501	91831526	0,040395	48709933	43121593	1,129595	18,33547
59	MLBI	496909	2100853	0,236527	1334373	766480	1,74091	14,55785
60	MYOR	1250233	11342714	0,110223	6148255	5194459	1,183618	16,24409
61	PSDN	-42619	620398	-0,0687	296079	324319	0,912925	13,33812
62	ROTI	270538	2706322	0,099965	1517788	1188534	1,277025	14,8111
63	STTP	185705	1919567	0,096743	910758	1008809	0,902805	14,46761
64	ULTJ	523100	3539995	0,147769	742490	2797505	0,265412	15,07964
65	GGRM	6452834	63505413	0,101611	25497504	38007909	0,670847	17,96664
66	HMSP	10363308	38010724	0,272642	5994664	32016060	0,187239	17,45338
67	RMBA	-1638538	12667314	-0,12935	15816071	-3148757	-5,02296	16,35454
68	WIIM	131081	1342699	0,097625	398991	943708	0,422791	14,11019
69	INAF	6565	1533707	0,00428	940999	592708	1,587627	14,2432
70	KAEF	252972	3236223	0,078169	1374127	1862096	0,737946	14,98992
71	KLBF	2057694	13696416	0,150236	2758131	10938285	0,252154	16,43264
72	MERK	142545	641646	0,222155	168103	473543	0,35499	13,37179
73	PYFA	3087	159951	0,0193	58729	101222	0,5802	11,98262
74	SCPI	139321	1510747	0,09222	1409875	100872	13,97687	14,22811
75	SQBB	150207	464027	0,323703	109974	354053	0,310615	13,0477
76	TSPC	529218	6284728	0,084207	1947588	4337140	0,449049	15,65363
77	MBTO	-14056	648898	-0,02166	214685	434213	0,494423	13,38303
78	MRAT	1045	497090	0,002102	120064	377026	0,31845	13,11653
79	TCID	544574	2082095	0,261551	367224	1714871	0,214141	14,54889
80	UNVR	5851805	15729945	0,372017	10902585	4827360	2,258498	16,57108
81	KICI	-13000	133831	-0,09714	40460	93371	0,433325	11,80433
82	LMPI	3968	793092	0,005003	391881	401211	0,976745	13,58369

*dalam jutaan rupiah

Lampiran 8: Uji Hipotesis

Lampiran 8.1: Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,295 ^a	,087	,076	14,183454	1,816

a. Predictors: (Constant), LNASSET, SOLV, PROF

b. Dependent Variable: AD

Lampiran 8.2: Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4652,022	3	1550,674	7,708	,000 ^b
	Residual	48683,230	242	201,170		
	Total	53335,252	245			

a. Dependent Variable: AD

b. Predictors: (Constant), LNASSET, SOLV, PROF

Lampiran 8.3: Uji t

Coefficients^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	100,430	8,074		12,439	,000		
	PROF	-27,548	8,201	-,210	-3,359	,001	,964	1,037
	SOLV	,154	,164	,058	,940	,348	,998	1,002
	LNASSET	-1,445	,559	-,161	-2,583	,010	,966	1,035

a. Dependent Variable: AD

PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI DI INDONESIA

(Studi Pada Provinsi di Jawa dan di Sumatera)

Fadhilah Nuraini,

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Kiagus Andi

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Yunia Amelia

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

email: yuniaamelia@yahoo.com

Fitra Dharma

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

ABSTRACT

The purpose of this study is to compare the financial performance of the provincial governments in Java and Sumatra in the 2014-2017 period and to determine the differences in the financial performance of the provincial governments in Java and Sumatra in the 2014-2017 period. The research method used is quantitative research methods. The population in this study is the report of the Realization of Regional Government Revenue and Expenditures of Provincial Governments in Indonesia in 2014-2017. The sample selection uses a purposive sampling technique that is sampling taking into account certain characteristics and criteria. The results of this study are based on the results of descriptive analysis in mind that the financial performance of provinces in Java is better than provinces in Sumatra. While the results of different tests show that there is no significant difference in the financial performance of the provincial governments in Java and Sumatra because it shows a significance value of more than 0.05.

Keywords: *Comparison, Financial Performance, Local Government*

A. PENDAHULUAN

Proses anggaran merupakan kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi, apakah pemerintah daerah melakukan tugasnya dengan efektif, efisien, dan ekonomis, atau dengan kata lain apakah pemerintah daerah melakukan “hal yang benar dengan benar”. Penilaian kinerja pemerintah daerah harus mempertimbangkan dua elemen penting yang berbeda, namun sangat berkaitan erat. Pertama dan terpenting adalah apakah pemerintah daerah melakukan “hal yang benar” dalam hal pelayanan publik yang disediakan dan proyek yang dikerjakan?. Kedua adalah apakah pemerintah melakukan “sesuatu hal dengan benar” dalam arti kepatuhan dan standar efisiensi? (Halim, 2012:2).

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (PP 58 tahun 2005, pasal 4). Salah satu solusi untuk pemerintah daerah dalam memperbaiki segala kesalahan yang telah terjadi, Anggaran Berbasis Kinerja dapat menjadi jawabannya. Anggaran Berbasis Kinerja pada dasarnya digunakan untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat pada pendekatan anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan tidak adanya tolok ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah. Pendekatan ini menekankan pada konsep *value for money* dan pengawasan atas kinerja output sehingga jelas tujuan dan sasaran kinerjanya (Mardiasmo, 2013).

Pemerintah provinsi di Negara Indonesia selama ini belum melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *Value for Money*. Pengukuran kinerja ini lebih menitikberatkan dalam hal keuangan daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Diharapkan dengan adanya pengukuran kinerja dengan metode ini, masyarakat secara luas akan lebih mengetahui dan dapat menilai secara fokus tentang bagaimana pemerintah daerah provinsi dalam memajemen atau mengelola APBD untuk merealisasikan kebijakan berdasarkan pada sasaran yang telah ditentukan, apakah terjadi pemborosan atau tidak, bagaimana hasilnya dengan menggunakan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan sasaran awal atau tidak, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06 persen, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5,01 persen. Sedangkan secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03 persen. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengungkapkan, secara spasial atau wilayah pertumbuhan ekonomi nasional masih didominasi oleh pulau Jawa dan Sumatera dengan angka pertumbuhan ekonomi 5,51 persen untuk pulau Jawa, dan 4,43 untuk Pulau Sumatera atau di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional. Penulis ingin mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah propinsi di Indonesia terutama pada propinsi di Jawa dan di Sumatera.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Anggaran Sektor Publik

Anggaran sebagai pernyataan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2012:61).

Anggaran Berbasis Kinerja

Pengertian anggaran berbasis kinerja menurut pandangan *Government Performance Result Act* dalam Yuwono, Indrajaya & Hariyandi (2015: 35) adalah sebagai berikut :
“*Performance budgeting is a systematic approach to help government become more responsive to taxpaying public by linking program funding to performance and production.*”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk menyusun APBD, pemerintah terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan menggunakan rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (Nordian, 2006:88).

Kinerja Keuangan

Arti dari penilaian kinerja menurut Mardiasmo (2002:28) “yaitu penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” Dan menurut keputusan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lain yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisa keuangan menurut Halim (2001:127) “merupakan sebuah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.” Sedangkan pada pasal 4 PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Parameter Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Analisis rasio keuangan pada APBD keuangan pada APBD dilakukandengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan denganperiode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yangterjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasiokeuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan daerah lain yangterdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimanarasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Kerangka Pikir



Pengembangan Hipotesis

Uji Hipotesis yang dilakukan untuk memprediksi kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang. Perhitungan ini dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai variabel berdasarkan nilai anggaran dana pendapatan dan belanja daerah Provinsi se-Indonesia pertahun. Data kuantitatif berupa laporan perhitungan APBD Pemerintah Provinsi di provinsi Jawa dan Sumatera periode anggaran tahun 2014 sampai dengan 2017. Hipotesis yang akan diuji untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- H1: Terdapat perbedaan tingkat kemandirian pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.
- H2: Terdapat perbedaan tingkat efektivitas pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.
- H3: Terdapat perbedaan tingkat efisiensi pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.
- H4: Terdapat perbedaan tingkat aktivitas belanja operasi pada kinerja keuangan provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.
- H5: Terdapat perbedaan tingkat aktivitas belanja modal / belanja pembangunan pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.
- H6: Terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan PAD pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari website/situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah dari provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

Data yang dikumpulkan serta digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah data sekunder yang merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya yaitu, data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi di Jawa dan di Sumatera Tahun 2014-2017.

Metode Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data yang relevan untuk mendukung analisis pembahasan, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan

Penelitian ini digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data utama yang akan digunakan untuk melakukan analisis terkait permasalahan yang ingin penulis jawab. Penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Dokumentasi, yaitu dengan melihat dokumen, catatan dan laporan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai dasar analisis yang akan dilakukan penulis. Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen yang sudah ada. Data dalam penelitian ini berasal dari data Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah dari provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur, majalah dan tulisan ilmiah yang sifatnya mendukung penelitian yang dilakukan peneliti.

Metode Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dengan metode ini adalah:

1. Metode Deskriptif

Metode analisa dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklasifikasi, dianalisa, selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Dalam hal ini analisa data akan dilakukan dengan menggunakan:

a. Rasio keuangan daerah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Rasio keuangan daerah yang digunakan yaitu:

1) Rasio Kemandirian

Menurut Widodo (Halim, 2004 : 284) Kemandirian keuangan daerah atau otonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100 \%}{\text{Total Pendapatan}}$$

2) Rasio Efektifitas

Menurut Widodo (Halim, 2004 : 285) Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100 \%$$

3) Rasio Efisiensi

Menurut Mahmudin (2007 : 152) rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan daerah semakin baik. semakin baik.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

4) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2012 : 236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

a. Rasio Belanja Operasi

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudin (2017 : 152) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

b. Rasio Belanja Modal

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudin (2007 : 152), pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010), rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t-1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t-1)} \times 100 \%$$

b. Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan

Data penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah data penelitian mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Syarat normal tidaknya data terlihat dari probabilitas signifikansinya. Apabila probabilitas signifikansi $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal, sedangkan apabila probabilitas signifikansi > 0.05 maka data terdistribusi normal. Beberapa kemungkinan pilihan alat uji statistik atas hasil penelitian setelah dilakukan uji normalitas adalah:

1) Uji Kolmogorov Smirnov adalah pengujian lebih dari dua sampel. Asumsi yang digunakan pada uji independent sample t-test:

- a) Populasi-populasi yang akan diuji berdistribusi normal
- b) Varians dari populasi-populasi tersebut adalah sama (Homogeneity of variance)
- c) Sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain

Kriteria uji asumsi Homogenitas:

- a. Jika signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima (varian sama)
- b. Jika signifikan $< 0,05$ maka H_0 ditolak (varian berbeda)

Kriteria uji independent sample t-test:

- a. H_0 diterima apabila signifikansinya $> 0,05$
- b. H_0 ditolak apabila signifikansinya $< 0,05$

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin peneliti investigasi. Adapun populasi penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang harus memiliki karakteristik populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah metode purposive sampling yakni pengambilan sampel dengan memperhatikan karakteristik dan kriteria tertentu. Kriteria penarikan sampel diambil dari laporan realisasi anggaran pada pemerintah Provinsi se-Indonesia dari tahun 2014-2017, laporan keuangan pemerintah daerah antara tahun 2014 sampai 2017 telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2014 sampai 2017 telah dipublikasikan melalui website resmi BPK.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014-2017, yang diperoleh dari website/ situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi APBD pemerintah daerah dari provinsi di Jawa dan di Sumatera periode 2014-2017. Elemen yang digunakan dalam Laporan APBD adalah Target Penerimaan PAD, sedangkan elemen dalam Laporan Realisasi APBD yang digunakan meliputi Total Pendapatan Daerah, Realisasi Penerimaan PAD, Total Belanja Daerah dan Total Belanja Pelayanan Publik (Belanja Modal), dan pertumbuhan.

Pengujian Hipotesis

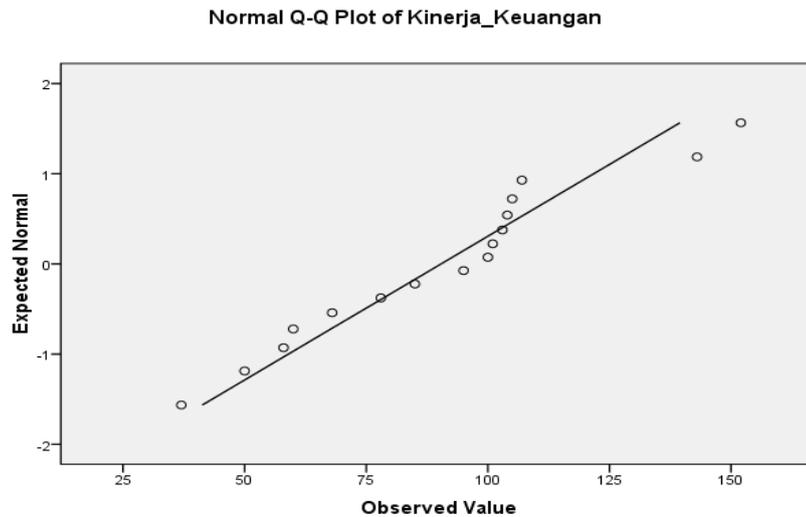
Uji Normalitas

Sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test. Untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan analisis test normality dan uji normal probability plot.

Tabel 1 Hasil uji normalitas data Kolmogorov-Smirnov Test sebagai berikut:

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kinerja_Keuangan	.173	16	.200*	.953	16	.538
a. Lilliefors Significance Correction						
*. This is a lower bound of the true significance.						

Diketahui bahwa nilai sig adalah sebesar 0,538 artinya nilai sig lebih besar dari 0,05, dengan demikian maka data dalam penelitian ini terdistribusi normal.



Pada hasil uji *normal probability plot* yang terdapat pada gambar, terlihat gelembung-gelembung atau titik-titik garis mendekati garis lurus diagonal, seperti yang sudah dijelaskan bahwa distribusi data residual normal maka garis menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal.

Uji Beda

Uji independent sample t-test adalah uji statistik parametrik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan mean antara dua kelompok data yang independent atau tidak terkait. Uji independent sample t-test pada prinsipnya membandingkan rata-rata dari dua group yang tidak berhubungan satu sama lain dengan tujuan apakah kedua group tersebut memiliki rata-rata yang sama atau tidak.

Tabel 1. Hasil Uji Beda Independent Sample t-test

Rasio	Kelas	Mean	F	Sig.
Kemandirian	Sumatera	89.6000	1.529	0.237
	Jawa	91.8333		
Efektifitas	Sumatera	1.0100	8.930	0.010
	Jawa	1.1333		
Efisiensi	Sumatera	99.1000	0.394	0.540
	Jawa	98.1667		
Belanja Operasi	Sumatera	73.7000	2.622	0.128
	Jawa	94.5000		
Belanja Modal	Sumatera	1.0450	0.421	0.527
	Jawa	1.0383		
Pertumbuhan	Sumatera	7.0000	0.031	0.863
	Jawa	6.5000		

Sumber : olah data SPSS V.20, 2019

Berdasarkan hasil analisis uji beda dengan tingkat signifikansi 10% maka penelitian ini menunjukkan bahwa : rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah provinsi di Jawa dan Sumatera. Sedangkan pada rasio efektivitas, diketahui terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan provinsi di Jawa dan Sumatera.

Dari hasil group statistic, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Sumatera ditinjau dari rasio kemandirian, efektifitas, dan belanja operasi. Sedangkan ditinjau dari rasio efisiensi, belanja modal, dan pertumbuhan, Provinsi Sumatera memiliki kinerja keuangan lebih baik dari Provinsi Jawa.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dilihat dari rasio kemandirian adalah 0,237 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H1 tidak terdukung yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Pada uji beda rasio kemandirian group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 89,6000 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai mean 91,8333. Artinya, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Sumatera. Kemandirian keuangan daerah Provinsi di Jawa atau otonomi fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan penerimaan daerah. Artinya dalam hal ini, pemerintah Provinsi di Jawa memiliki tingkat kemandirian yang cukup baik dibandingkan Provinsi di Sumatera, karena Provinsi di Jawa memiliki kemampuan untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, yang ditandai dengan pendapatan asli daerah yang cukup tinggi.

Dilihat dari rasio efektifitas adalah 0,010 yang artinya lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H2 terdukung, yang berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Pada uji beda rasio efektifitas group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 1,01 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai mean 1,13. Artinya, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Sumatera. Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dalam hal ini, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dari segi efektifitas karena Provinsi di Jawa memiliki realisasi pendapatan yang lebih besar daripada target pendapatan yang direncanakan.

Dilihat dari rasio efisiensi adalah 0,540 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H3 tidak terdukung, yang berarti bahwa terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Pada uji beda rasio

efisiensi group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 99,10 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai mean 98,16. Artinya, ditinjau dari segi efisiensi, Provinsi di Sumatera memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Jawa. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dalam hal ini, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dari segi efisiensi karena Provinsi di Jawa memiliki realisasi pendapatan yang lebih besar daripada biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dilihat dari rasio belanja operasi adalah 0,128 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H4 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Pada uji beda rasio belanja operasi group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 73,70 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai mean 94,50. Artinya, ditinjau dari segi belanja operasi, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Sumatera. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Dalam hal ini, Provinsi di Jawa memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dari segi belanja operasi karena Provinsi di Jawa memiliki tingkat pendapatan yang tinggi.

Dilihat dari rasio belanja modal adalah 0,527 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H5 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Pada uji beda rasio belanja modal group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 1,045 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai mean 1,038. Artinya, ditinjau dari segi belanja modal, Provinsi di Sumatera memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Jawa. Belanja modal dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam hal ini, artinya Provinsi di Sumatera memiliki belanja modal yang cukup tinggi untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Dilihat dari rasio pertumbuhan adalah 0,863 yang artinya lebih besar dari 0,05, dengan demikian H6 tidak terdukung, yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Jawa dan di Sumatera tahun 2014-2017. Pada uji beda rasio pertumbuhan modal group statistics, diketahui Provinsi di Sumatera memiliki nilai mean 7,0 sedangkan Provinsi di Jawa memiliki nilai mean 6,5. Artinya, ditinjau dari segi pertumbuhan, Provinsi di Sumatera memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari Provinsi di Jawa. Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, Kinerja Keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Dalam hal ini Pulau Sumatera menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik dikarenakan Pulau Sumatera mengalami pertumbuhan positif dalam kinerja APBD selama periode tahun 2014-2017.

Saran

Saran yang ingin penulis berikan dalam penelitian ini yaitu : Bagi pemerintah daerah propinsi se-Indonesia diharapkan untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan kemandirian daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan diharapkan dapat menjadi rekomendasi atas pelaksanaan laporan keuangan sebagai bahan koreksi dan masukan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian sebagai alat pengukurannya

REFERENSI

- Abdul, Sabtari. 2015. *Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Grobogan)*. Semarang: Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Vol.4, No.2:1-10.
- Anggraini, Alia. 2016. *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kabupaten Pemekaran*. Palembang: Jurnal Akuntansi Sektor Publik. Vol.2, No.4:16-21.
- Anton, M.G. 2016. *Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Untuk Menunjang Akuntabilitas Publik Pada Badan Lingkungan Hidup Kota Manado*. Manado: Jurnal Emba. Vol.4, No.3:553-563.
- Arif, Bahtiar, dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta :Salemba Empat.
- Bastian, Indra.2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.
- Cholifah. 2013. Rancangan Model Efektivitas Penggunaan Anggaran Berbasis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur. Surabaya: Jurnal Wiga. Vol.3, No.2:20-30.
- Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan keuangan Daerah Wilayah 3. 2015. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*.
- Erlina, Sri Mulyani, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen, Cetakan Pertama*. Medan : USU Press.
- Garrison, dkk. 2001. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul.2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. UPP AMP YKPN.2001. *Akuntansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta :Salemba Empat.
- Hansen dan Mowen. 2006. *Akuntansi Manajemen*. Jakarta :Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur, dkk. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE.

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 2015. *Clean Government dan Good Government Untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan Pelayanan Publik*. Jakarta: Kemenpan RB
- Kurrohman, Taufik. 2013. *Evaluasi Penganggaran Berbasis Kinerja Melalui Kinerja Keuangan Yang Berbasis Value For Money Di Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Jember: Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol.5, No.1:1-11.
- Mahmudin.2006.*Analisis kinerja keuangan*.Malang :Edisi kedua.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Cetakan Kelima*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Sipayung, Friska. 2009. *Balanced Scorecard: Pengukuran Kinerja Perusahaan dan Sistem Manajemen Strategis*. Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. 2, No.1, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, Erlanda Juliansyah. 2012. *Pengelolaan Kepegawaian Pada Era Otonomi*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 65, April 2015, hal. 37-60. Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
- Yuwono, Sony, dkk. 2015. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. JawaTimur: Bayumedia Publishing.

PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, OPINI AUDIT, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *AUDIT REPORT LAG*

Oftika Sari

FEB Universitas Lampung

oftikasari@gmail.com

Einde Evana

FEB Universitas Lampung

eindeevana@yahoo.co.id

Ninuk Dewi Kesumaningrum

FEB Universitas Lampung

ninukdewi@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh *financial distress*, opini audit, dan profitabilitas terhadap *audit report lag* (studi empiris pada perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia, penelitian ini memiliki 53 perusahaan sampel dalam pemilihan berdasarkan teknik *purposive sampling* pada tahun 2012-2016. Analisis data menggunakan analisis regresi logistik dengan *software* SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Implikasi praktis dari penelitian ini sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam merencanakan pekerjaan lapangan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memperbaiki ketepatan pelaporan keuangan ataupun mempercepat publikasi laporan auditan.

Keywords: audit report lag, financial distress, opini audit, profitabilitas.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Laporan keuangan yang baik memiliki karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2017), terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan termasuk dalam salah satu kualitas laporan keuangan yang memiliki peranan penting dalam pembuatan keputusan (Shukeri dan Nelson, 2011). Laporan keuangan perusahaan yang ditutup per tanggal 31 Desember tidak dapat selesai pada

tanggal itu juga. Perusahaan masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut sampai dengan penyerahan kepada auditor untuk dilakukan audit. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut dipublikasikan dan mempengaruhi manfaat informasi laporan keuangan. Rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit disebut *Audit report lag* (Juanita, 2012). Semakin panjang *audit report lag*, semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Berdasarkan data per November 2017 terdapat 558 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa terjadi penambahan jumlah perusahaan *go public* setiap tahunnya. Seiring dengan bertambahnya perusahaan yang terdaftar di BEI tersebut maka semakin banyak pula kebutuhan laporan audit atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP 431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 120 hari setelah tahun buku berakhir.

Lamanya *audit report lag* mempengaruhi nilai laporan keuangan yang telah diaudit. Karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit mengindikasikan sinyal buruk dari perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini berimbas pada kenaikan atau penurunan harga saham perusahaan. Menurut Haryani dan Wiratmaja (2014) perusahaan yang mengalami *audit report lag* yang berkepanjangan akan merugikan beberapa pihak, bagi perusahaan *audit report lag* ini akan menghilangkan citra baik di mata investor perusahaan tersebut, sedangkan bagi investor terlambatnya publikasi laporan keuangan tersebut maka akan mempersulit mereka dalam mengambil keputusan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian seorang auditor diharapkan dalam mengerjakan laporan auditnya selesai dengan tepat waktu agar pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan tersebut tidak merasa dirugikan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, banyak emiten yang terdaftar di BEI tidak mampu tepat waktu dalam publikasi laporan keuangannya sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Perusahaan *Go Public* yang Terlambat Menyampaikan Laporan Keuangan
Periode 2012-2016

Tahun Buku	Jumlah Perusahaan
2012	52
2013	49
2014	52
2015	63
2016	70

Sumber: Data diolah (2018)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa terdapat peningkatan jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan seiring dengan bertambahnya jumlah perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia, sedangkan berbagai regulasi telah diupayakan oleh BEI terkait sanksi bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. Hal ini membuktikan perlunya penelitian mengenai penyebab keterlambatan pelaporan laporan keuangan. *Audit report lag* dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu *financial distress*, opini audit, dan profitabilitas.

Banyak penelitian telah dilakukan terkait *audit report lag*, namun hasil dari beberapa penelitian tersebut masih beragam. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan variabel independen yang diteliti, periode pengamatan, metode penelitian yang digunakan, dan sektor perusahaan yang diteliti. Sehingga ditinjau dari pentingnya informasi yang terkandung dalam laporan keuangan masih memberikan ruang untuk dikaji kembali.

Sesuai dengan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menginvestigasi apakah *financial distress*, opini audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah studi literatur mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit report lag*, memberikan landasan bagi penelitian selanjutnya yang sama di masa yang akan datang dimana bukti empiris tersebut dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian berikutnya, memberikan pemahaman atau gambaran tentang lamanya *audit report lag* pada sektor keuangan khususnya perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di BEI, serta memberikan informasi agar mampu merencanakan pekerjaan lapangan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memperbaiki ketepatan pelaporan keuangan ataupun mempercepat publikasi laporan auditan.

B. LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Dalam proses audit, teori keagenan menjelaskan hubungan antara manajemen (*principal*) dengan auditor independen (*agent*) (Jensen dan Meckling, 1986). Di dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak yang dalam hal ini satu orang atau lebih (manajemen atau *principal*) memerintah orang lain (auditor independen atau *agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi masukan dalam pengambilan keputusan. Bahasan *audit report lag* berkaitan erat dengan teori keagenan di mana perusahaan dapat meminta auditor untuk memeriksa lebih lanjut mengenai kewajiban jangka panjang dan laba rugi perusahaan yang berperan penting dalam laporan keuangan. Pemeriksaan lebih lanjut ini memerlukan waktu lebih dan akan mempengaruhi *audit report lag*.

Signalling Theory

Signalling theory menjelaskan tentang suatu pihak (*agent*) menyampaikan informasi tentang dirinya sendiri kepada pihak lain (Connelly, 2012). Informasi ini merupakan sebuah sinyal. Sinyal yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dimana manajemen mengetahui informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai internal perusahaan dan prospek perusahaan di masa depan daripada pihak investor. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada para *stakeholder*, yang dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan. Umumnya pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal *good news* atau *bad news*. Sinyal yang diberikan akan mempengaruhi pasar saham khususnya harga saham perusahaan. Jika sinyal manajemen mengindikasikan *good news*, maka dapat meningkatkan harga saham. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen mengindikasikan *bad news* dapat mengakibatkan penurunan harga saham perusahaan. Oleh karena itu, sinyal dari perusahaan merupakan hal yang penting bagi investor guna pengambilan keputusan.

Audit Report Lag

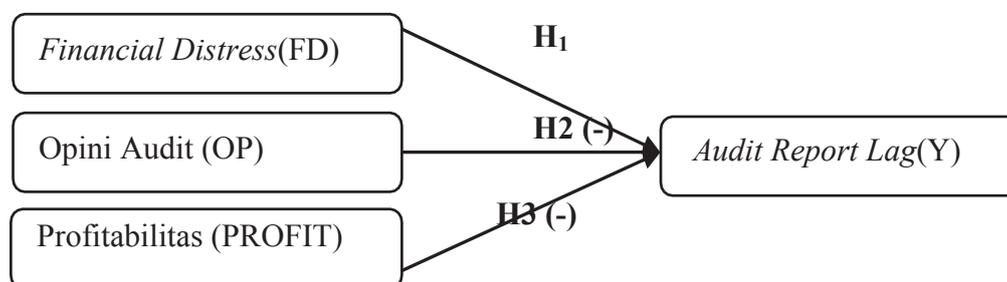
Audit report lag adalah rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit (Juanita, 2012). Tanggal laporan auditan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan karena menunjukkan batas tanggung jawab auditor untuk menjelaskan hal-hal penting yang terjadi (Agoes, 2012). Rata-rata lamanya *audit report lag* berbeda-beda di setiap negara tergantung dengan peraturan yang berlaku. Lamanya *audit report lag* disebabkan oleh auditor yang harus menemukan bukti-bukti audit serta mengkonsultasikannya dengan auditor senior dan menegosiasikannya dengan pihak manajemen.

Financial Distress

Menurut Plat dan Plat (dalam Endri, 2009), kesulitan keuangan (*financial distress*) adalah tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa kondisi kesulitan keuangan atau sering disebut sebagai *financial distress* adalah kondisi di mana perusahaan mengalami keuntungan bersih yang negatif. Dalam artian ini, laporan keuangan perusahaan membukukan rugi dalam nilai buku perusahaan. Kesulitan keuangan (*financial distress*) merupakan salah satu berita buruk dalam laporan keuangan yang merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami keadaan *financial distress* memiliki penyebab yang berbeda dari satu situasi ke situasi yang lain, penyebab suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan disebabkan melalui faktor internal maupun eksternal.

Opini Audit

Opini audit merupakan kesimpulan yang didapat dari proses audit yang dilakukan dalam bentuk pendapat mengenai laporan keuangan. Pendapat auditor biasanya disampaikan dalam bentuk tertulis yang umumnya berupa laporan audit. Pendapat auditor sangatlah penting bagi perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang membutuhkan hasil dari laporan keuangan auditan karena laporan auditor dapat menambah kredibilitas laporan keuangan.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Hubungan *Financial Distress* Terhadap *Audit Report Lag*

Financial distress adalah suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi dimana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan berupa kebangkrutan, kegagalan, ketidakmampuan melunasi hutang, dan *default* (Muniroh dan Suharsono, 2016). Berdasarkan penelitian Praptika dan Rasmini (2016) semakin tinggi nilai rasio *financial distress* maka perusahaan tersebut dianggap sedang mengalami kesulitan keuangan dan akan menambah lamanya waktu penyelesaian audit. Pihak manajemen akan berusaha mengurangi berita buruk ini sehingga akan memakan waktu lebih banyak.

Kondisi *financial distress* yang terjadi pada perusahaan dapat meningkatkan risiko audit pada auditor independen khususnya risiko pengendalian dan risiko deteksi. Dengan meningkatnya risiko itu maka auditor harus melakukan pemeriksaan risiko (*risk assessment*) sebelum menjalankan proses audit, tepatnya pada fase perencanaan audit (*audit planning*). Sehingga hal ini dapat mengakibatkan lamanya proses audit dan berdampak pada bertambahnya *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Financial distress* berpengaruh pada *audit report lag*.

Hubungan Opini Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Pemberian *unqualified opinion* merupakan *good news* yang membuat calon investor tertarik melakukan investasi sehingga perusahaan akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya dan cenderung *audit report lag* yang lebih pendek (Parwati dan Suhardjo, 2009). Pada perusahaan yang menerima opini selain *unqualified opinion* akan terjadi negosiasi antara auditor dengan perusahaan tersebut, selain itu auditor juga perlu berkonsultasi dengan auditor yang lebih senior atau staf lain untuk semakin meyakinkan opininya akibatnya *audit report lag* akan relatif lebih lama (Iskandar dan Trisnawati, 2010).

Menurut Aditya dan Anisykurlillah (2014) arah hubungan yang ditimbulkan antara opini audit terhadap *audit report lag* adalah negatif, karena apabila perusahaan mendapat opini *unqualified* (wajar tanpa pengecualian) maka *audit report lag* akan berkurang daripada perusahaan yang mendapatkan opini selain *unqualified*. Hal ini sejalan dengan penelitian Prabowo dan Marsono (2013). Perusahaan yang hasil laporan auditnya mendapatkan opini *unqualified opinion* tentu saja ingin agar hasil opini tersebut segera diketahui oleh publik. Perusahaan yang mendapatkan opini selain *unqualified opinion* tentunya memerlukan waktu untuk berdiskusi kembali dengan auditor dan hal ini akan memperpanjang *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Hubungan Profitabilitas Terhadap *Audit Report Lag*

Menurut Anastasia (2007) profitabilitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasinya dan sering digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Oleh karena itu sangat diperlukan ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan hasil audit sebagai alat untuk menaksir kinerja perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin singkat *audit report lag*, sebab perusahaan ingin menyampaikan *good news* tersebut kepada pemegang sahamnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Rachmawati (2008) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*. Tinggi rendahnya profitabilitas mempengaruhi lama atau cepatnya penyampaian laporan keuangan seperti penelitian yang

telah dilakukan oleh Rachmawati (2008), yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Lianto dan Kusuma (2012) menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara profitabilitas dengan *audit report lag*. Penelitian Parwati dan Suhardjo (2009) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan dan sektor pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2016. Pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016.
2. Perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang mengunggah Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan ke dalam *website* BEI tahun 2012-2016.
3. Perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang memiliki informasi yang dibutuhkan secara lengkap tahun 2012-2016.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan (*annual report*) yang dipublikasikan melalui *website* Bursa Efek Indonesia (BEI): www.idx.co.id.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *audit report lag*. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP 431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang menyatakan bahwa bagi setiap perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib menyampaikan laporan tahunan kepada BAPEPAM dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Oleh karena itu apabila perusahaan mempublikasikan laporan keuangan lebih dari 120 hari maka perusahaan tersebut mengalami *audit report lag*. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana kategori 1 untuk perusahaan yang mengalami *audit report lag*, sedangkan kategori 0 untuk perusahaan yang tidak mengalami *audit report lag* (Sianipar, 2010).

Variabel Independen

Financial Distress

Financial distress merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Dalam penelitian ini variabel *financial distress* diproksikan dengan model Altman *Z-Score* yang dimodifikasi pada tahun 1995 sebagai berikut:

$$Z = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4$$

Keterangan:

Z = *financial distress index*

$X1$ = *working capital/total asset*

$X2$ = *retained earnings / total asset*

$X3$ = *earning before interest and taxes/total asset*

$X4$ = *book value of equity/book value of total liabilities*

Klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai *Z-score* model Altman modifikasi yaitu:

- a. Jika nilai $Z < 1,1$ maka termasuk perusahaan yang mengalami *financial distress*.
- b. Jika nilai $1,1 < Z < 2,6$ maka termasuk *grey area* (tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami *financial distress*).
- c. Jika nilai $Z > 2,6$ maka termasuk perusahaan yang tidak mengalami *financial distress*.

Opini Audit

Opini audit merupakan pendapat yang diberikan auditor atas kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Variabel ini diukur dengan variabel *dummy*. Jika perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) maka diberi nilai 1, dan sebaliknya jika mendapat opini selain *unqualified opinion* diberi nilai 0 (Che-Ahmad dan Shamharir, 2008).

Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas suatu perusahaan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan (Muhardi, 2011). ROA diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}}$$

Sumber: Muhardi (2011)

Metode Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menunjukkan jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi (Ghozali, 2016).

Uji Hipotesis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik. Menurut Ghozali (2016) metode ini cocok digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikal (nominal atau metrik). Regresi logistik digunakan untuk menguji apakah variabel *financial distress*, opini audit, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1FD + \beta_2OP + \beta_3PROFIT + e$$

Dimana :

Y	=	<i>Audit Report Lag</i>
α	=	Konstanta
FD	=	<i>Financial Distress</i>
		OP
		= Opini Audit
		PROFIT
		= Profitabilitas
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
e	=	error

Menurut Ghozali (2016) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pengujian dengan menggunakan regresi logistik, yaitu:

1. Menilai kelayakan model regresi perhatikan output dari *Hosmer and Lemeshow*. Jika profitabilitas $>0,05$ maka H_0 diterima, sedangkan jika profitabilitas $<0,05$ maka H_0 ditolak.
2. Menilai keseluruhan model (*Overall model fit*). Penurunan *log likelihood* menunjukkan model regresi yang baik.
3. Uji Koefisien Determinasi dengan *Cox and Snell's R square*.
4. Uji Matriks Klasifikasi.
5. Menguji koefisien regresi. Jika *p-value (significant)* $> 5\%$, maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya, jika *p-value* $< 5\%$, maka hipotesis alternatif diterima.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 233 data observasi yang berasal dari perkalian antara periode penelitian (5 tahun; dari tahun 2012 sampai dengan 2016). Hasil statistik deskriptif dari variabel-variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Statistik Diskriptif

Variabel (N = 233)	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Financial Distress</i>	-1,9	81,8	3,226	8,6284
Opini Audit	0	1	0,64	0,480
Profitabilitas	-0,07580	0,14490	0,0228215	0,02488324
<i>Audit Report Lag</i>	0	1	0,16	0,370

Sumber: Data olahan (2018)

Tabel Klasifikasi Nilai Z-score

Klasifikasi nilai Z-score	Kategori	Jumlah Sampel
$Z < 1,1$	Mengalami <i>financial distress</i>	36
$1,1 < Z < 2,6$	<i>Grey Area</i>	150
$Z > 2,6$	Tidak mengalami <i>financial distress</i>	47
Total sampel		233

Sumber: Data olahan (2018)

Tabel di atas menjelaskan klasifikasi perusahaan yang sehat dan bangkrut didasarkan pada nilai Z-score model Altman modifikasi. Dari total sampel yang berjumlah 233, sampel yang termasuk kategori *financial distress* dengan nilai Z-score $< 1,1$ berjumlah 36, sampel yang termasuk kategori *grey area* dengan nilai Z-score $1,1 < Z < 2,6$ berjumlah 150, dan sampel yang termasuk kategori tidak mengalami *financial distress* dengan nilai Z-score $> 2,6$ berjumlah 47.

Hasil Uji Analisis Regresi Logistik

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Tabel Uji Kelayakan Model Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	3,674	8	,885

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23

Berdasarkan penilaian kelayakan model regresi (*Goodness of Fit*) pada tabel diatas nilai signifikansi *Hosmer and Lemeshow test* menunjukkan angka sebesar 0,885. Dengan demikian nilai tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat diterima atau layak dalam menjelaskan variabel penelitian.

Hasil Uji Kesesuaian Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Tabel Uji Kesesuaian Keseluruhan Model

<i>-2 Log Likelihood</i>	<i>Iteration History</i>
Block 0	201,398
Block 1	195,343
	6,055

Sumber: Data olahan (2018)

Berdasarkan tabel di atas nilai *-2 Log Likelihood* awal adalah sebesar 201,398 dan nilai *-2 Log Likelihood* akhir sebesar 195,343. Dari hasil tersebut dilihat bahwa nilai *-2 Log Likelihood* mengalami penurunan sebesar 6,055. Artinya menunjukkan model regresi baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan *fit* dengan data. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi logistik secara keseluruhan layak digunakan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R. Square*)

Tabel Uji Koefisien Determinasi

<i>Step</i>	<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Cox & Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke RSquare</i>
1	195,343 ^a	,050	,085

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS 23

Berdasarkan tabel nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,085 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel independen adalah sebesar 8,5% dan sisanya sebesar 91,5% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

Hasil Matriks Klasifikasi

Tabel Hasil Matriks Klasifikasi

<i>Observed</i>	<i>Tidak Mengalami Audit Report Lag</i>	<i>Mengalami Audit Report Lag</i>	<i>Percentage Correct</i>
<i>Tidak Mengalami Audit Report Lag</i>	193	2	99,0
<i>Mengalami Audit Report Lag</i>	36	2	5,3
<i>Overall Percentage</i>			83,7

Sumber: Data olahan (2018)

Berdasarkan hasil uji matrik klasifikasi menunjukkan bahwa perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan yang tidak mengalami *audit report lag* adalah 195 perusahaan, sedangkan hasil observasinya adalah 193 perusahaan jadi ketepatan klasifikasi 99%. Sedangkan perusahaan yang mengalami *audit report lag* terdapat 38 perusahaan dan hasil observasi hanya 2 perusahaan jadi ketepatan klasifikasi 5,3%. Nilai *overall percentage* adalah 83,7% yang berarti ketepatan model penelitian ini adalah sebesar 83,7 %.

Interpretasi Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengujian Hipotesis

Tabel Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	Sig.
<i>Financial Distress</i>	0,020	0,282
Opini Audit	-0,755	0,041
Profitabilitas	-20,313	0,021

Sumber: Data olahan (2018)

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel dua dari tiga variabel independen memiliki uji signifikansi $< 0,05$ yaitu opini audit sebesar 0,041 dan profitabilitas sebesar 0,021. Penjelasan mengenai variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Variabel *financial distress* (FD) menunjukkan koefisiensi regresi positif sebesar 0,020 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,282 (lebih besar dari $\alpha = 5\%$). Karena tingkat signifikansi (p) lebih besar dari $\alpha = 5\%$ maka hipotesis pertama (H1) dari penelitian ini yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh pada *audit report lag* **tidak terdukung**. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.
2. Variabel opini auditor (OP) menunjukkan koefisiensi regresi negatif sebesar -0,755 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,041 (lebih kecil dari $\alpha = 5\%$). Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini yang menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* **terdukung**. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.
3. Variabel profitabilitas (PROFIT) menunjukkan koefisiensi regresi negatif sebesar -20,313 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,021 (lebih kecil dari $\alpha = 5\%$). Karena tingkat signifikansi (p) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$ maka hipotesis ketiga (H3) dari penelitian ini yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* **terdukung**. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Audit Report Lag*

Berdasarkan hasil pengujian statistik hipotesis membuktikan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit report lag*. Hal ini disebabkan karena tidak semua perusahaan yang mengalami *financial distress* akan mengalami *audit report lag*, sebab auditor yang bekerja secara profesional akan bekerja sesuai jadwal penyelesaian laporan audit yang disepakati sebelumnya. Sehingga auditor dapat meminimalisir resiko audit yang akan mempengaruhi *audit report lag*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Budiasih dan Saputri (2014) yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016) *financial distress* berpengaruh positif pada *audit report lag*.

Pengaruh Opini Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Berdasarkan hasil pengujian opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*. Perusahaan yang hasil laporan auditnya mendapatkan opini *unqualified opinion* tentu saja ingin agar hasil opini tersebut segera diketahui oleh publik sehingga *audit report lag* semakin singkat karena tidak perlu negosiasi dengan klien dan auditor senior. Pemberian *unqualified opinion* merupakan *good news* yang membuat calon investor tertarik melakukan investasi sehingga perusahaan akan lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangannya dan cenderung *audit report lag* yang lebih pendek (Parwati dan Suhardjo, 2009). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Aditya dan Anisykurlillah (2014) serta Prabowo dan Marsono (2013) yang menyatakan bahwa opini auditor ini berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiono dan Jogi (2013) serta Trianto, et al. (2014) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Audit Report Lag*

Berdasarkan hasil pengujian membuktikan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*. Profitabilitas yang tinggi menggambarkan kinerja manajemen yang baik. Hal ini akan mempengaruhi cepat atau lambatnya manajemen melaporkan kinerjanya. Kinerja baik merupakan berita baik bagi reputasi perusahaan di mata publik, maka manajemen akan segera melaporkan berita baik itu. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin singkat *audit report lag*, sebab perusahaan ingin menyampaikan *good news* tersebut kepada pemegang sahamnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Rachmawati (2008) yang menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap *audit report lag*. Tinggi rendahnya profitabilitas mempengaruhi lama atau cepatnya penyampaian laporan keuangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Lianto dan Kusuma (2012) serta Parwati dan Suhardjo (2009) juga

menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2014) serta Tiono dan Jogi (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. *Financial distress* tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini dikarenakan auditor yang bekerja secara profesional akan bekerja sesuai jadwal rencana penyelesaian laporan audit yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Perusahaan yang hasil laporan auditnya mendapatkan opini *unqualified opinion* tentu saja ingin agar hasil opini tersebut segera diketahui oleh publik sehingga *audit report lag* semakin singkat karena tidak perlu negosiasi dengan klien dan auditor senior.
3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin singkat *audit report lag*, sebab perusahaan ingin menyampaikan *good news* tersebut kepada pemegang sahamnya.

Saran

Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar dapat memperluas sampel dari sektor lain seperti manufaktur, pertambangan, dan sektor lainnya atau dengan menggunakan sampel dari semua jenis sektor yang ada sehingga mampu mencerminkan keseluruhan populasi atas *audit report lag*. Serta memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode penelitian dengan menambahkan tahun penelitian, juga memperbanyak sampel untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Alifian Nur dan Indah Anisykurlillah. 2014. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Report Lag. *Accounting Analysis Journal*. 3(3): 334-342.
- Agoes, Sukrisno. 2013. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan oleh Akuntan Publik Edisi Keempat*. Jakarta. Salemba Empat.
- Anastasia, Thio. 2007. Analisis Skala Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, Pos Luar Biasa, dan Umur Perusahaan atas Audit Delay. *Akuntabilitas*. 144- 156
- Azhari, Muhammad. 2014. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Kasus pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 3(10).
- Bapepam-LK. 2012. Peraturan Bapepam X.K.6 (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam

- Nomor Kep 431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012). Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Jakarta. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- Budiasih, I Gusti Ayu Nyoman dan P. Dwi Aprisia Saputri. 2014. Corporate Governance dan Financial Distress pada Kecepatan Publikasi Laporan Keuangan. *KINERJA*. 18(2): 157-167.
- Che-Ahmad, Ayoib dan Abidin Shamharir. 2008. Audit Delay of Listed Companies: A Case of Malaysia. *International Business Research*. 1(4): 32- 39.
- Connelly, Brian L. 2012. Signalling theory: A Review and Assessment. *Journal Citation Reports*. 37(1): 39-67.
- Endri. 2009. *Prediksi Kebangkrutan Bank Menghadapi dan Mengelola Perubahan Lingkungan Bisnis: Analisis Model Altman's Z-Score*. Jakarta. ABFI Perbanas.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Varianada. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag: Studi Empiris Perusahaan-Perusahaan di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 2(1): 63-75.
- Haryani, Jumratul dan I Wiratmaja. 2014. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Komite Audit, Penerapan International Financial Reporting Standards dan Kepemilikan Publik pada Audit Report Lag. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 6(1): 63-74.
- Hilmi, Utari dan Syaiful Ali. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di BEJ). *Simposium Nasional Akuntansi XI*. Pontianak. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)*. Jakarta. Salemba Empat.
- Iskandar, Meylisa Januar dan Estralita Trisnawati. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 12(3): 175-186.
- Juanita, Greta. 2012. Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Kepemilikan, Laba Rugi, Profitabilitas dan Solvabilitas Terhadap Audit Report Lag. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 14(1): 31-40.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Warfield, T. D. 1995. *Akuntansi Intermediate*. Binarupa Aksara. Jakarta. Erlangga.
- Lianto, Novice dan Budi Hartono Kusuma. 2012. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Report Lag. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. 12(2): 97-106.
- Listiana, Lisa dan Tri Pujadi Susilo. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Reporting Lag Perusahaan. *Media Riset Akuntansi*. 2(1): 48-64.
- Muhardi, Werner R. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Surabaya. Salemba Empat.

- Muniroh dan Agus Suharsono. 2016. Klasifikasi Dynamic Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012- 2014 Menggunakan Regresi Logistik Biner dan Classification Analysis dan Regression Tree (CART). *Jurnal Sains dan Seni ITS*. 5(2).
- Parwati, Lina Anggraeni dan Yohanes Suhardjo. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag (ARL). *SOLUSI*. 8(3): 29-42.
- Prabowo, Pebi Putra Tri dan Marsono. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag. *Diponegoro Journal of Accounting*. 2(1): 1- 11.
- Praptika, Putu Yulia Hartanti dan Ni Ketut Rasmini. 2016. Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor Dan Financial Distress Pada Audit Delay pada Perusahaan Consumer Goods. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 15(3): 2052-2081.
- Rachmawati, Sistya. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Report Lag dan Timeliness. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 10(1): 1-10.
- Raharjo, E. 2007. *Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi*. Dalam Fokus Ekonomi. 2(1): 37-46.
- Shukeri, S. N. dan Nelson, S. P. 2011. Timeliness of Annual Audit Report: Some Empirical Evidence from Malaysia. *Entrepreneurship and Management International Conference (EMIC) 2*. Kangar, Perlis Malaysia.
- Sianipar, Charles V. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Mpu Tantular*. 10(1): 1-26.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV Alfabeta.
- Sumartini, Ni Komang Ari dan Ni Luh Sari Widhiyani. 2014. Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran Kap dan Laba Rugi pada Audit Report Lag. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 9(1): 392-409.
- Tiono, Ivena dan Yulius Jogi. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag di Bursa Efek Indonesia. *BUSINESS ACCOUNTING REVIEW*. 2(2): 286-297.
- Trianto, Imam., R. Adri Satriawan dan Yuneita Anisma. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Jom FEKON*. 1(2).
- www.idx.co.id diakses pada tanggal 27 November 2017 pukul 15.30

EARNINGS MANAGEMENT PADA TITIK KRITIS PERUBAHAN TAHAP LIFE CYCLE: STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA

Baharudin Ludfi Syuhada

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

Susi Sarumpaet

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

email: susi.sarumpaet@feb.unila.ac.id

ABSTRACT

Corporations pass every stage of their life cycles through different ways. At each point of these stages a company has the possibility to turn into decline. When this occurs, a company has the incentive to manage earnings in order to maintain its performance reflected in reported earnings. The objective of this study is to examine whether earnings management choices are different in corporate life cycles from growth to mature and mature to stagnant. The differences in earning management behaviour were indicated by negative and positive discretionary accruals. The sample was taken from manufacturing firms listed on the Indonesia Stock Exchange (2006 to 2013) in different life stages. The results show that firms in growth-mature and mature-stagnant did manage earnings through discretionary accruals, as indicated by significant differences as compared to those in other corporate life cycles.

Keywords: *corporate life cycle, discretionary accruals, earnings management, manufacturing companies, Indonesia.*

A. PENDAHULUAN

Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu komoditi yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini Indonesia sedang mengalami masalah naiknya harga Bahan Bakar Minyak. Hal ini dikarenakan permintaan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak yang membubung tinggi sementara penyediaannya mengalami kekurangan yang membuat harga barang tersebut menjadi naik dan timbulnya inflasi. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak memperberat beban hidup masyarakat terutama mereka yang berada di kalangan bawah dan juga para pengusaha, karena kenaikan Bahan Bakar Minyak menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan itu akan mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan sehingga akan menurunkan tingkat penjualan yang pada akhirnya juga akan menurunkan laba perusahaan (The President Post, 2013).

Kenaikan Bahan Bakar Minyak yang menurunkan laba ini berpengaruh juga terhadap siklus hidup perusahaan di Indonesia. Setiap perusahaan memiliki siklus hidup yang berbeda-

beda. Tidak semua perusahaan mengalami siklus hidup yang sempurna, adakalanya perusahaan hanya mencapai pada titik kritis pertumbuhan atau kedewasaan namun kemudian mengalami kemunduran. Bahkan, beberapa perusahaan yang baru mencapai tahap pengenalan juga dapat mengalami kemunduran tanpa mengalami tahap pertumbuhan. Dalam hal ini perlu adanya tindakan manajemen untuk mengambil langkah-langkah perbaikan dan melakukan penataan ulang untuk mengatasi permasalahan khususnya pada titik kritis perubahan siklus hidup perusahaan.

Perusahaan memiliki life cycle (siklus hidup) seperti halnya dengan produk (Schori dan Garee 1998). Terdapat empat tahap siklus hidup perusahaan, yaitu tahap introduction, growth, maturity, dan decline. Ada beberapa penelitian yang menghubungkan laba dengan siklus hidup perusahaan. Contohnya adalah Anthony dan Ramesh (1992) yang meneliti hubungan antara ukuran kinerja akuntansi dan harga saham dengan menggunakan uji hipotesis siklus hidup dengan membagi siklus hidup ke dalam tiga tahap yaitu growth, mature, dan stagnant. Black (1998) membandingkan relevansi nilai laba dan arus kas dalam setiap tahap siklus hidup dengan menggunakan metodologi Anthony dan Ramesh (1992). Hastuti (2006) meneliti tentang perbedaan perilaku manajemen laba berdasarkan pada perbedaan siklus hidup perusahaan. Kemudian, Hastuti (2010) meneliti perbedaan manajemen laba dilihat dari pemilihan kebijakan akuntansinya yang menaikkan laba atau menurunkan laba. Namun, kedua penelitian terakhir hanya melihat perbedaan perilaku manajemen laba dari aktualnya saja terhadap perusahaan yang berada pada tahap growth, mature, dan stagnant dan tidak melihat bagaimana pada saat terjadi perubahan siklus hidup perusahaan. Penulis ingin meneliti apakah ada perbedaan antara manajemen laba yang terjadi pada saat titik kritis perubahan siklus hidup perusahaan dengan yang tidak terjadi.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Perikatan antara dua orang atau lebih memunculkan hubungan keagenan. Pihak yang ditunjuk disebut agen. Agen bertugas mengambil keputusan dan mewakili kepentingan pihak yang menunjuk yang disebut para prinsipal (principals) dengan pihak lain yang secara umum berhubungan dengan pemecahan suatu masalah. Agar agen dapat mengerjakan tugas-tugasnya, prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan sampai batas tertentu kepada agen. Hubungan keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan yang tertua dan umumnya merupakan ciri dari interaksi sosial (Ross,1973). Masalah utama yang muncul dalam hubungan ini adalah agen akan mengutamakan kepentingannya dan memilih perilaku yang menghasilkan kesejahteraan tertinggi baginya (Jensen dan Meckling, 1976).

Manajemen Laba Akrual

Istilah earnings management atau manajemen laba merupakan istilah yang sudah biasa didengar, baik oleh praktisi maupun akademisi dari akuntansi dan manajemen. Terdapat

beberapa istilah umum yang sering digunakan oleh para praktisi dan kalangan bisnis mengenai manajemen laba, antara lain *creative accounting practices*, *income smoothing*, *income manipulation*, *agressive accounting*, *financial number game*, dan masih banyak istilah lainnya yang dapat digunakan secara bergantian yang kadarnya mulai dari tingkatan sopan sampai pada tingkatan kotor dan membahayakan publik.

Manajemen laba akrual ditunjukkan dengan adanya *discretionary accrual*. Penelitian yang menganalisis manajemen laba dengan melihat adanya *discretionary accrual* adalah Hayn (1995) yang menyatakan bahwa manajemen laba dapat dilakukan oleh manajemen pada saat perusahaan tersebut masih bertumbuh, bahkan dilakukan juga pada saat laba perusahaan jatuh mendekati poin nol. DeGeorge et al. (1999) menyatakan bahwa perusahaan yang *growth* melaporkan laba yang meningkat untuk mencapai ramalan laba para analis. Dengan berbagai cara, para manajer mempengaruhi peramalan analis untuk mengelola laba agar tepat dengan peramalan.

Siklus Hidup (*Life Cycle*) Perusahaan

Masing-masing produk terdiri dari sekumpulan merk, yang setiap merknya memiliki brand *life cycle*. Jika suatu perusahaan hanya terfokus pada satu brand *life cycle*, perusahaan akan kehilangan gambaran yang lebih besar mengenai apa yang terjadi dengan *life cycle* produk. Jadi, perusahaan tidak hanya memberikan perhatian terhadap suatu merk produk, tetapi harus memperhatikan teknologi yang baru yang akan merusak pasar produk tertentu

Pada tahap *growth*, perusahaan digambarkan seperti anak remaja yang belum dewasa. Pada tahap ini, perusahaan mulai memenuhi kebutuhan pasar dan pertumbuhannya cepat. Pertumbuhan ini merupakan hasil dari pemenuhan kebutuhan pasar yang lebih baik daripada kompetisi dan semangat usaha dari pendiri perusahaan tersebut. Pada tahap *mature*, perusahaan digambarkan seperti orang dewasa. Perusahaan memasuki tahap dimana para manajernya mulai profesional. Tetapi umur perusahaan tidak panjang lagi dan mengarah pada tahap akhir dalam *life cycle* perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang tetap berada pada tahap ini untuk jangka waktu yang panjang tapi ada juga yang mengarah pada kebangkrutan. Tahap terakhir dari *life cycle* perusahaan adalah *decline*. Pada tahap ini, perusahaan digambarkan sebagai orang yang lanjut usia. Perusahaan mengalami penurunan, penurunan, dan penurunan. Perusahaan akan menghentikan kegiatannya. Perusahaan akan meninggalkan bisnisnya. Seluruh harapan dan mimpi yang berkaitan dengan perusahaan akan hilang.

Pada tahap setelah *mature*, ada perusahaan yang tidak memasuki tahap *decline* tetapi tetap berada pada posisi yang stabil (*stagnant*). Perusahaan tidak begitu mengalami peningkatan penjualan dan penurunan laba yang cukup drastis. Tingkat pertumbuhan penjualan rendah, perusahaan tidak melakukan pengeluaran modal besar-besaran, dan laba yang diperoleh perusahaan tidak lagi banyak ditahan untuk pengembangan perusahaan (Anthony dan Ramesh 1992).

Hubungan antara Manajemen Laba dan Siklus Hidup Perusahaan

Manajemen laba dapat dilakukan oleh manajemen pada saat perusahaan tersebut masih bertumbuh, bahkan dilakukan juga pada saat laba perusahaan jatuh mendekati poin nol (Hayn 1995). Pada saat perusahaan bertumbuh (growth), perusahaan mulai menghasilkan laba. Perusahaan mulai melakukan diversifikasi dalam lini produk yang berhubungan erat. Biasanya perusahaan yang berada pada tahap bertumbuh, struktur pengelolaannya masih lemah.

Shank dan Govindarajan (1993) mengemukakan bahwa perusahaan yang berada pada tahap pengenalan dan pertumbuhan menerapkan sistem pengendalian yang tidak ketat, tetapi bila sudah mencapai pada fase kematangan atau harvest (dalam hal ini dikategorikan ke dalam tahap mature) dan penurunan maka akan menerapkan sistem pengendalian yang ketat. Semakin ketat sistem pengendalian, diharapkan manajemen laba yang dilakukan semakin rendah. Hastuti (2006) menunjukkan bahwa manajemen laba perusahaan yang berada pada tahap stagnant lebih rendah secara signifikan daripada perusahaan yang berada pada tahap mature.

Menurut Peasnell et al. (2005), manajer lebih memilih menaikkan laba untuk menghindari pelaporan rugi dan laba yang menurun. Dengan demikian, dapat diduga perusahaan pada titik kritis growth-mature dan mature-stagnant cenderung melakukan pemilihan kebijakan akuntansi menaikkan laba. Berdasarkan ekspektasi yang diuraikan tersebut, dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1: Perusahaan yang berada pada tahap growth-mature memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang tidak berada pada titik kritis perubahan siklus hidup perusahaan.

H2: Perusahaan yang berada pada tahap mature-stagnant memiliki perbedaan yang signifikan dengan yang tidak berada pada titik kritis perubahan siklus hidup perusahaan.

C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel dan Sumber Data

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan beberapa alasan sebagai berikut: (a) untuk menghindari perbedaan karakteristik antara perusahaan manufaktur dan non-manufaktur. (b) *capital expenditure*, yaitu pengeluaran investasi dalam bentuk *plant, property, and equipment*, digunakan sebagai salah satu variabel klasifikasi untuk menentukan tahap *life cycle* perusahaan. Adapun karakteristik pemilihan sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), (b) periode penelitian adalah tahun 2007-2013, (c) perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara konsisten dari tahun 2006 sampai dengan 2013. Karena data *discretionary accruals* membutuhkan data tahun sebelumnya, maka data tahun 2006 dibutuhkan untuk memperoleh data satu tahun sebelum tahun 2007.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan Manufaktur periode 2006-2013 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa annual report yang go public dan yang dipublikasikan.

Defenisi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini mengklasifikasikan *lifecycle* perusahaan ke dalam tiga tahap, yaitu *growth*, *mature*, dan *stagnant*. Tahap *start-up* tidak diteliti karena tidak dapat memenuhi kriteria perusahaan yang berada pada tahap start-up yaitu perusahaan mulai melakukan penjualan tidak lebih dari satu tahun sebelum *gopublic*. Hal ini disebabkan karena BEI mensyaratkan perusahaan harus sudah mendapatkan laba bersih dan laba operasi selama dua tahun fiskal terakhir agar saham perusahaan dapat dicatatkan di bursa. Penelitian yang telah membuktikan hal tersebut adalah penelitian Atmini (2002).

Pengklasifikasian ke dalam tiga tahap dilakukan berdasarkan penelitian Anthony dan Ramesh (1992). Ada empat variabel klasifikasi: (1) pembayaran dividen per tahun sebagai persentase dari laba (DP), (2) persentase pertumbuhan penjualan (SG), (3) *capitalexpenditure* sebagai persentase total nilai perusahaan (CEV), dan (4) umur perusahaan (AGE). Tabel 1 menyajikan ekspektasi keempat variabel tersebut berdasarkan Anthony dan Ramesh (1992) Masing-masing variabel tersebut dihitung dengan cara berikut:

$$DP_t = (DPS/EPS) \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

$$SG_t = ((SALES_t - SALES_{t-1}) / SALES_{t-1}) \times 100 \dots\dots\dots(2)$$

$$CEV_t = (CE_t / VALUE_t) \times 100 \dots\dots\dots(3)$$

$$AGE = \text{tahun berjalan} - \text{tahun terbentuknya perusahaan} \dots\dots\dots(4)$$

Keterangan:

- DP_t = *dividendpayout*
- DPS = dividen per lembar saham
- EPS = laba per lembar saham
- SG_t = sales *growth* (pertumbuhan penjualan)
- $SALES_t$ = penjualan bersih pada tahun t
- $SALES_{t-1}$ = penjualan bersih pada tahun t-1
- CEV_t = *capitalexpenditurevalue*
- CE_t = *capitalexpenditure* pada tahun t
- $VALUE_t$ = nilai pasar ekuitas (*closingprice* x jumlah saham beredar pada akhir tahun) ditambah nilai buku utang jangka panjang pada akhir tahun t
- AGE = umur perusahaan

Setelah itu, skor peringkat variabel klasifikasi dan skor peringkat gabungan dibagi ke dalam kuintil (*quintile*). Keempat variabel diatas di analisa dengan analisis faktor, dibagi menjadi empat bagian selama delapan tahun. Kuartil terendah merupakan perusahaan dalam tahap *decline*, kuartil tertinggi merupakan tahap *growth* dan kuartil tengah merupakan tahap *mature* begitupula sebaliknya sesuai dengan kriteria siklus hidup perusahaan.

Perhitungan kuartil ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Letak } (Q_i) = \text{data ke } \frac{i(n+1)}{4}$$

Keterangan:

Q_i = kuartil ke- i

n = Banyaknya data

i = 1,2,3

Perusahaan diklasifikasikan ke dalam tahap *growth*, *mature*, dan *stagnant* dengan kriteria sebagai berikut:

1. *Growth*: apabila suatu tahun-perusahaan berada pada kuintil tertinggi gabungan skor peringkat pertumbuhan penjualan dan *capitalexpenditure* dan berada pada kuintil terendah gabungan skor peringkat *dividendpayout* dan umur perusahaan.
2. *Mature*: apabila suatu tahun-perusahaan berada pada kuintil tengah gabungan skor peringkat pertumbuhan penjualan dan *capitalexpenditure*, berada pada kuintil tengah skor peringkat *dividendpayout*, dan berada pada kuintil tengah skor peringkat umur perusahaan.
3. *Stagnant*: apabila suatu tahun-perusahaan berada pada kuintil terendah gabungan skor peringkat pertumbuhan penjualan dan *capitalexpenditure*, berada pada kuintil tertinggi skor peringkat *dividendpayout*, dan berada pada kuintil tertinggi skor peringkat umur perusahaan.

Penggunaan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi (Dechow et al. 1995). *Discretionary accrual* diperoleh dengan terlebih dahulu mengukur *total accrual*. Total accrual (TAC) dihitung dengan rumus berikut:

$$TAC_t = NI_t - CFO_t \dots\dots\dots(8)$$

Keterangan:

TAC_t = total accrual pada tahun t

NI_t = laba bersih pada tahun t

CFO_t = arus kas operasi perusahaan i pada tahun t

Nilai akrual yang diperoleh dari persamaan di atas dideflasi dengan nilai total aset (Chan et al. 2001).

Selanjutnya dilakukan dekomposisi komponen *total accrual* ke dalam komponen *discretionary accrual* dengan *non discretionary accrual*. Dekomposisi ini dilakukan dengan mengacu pada model Jones yang dimodifikasi (Dechow et al. 1995) berikut ini:

Nilai *non discretionary accrual* (NDAC) dihitung dengan formula berikut:

$$NDAC = a_1[I / TA_{t-1}] + a_2[\Delta REV_t - \Delta REC_t / TA_{t-1}] + a_3[PPE_t / TA_{t-1}] \dots\dots(9)$$

Nilai a_1 , a_2 , dan a_3 pada persamaan di atas diperoleh dari persamaan regresi OLS berikut:

$$TAC_t/TA_{t-1} = a_1[I / TA_{t-1}] + a_2[\Delta REV_t / TA_{t-1}] + a_3[PPE_t / TA_{t-1}] + \varepsilon_t \dots\dots(10)$$

Untuk menghitung nilai *discretionary accrual* (DAC) yang merupakan ukuran manajemen laba, diperoleh dari formula berikut:

$$DAC_t = TAC_t / TA_{t-1} - NDAC \dots(11)$$

Keterangan:

- TAC_t = *total accrual* pada tahun t
- $NDAC_t$ = *non discretionary accrual* pada tahun t
- DAC_t = *discretionary accrual* pada tahun t
- TA_{t-1} = total aktiva pada tahun t-1
- ΔREV_t = pendapatan perusahaan pada tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1
- ΔREC_t = piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t-1
- PPE_t = *property, plant, and equipment* pada tahun t
- $a_1, a_2, \text{ dan } a_3$ = koefisien regresi persamaan regresi OLS
- ε_t = *error term* tahun t

Untuk menguji hipotesis dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan semua perusahaan yang mempunyai *discretionary accrual* yang lebih besar daripada nol.
2. Mengelompokkan hasil data menjadi dua kelompok, yaitu *life cycle* perusahaan dikelompokkan ke dalam kelompok *growth-mature*, dan *mature-stagnant*.
3. Menguji normalitas data dengan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (untuk mengetahui alat analisis yang digunakan, parametrik atau non parametrik).
4. Membandingkan nilai rata-rata masing-masing kelompok perusahaan.
5. Menyimpulkan hasil analisis.

Metode Analisis Data

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan, (Indriantoro dan Supomo, 2002). Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data keadaan atau fenomena. Uji

normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan analisis grafis dan uji statistik (Ghozali, 2009). *Independent sample t-test* adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda.

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Dari 33 perusahaan manufaktur yang terpilih, kemudian dilakukan pengelompokan perusahaan berdasarkan pada titik kritis siklus hidup perusahaan dengan cara mengelompokkan pertemuan antara *growth-mature* dan *mature-stagnant* sebagai titik kritis dan kelompok lain sebagai pembanding. Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah sampel titik kritis sebanyak 56 dengan masing-masing jumlah titik kritis pada perubahan *growth-mature* sebanyak 44 dan jumlah titik kritis pada perubahan *mature-stagnant* sebanyak 12 perusahaan. Sedangkan jumlah sampel pembanding sebanyak 47 dengan masing-masing jumlah pembanding pada perubahan *growth-mature* sebanyak 35 dan jumlah pembanding pada perubahan *mature-stagnant* sebanyak 12. Hal ini diidentifikasi dengan melihat perubahan siklus hidup perusahaan dari tahap *growth ke mature* (kelompok *growth-mature*) dan dari tahap *mature ke stagnant* (kelompok *mature-stagnant*).

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif

Titik Kritis	Titik kritis	Pembanding
<i>Growth-Mature</i>	44	36
<i>Mature-Stagnant</i>	12	12
Jumlah	56	48

Sumber: Data Sekunder BEI tahun 2006-2013

Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif untuk perusahaan yang berada pada titik kritis *growth-mature* dan *mature-stagnant*. *Discretionary accrual* yang dimasukkan adalah *discretionary accrual* baik yang positif maupun negatif. *Mean discretionary accrual* untuk kelompok *growth-mature* yaitu sebesar 0,003526 lebih besar dibandingkan kelompok *mature-stagnant* sebesar -0,018854. Sedangkan untuk kelompok pembanding *growth-mature* yaitu sebesar 0,037389 lebih kecil dibandingkan kelompok pembanding *mature-stagnant* sebesar 0,040000.

Tabel 4.2. DAC Pada Ttik Kritis

<i>Mean</i>	<i>Growth-Mature</i>	<i>Mature-Stagnant</i>
DAC Titik Kritis	,003526	-,018854
DAC Pemandang	,037389	,040000

Sumber: Perhitungan SPSS

Hasil uji normalitas pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa signifikansi lebih besar daripada 0,05 yaitu sebesar 0,107 dan 0,261 sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data berdistribusi normal. Demikian pula hasil uji normalitas pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa signifikansi lebih besar daripada 0,05 yaitu sebesar 0,630 dan 0,504 sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi data berdistribusi normal.

Tabel 4.3 Uji Distribusi Normal Growth - Mature

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		G-M	Pemandang
N		88	72
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,003526	,037389
	Std. Deviation	,0687309	,1428348
Most Extreme Differences	Absolute	,129	,119
	Positive	,116	,119
	Negative	-,129	-,093
Kolmogorov-Smirnov Z		1,211	1,008
Asymp. Sig. (2-tailed)		,107	,261
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			

Tabel 4.4 Uji Distribusi Normal Growth – Mature - Stagnant

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		M-S	Pemandang
N		24	24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-,018854	,040000
	Std. Deviation	,1222355	,1893511
MostExtreme Differences	Absolute	,153	,168
	Positive	,153	,168
	Negative	-,111	-,120
Kolmogorov-Smirnov Z		,749	,825
Asymp. Sig. (2-tailed)		,630	,504
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			

Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil Pengujian Tahap Growth-Mature menunjukkan bahwa signifikansi lebih dari 0,05 (0,051) Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berada pada titik kritis *growth-mature* tidak terbukti memiliki *discretionary accrual* yang berbeda secara signifikan sehingga H1 tidak didukung. Adapun hasil ini menunjukkan bahwa signifikansi lebih dari 0,05 (0,207). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang berada pada titik kritis *mature-stagnant* tidak terbukti memiliki *discretionary accrual* yang berbeda secara signifikan sehingga H2 tidak didukung.

Pembahasan

Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hipotesis H1 dan H2 tidak didukung. Hal ini menunjukkan bahwa adanya persamaan yang signifikan antara perusahaan yang berada pada titik kritis *growth-mature* dan *mature-stagnant* dengan yang tidak berada pada titik kritis perubahan siklus hidup perusahaan.

Tabel 4.5. Hasil Independent Sampels t-Test Mature-Stagnant

		Independent Samples Test								
		t-test for Equality of Means								
		Levene's Test for Equality of Variances								
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
DA	Equal variances assumed	1,667	,203	-1,279	46	,207	-,0588542	,0460051	-,1514577	,0337494
C	Equal variances not assumed			-1,279	39,333	,208	-,0588542	,0460051	-,1518831	,0341748

Sumber: Perhitungan SPSS

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2010), menunjukkan bahwa *mean discretionary accrual* perusahaan kecil paling tinggi dilakukan pada perusahaan yang berada pada tahap *mature* dan paling rendah dilakukan pada perusahaan yang berada pada tahap *growth*. Sedangkan *mean discretionary accrual* perusahaan berukuran medium semakin rendah seiring dengan perubahan *life cycle* perusahaan dari tahap *growth*, *mature*, dan *stagnant*. Kemudian, *mean discretionary accrual* perusahaan berukuran kecil paling tinggi dilakukan pada perusahaan yang berada pada tahap *mature* dan paling rendah dilakukan pada perusahaan yang berada pada tahap *growth*. Namun, berdasarkan hasil uji ANOVA, perbedaan *mean discretionary accrual* di antara variabel ukuran dan *life cycle* perusahaan menunjukkan tidak ada perbedaan di ketiga kelompok untuk masing-masing variabel.

Pengaruh tidak didukungnya hipotesis penelitian dikarenakan ada kemungkinan ditemukannya bukti perusahaan yang melakukan perubahan manajemen laba dengan pola yang teratur. Perusahaan memerlukan manajemen laba yang mampu memakmurkan perusahaannya sehingga perusahaan melakukan manajemen laba. Dalam pelaksanaannya, manajemen laba yang dilakukan harus memiliki pola yang teratur dalam artian kelebihan laba tahun ini dapat menutup kekurangan laba tahun berikutnya begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan penelitian Myers dan Skinner dalam Dechow dan Skinner (2000), yang menyatakan bahwa sulit memisahkan earnings management dari suatu kebijakan akuntansi yang sah pada suatu perusahaan.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perusahaan yang berada pada titik kritis *growth-mature* dan *mature-stagnant* memiliki perbedaan yang signifikan dengan perusahaan yang tidak berada pada titik kritis perubahan siklus hidup perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang berada pada titik kritis *growth-mature* dan *mature-stagnant* tidak terbukti memiliki perbedaan yang signifikan dengan perusahaan yang tidak berada pada titik kritis perubahan siklus hidup perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya bukti perbedaan manajemen laba yang terdapat dalam perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bagi investor sebagai pihak yang terkait langsung dengan laporan keuangan, bukti penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam menganalisis adanya manajemen laba yang dikaitkan dengan manajemen laba menaikkan laba atau menurunkan laba berdasarkan pada perubahan *life cycle* perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang diambil sebagai sampel hanya dari kelompok perusahaan manufaktur sehingga belum tentu dapat digeneralisasi untuk perusahaan non manufaktur.

2. Penelitian ini menggunakan model *life cycle* yang digunakan Anthony dan Ramesh (1992) dengan membagi *life cycle* perusahaan ke dalam tiga tahap (*growth*, *mature* dan *stagnant*) sehingga ada kemungkinan terdapat perbedaan hasil jika digunakan dengan model lain yang membagi *life cycle* perusahaan ke dalam empat tahap atau lima tahap.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Berdasarkan keterbatasan yang ada, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

1. Perlu dilakukan pengujian terhadap perusahaan non manufaktur sehingga penelitian ini lebih dapat digeneralisasi.
2. Perlu dilakukan pengujian dengan menggunakan model *life cycle* yang lain.

REFERENSI

- Anthony, Joseph H. dan K. Ramesh. 1992. Association between Accounting Performance Measures and Stock Prices: A Test of the Life Cycle Hypothesis. *Journal of Accounting and Economics* 15, 203-227.
- Astika, Ida B. P. 2012. Manajemen Laba Dan Motif Yang Melandasinya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Universitas Udayana, Denpasar.
- Atmini, Sari. 2002. Asosiasi Siklus Hidup Perusahaan dengan Incremental Value-Relevance Informasi Laba dan Arus Kas. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5 (3), 257-276.
- Beasley, M. S. 1996. An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statement Fraud. *The Accounting Review* ,71 (4), 443-465.
- Black, Ervin L. 1998. Which is More Value Relevant: Earnings or Cash Flows? A Life Cycle Examination. Working Paper, University of Arkansas, Fayetteville, Arkansas.
- Chan, K., L.K. Chan, N. Jegadeesh, dan J. Lakonishok. 2001. Earnings Quality and Stock Returns. NBER Working Paper Series.
- Dechow, Patricia M., Richard G. Sloan, dan Amy P. Sweeney. 1995. Detecting Earnings Management. *The Accounting Review*, 70 (2), 193-225.
- Dechow, Patricia M. dan Douglas J. Skinner. 2000. Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators. *Accounting Horizons*, 14 (2), 235-250.
- DeGeorge, François, Jayendu Patel, dan Richard Zeckhauser. 1999. Earnings Management to Exceed Thresholds. *Journal of Business*, 72 (1), 1-33.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Hamid, Abd. 1999. Studi terhadap Strategi Prospektor dan Defender dan Hubungannya dengan Harga Saham: Analisis dengan Pendekatan Life Cycle Theory. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Harrison, P. D.; A., Harrell. 1993. "Impac of Adverse Selection on Managers Project Evaluation Decisions". *Academy of Management Journal*, Vol. 36, No. 3, 635—643.
- Hastuti, Sri. 2006. The Influence of Companies' Life Cycles on Earnings Management Behavior. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 13 (2), 117-132.
- Hastuti, Sri. 2010. Studi tentang Pemilihan Kebijakan Akuntansi dan Hubungannya dengan Manajemen Laba: Analisis dengan Pendekatan Siklus Hidup Perusahaan dan Ukuran Perusahaan. Paper dipresentasikan pada acara Seminar Nasional Hasil Penelitian Dosen Kopertis Wilayah V, Yogyakarta.
- Hastuti, Sri. 2011. Titik Kritis Manajemen Laba pada Perubahan Tahap Life Cycle Perusahaan: Analisis Manajemen Laba Riil Dan Manajemen Laba Akrua. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 8, No. 2, Desember: 107-122.
- Hayn, Carla. 1995. The Information Content of Losses. *Journal of Accounting and Economics*, 20 (2), 125-153.
- Hughes, J. S. 1982. "Agency and Stochastic Dominance". *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. XVII, No. 3.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4.
- Jones, J. 1991. Earnings Management during Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, 29 (2), 193-228.
- Kotler, Philip. 1997. *Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation, and Control*. New Jersey: International Edition (Ninth Edition), Prentice Hall International, Inc.
- Myers, L.A. dan D. J. Skinner. 2000. Earnings Momentum and Earnings Management. Working Paper, University of Michigan.
- Palupi, Margaretta Jati. 2004. Pengaruh Siklus Hidup Perusahaan terhadap Koefisien Respon Laba: Bukti Empiris pada Bursa Efek Jakarta. Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Peasnell, K.V., P.F. Pope dan S. Young. 2005. Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals? *Journal of Business Finance & Accounting*, 32 (7) & (8), 1311-1346.
- Pratisto, A. 2004. Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 17. Jakarta: Bumi Aksara.

- Pratiwi, Lusy Indah. 2013. Analisis Manajemen Laba pada Saat Perubahan Tahap Siklus Hidup di Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bei. Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.
- Quinn, Robert E. dan Kim Cameron. 1983. Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness: Some Preliminary Evidence. *Management Science*, 29 (1), 33-51.
- Ring, D. R. dan J. E. Swan. 1979. Product Life-Cycle Research: A Literature Review. *Journal of Business Research*, 7 (3), 219-242.
- Ross, A. S. 1973. "The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem". *American Economic Association*, Volume. 63, No.2.
- Santoso, Singgih. 2001. SPSS Versi 10, Mengolah Data Statistik secara Profesional. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Schori, Thomas R. dan Michael L. Garee. 1998. Like Products, Companies have Life Cycle. *Marketing Views*, 32 (13), 4.
- Scott, William R. 2003. *Financial Accounting Theory*. Canada: Prentice-Hall.
- Sloan, Richard G. 1996. Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flow About Future Earnings? *The Accounting Review*, 71 (3), 289-315.
- Shank, J. K. dan V. Govindarajan. 1993. *Strategic Cost Management: The New Tool for Competitive Advantage*. The Free Press.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawan, Dedhy, Januarsi, Yeni, dan Alvia, Lisa. 2011. *Creative Accounting, Mengungkap Manajemen Laba dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Teoh, Siew Hong, Ivo Welch, dan T.J. Wong. 1998. Earnings Management and The Underperformance of Seasoned Equity Offerings. *Journal of Financial Economics*, 50 (1), 63-99.
- The President Post. 2013. Dampak Kenaikan BBM Bagi Dunia Usaha. Diambil dari: <http://thepresidentpostindonesia.com/2013/06/24/dampak-kenaikan-bbm-bagi-dunia-usaha/>, tanggal 6 Oktober 2015

**PENGARUH *BUDGET PLANNING MODEL* TERHADAP KINERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR**

Didik Prayitno

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

email: didikrmp@yahoo.com

Einde Evana

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

email: eindeevana@yahoo.co.id

Usep Syaipudin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

email: usepsyaipudin@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of budget participation, budget communication and budget details on the performance of local government budgeting. The object of this research is employees who work in the Government of East Lampung Regency and taken 3 people consisting of SKPD Leaders, Treasurers, and Planning (Kasubbag / Kasi). A total sample of 162 came from 54 SKPD and the analysis tool used was multiple linear regression. The results showed that budgetary participation, budget communication and budget detail had positive effect on the performance of the budget preparation of the East Lampung Regency Government. The more SKPD leaders carry out detailed budget oversight functions, they will be able to reduce the occurrence of budget irregularities, so that the performance of budget preparation is better. Suggestions proposed in this study are: The Government of East Lampung Regency has to improve capabilities and encourage more active participation by providing education programs and training on a regular budget preparation to the employees. SKPD Leaders involve more employees who are involved in budgeting activities during the implementation of the East Lampung Regency Development Plan Deliberation (Musrenbang) from the subdistrict level to the district level deliberation. East Lampung Regency Government has to use the budgeting system with the E-Budgeting System to avoid budget irregularities. Future studies are suggested including other variables outside the budget planning model variables as moderating variables to measure the performance of budgeting.

Keywords: *budgetary participation, budget communication, budget details and management performance*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintahan daerah yang baik dan *akuntabel*, tidak bisa lepas dari kinerja dan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah diterapkan oleh penyusunan kegiatan. Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana dari masyarakat. Di dalam anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran.

Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan tentang pedoman dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada suatu dokumen di dalamnya berisi tentang standar analisis belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya sebagai instrumen pokok dalam anggaran kinerja. Sedangkan pedoman evaluasi kinerja pemerintah daerah diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Lampung Timur sebagai daerah otonom pada tahun 2016 memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 2,1 triliun dengan rincian pendapat asli daerah sebesar Rp 92,8 milyar, dana perimbangan sebesar Rp 1,3 Triliyun dan pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 562,9 milyar dengan defisit sebesar Rp 49 milyar. Tahun 2017 APBD Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp. 1.5 triliun dengan defisit Rp. 40 milyar. Berdasarkan data tersebut terlihat penurunan jumlah APBD yang cukup signifikan meskipun defisit menurun. Hal ini terjadi diduga karena kinerja penyusunan anggaran yang belum baik.

Kelemahan lain kinerja penyusunan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah ketidaktepatan jadwal penyusunan dan penetapan APBD serta anggaran yang disusun banyak tidak mengakomodir terhadap visi dan misi kepala daerah, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat biayai oleh APBD akhirnya berpengaruh terhadap penyerapan

anggaran sangat lambat. Faktor lain yang diperhatikan dalam model perencanaan anggaran adalah detail anggaran. Menurut Van derStede (2001) dalam Kung, Huang dan Cheng (2013) detail anggaran adalah penilaian terperinci atas item-item anggaran. Anggaran yang detail memiliki manfaat mempermudah top manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran setiap saat. Detail anggaran juga membantu top manajemen melakukan penyesuaian terhadap penyimpangan anggaran Kung *et al.* (2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Kung *et al.* (2013) hanya melihat pengaruh langsung dari *Budget Planning Model* yang hanya berpengaruh sebesar 14,9% terhadap kinerja tanpa melihat pengaruh langsung dari elemen *Budget Planning Model* yang terdiri dari detail anggaran, partisipasi anggaran, komunikasi anggaran dan detail anggaran terhadap kinerja penyusunan anggaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh elemen dari *Budget Planning Model* (model perencanaan anggaran) yang terdiri dari partisipasi anggaran, komunikasi anggaran dan detail anggaran, terhadap kinerja penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kinerja Penyusunan Anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial para pegawai yang bertugas sebagai penyusun anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, komunikasi anggaran, dan detail anggaran terhadap kinerja penyusunan anggaran pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja penyusunan anggaran pemerintah daerah.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Expectancy Theory

Dalam *expectancy theory*, motivasi individu ditentukan oleh *expectancies* dan *valences* *expectancies* adalah keyakinan tentang kemungkinan bahwa perilaku tertentu (seperti misalnya bekerja lebih keras) akan menimbulkan hasil tertentu (seperti misalnya kenaikan gaji) Huang dan Chen (2010). *Valences* berarti nilai yang diberikan individu atas *outcome* (hasil) atau *rewards* yang akan dia terima tingkat menengah perusahaan-perusahaan manufaktur.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, aparat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan serta penyelenggaraan sistem pemerintahan yang optimal karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan salah satu bentuk akuntabilitas/tanggung jawab aparat pemerintah terhadap publik.

Goal Theory

Teori ini mengemukakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh dua *cognitions* yaitu *values* dan *intentions* (atau tujuan). Yang dimaksud dengan *values* adalah apa yang

dihargai seseorang sebagai upaya mendapatkan kemakmuran/*welfare* (Robin 1980) dalam Huang dan Chen (2010). Orang telah menentukan *goal* atas perilakunya dimasa depan dan *goal* tersebut akan mempengaruhi perilaku yang sesungguhnya. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan/tingkat kinerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu komit dengan sasaran tertentu maka, hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kinerjanya.

Partisipasi Anggaran

Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Flamholtz, 1983; Anthony dan Govindarajan, 2007; Chenhall, 2007) dalam Kung *et al.* (2013). Sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan rencana kegiatan yang terdiri dari sejumlah target yang akan dicapai oleh para manajer departemen suatu perusahaan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran digunakan oleh manajer tingkat atas sebagai suatu alat untuk melaksanakan tujuan-tujuan organisasi ke dalam dimensi kuantitatif dan waktu, serta mengkomunikasikannya kepada manajer-manajer tingkat bawah sebagai rencana kerja jangka panjang maupun jangka pendek. Sasaran anggaran dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian aktifitas yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk anggaran.

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan sebuah pendekatan manajerial yang umumnya dapat meningkatkan kinerja manajerial. Partisipasi penyusunan anggaran serta pengaruhnya terhadap kinerja manajerial telah menarik minat beberapa peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian yang dilakukan oleh dalam Kung *et al.* (2013) menghasilkan *Budget Planning Models* (model perencanaan anggaran) dengan memperhatikan tiga aspek yaitu: partisipasi anggaran, komunikasi anggaran dan detail anggaran. Penelitian ini menghasilkan pengaruh model perencanaan anggaran hanya sebesar 14,9% terhadap kinerja organisasi.

Anggaran yang telah ditetapkan berfungsi sebagai perencanaan dan sebagai kriteria kinerja, yaitu anggaran dipakai sebagai suatu sistem pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Untuk mencegah dampak fungsional atau disfungsionalnya, sikap dan perilaku anggota organisasi dalam penyusunan anggaran perlu melibatkan manajemen pada level yang lebih rendah sehingga anggaran partisipatif dapat dinilai sebagai pendekatan manajerial yang dapat meningkatkan kinerja setiap pegawai penyusun anggaran sebagai individual karena dengan adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran diharapkan setiap individu mampu meningkatkan kinerjanya sesuai dengan target yang telah ditentukan Kung *et al.* (2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Yahya *et al.* (2008) menghasilkan pengaruh variabel partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial sebesar 55,6%. Hasil ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Leach-Lopez *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa pengaruh

partisipasi anggaran sebesar 17,5% terhadap kinerja penyusunan anggaran. Berdasarkan *expectacy theory* apakah variabel partisipasi anggaran merupakan bagian motivasi yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja penyusunan anggaran pemerintah daerah, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan anggaran

Komunikasi Anggaran

Proses komunikasi dalam penyusunan anggaran dalam memberikan kekuatan manajer untuk menentukan atau menetapkan isi anggaran mereka, sebaliknya akan menjadi lemah ketika mereka tidak diberikan kesempatan untuk menentukan dan menetapkan isi anggaran. Hal ini dapat menimbulkan konsekuensi *dysfunctional behavior*, sebagai contoh adanya partisipasi semu (*pseudo participation*), yakni tampak berpartisipasi, tetapi dalam kenyataannya tidak. Artinya para manajer ini (sebagai bawahan) ikut berpartisipasi, tetapi tidak diberi wewenang atau pendapat untuk menentukan dan menetapkan isi anggaran Kung *et al.* (2013). Kung *et al.* (2013) menyatakan bahwa komunikasi anggaran berperan dalam pembentukan *Budget Planning Models* sebesar 85,6%. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Chen (2010) menghasilkan pengaruh komunikasi terhadap kinerja penyusunan anggaran sebesar 49,4%. Berdasarkan *expectacy theory* juga apakah variabel komunikasi anggaran merupakan bagian dari motivasi yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja penyusunan anggaran pemerintah daerah. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2 : Komunikasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan anggaran

Detail Anggaran

Pengawasan anggaran yang diperhatikan dalam *Budget Planning Model* adalah detail anggaran. Menurut Van derStede (2001) dalam Kung, Huang dan Cheng (2013) detail anggaran adalah penilaian terperinci atas item-item anggaran. Anggaran yang detail memiliki manfaat mempermudah top manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran setiap saat. Detail anggaran juga membantu top manajemen melakukan penyesuaian terhadap penyimpangan anggaran Kung *et al.* (2013) Penelitian yang dilakukan oleh Kung *et al.* (2013) menghasilkan pengaruh langsung sebesar 77,9% terhadap *budget planning model*. Kung *et al.* (2013) dalam penelitiannya tidak melihat pengaruh langsung detail anggaran terhadap kinerja anggaran. Penelitian ini sebagai pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Kung *et al.* (2013) ingin melihat pengaruh langsung detail anggaran, sehingga hipotesis ketiga penelitian ini sebagai berikut:

H3 : Detail anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan anggaran.

C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Sampel yang digunakan adalah *non probability sampling* dari 54 SKPD dipilih 3 orang setiap SKPD untuk mendapatkan sampel sebanyak 162. Teknik pengambilan *sample* yang digunakan adalah *purposive sample*. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menjabat diambil 3 orang yang terdiri dari Pimpinan SKPD, Bendahara, dan Bagian Perencanaan (Kasubbag/Kasi).

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja penyusunan anggaran. Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, komunikasi anggaran dan detail anggaran. Definisi operasional variable dapat dilihat pada table berikut

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran

No	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Nomor Kuesioner	
1	<i>Budget</i>	Partisipasi	1. Setiap anggota Organisasi/SKPD terlibat dalam penyusunan anggaran berdasarkan porsi masing-masing 2. Terdapat Alasan yang kuat ketika anggaran direvisi 3. Setiap anggota Organisasi/SKPD berinisiatif berdiskusi secara rutin dalam penyusunan anggaran 4. Anggota Organisasi/SKPD memiliki sejumlah pengaruh atas anggaran keuangan yang disusun 5. Anggota Organisasi/SKPD memiliki kontribusi penting dalam penyusunan anggaran 6. Pimpinan secara berkala berdiskusi saat pembuatan anggaran	1	
	<i>Planning</i>	Anggaran			
	<i>Model</i>	(X1)			
	(Kung at				2
	<i>al.</i> 2013)				
					3
2	<i>Budget</i>	Komunikasi	1. Pimpinan memanggil anggota organisasi/SKPD untuk mendiskusikan penyimpangan anggaran secara <i>face to face</i> 2. Pimpinan sering berdiskusi memecahkan masalah anggaran dengan pegawai lainnya 3. Masalah anggaran secara regular didiskusikan dengan pimpinan meskipun tidak ada penyimpangan 4. Setiap anggota organisasi/SKPD berdiskusi dengan pimpinan bagaimana mencapai target anggaran	7	
	<i>Planning</i>	Anggaran			
	<i>Model</i>	(X2)			
	(Kung at				8
	<i>al.</i> 2013)				
					9
			10		

			5. Anggota organisasi/SKPD memiliki jalur komunikasi tertentu dengan pimpinan jika berkaitan dengan isu anggaran	11
3	<i>Budget</i>	Detail	1. Pimpinan hanya memperhatikan capaian anggaran secara keseluruhan dari anggota Organisasi/SKPD 2. Anggota Organisasi/SKPD diminta untuk melaporkan secara detail penyimpangan anggaran dari pagu anggaran 3. Anggota Organisasi/SKPD menyadari bahwa evaluasi pemimpin atas anggaran berguna bagi SKPD anggota Organisasi/SKPD	12
	<i>Planning</i>	Anggaran (X3)		
	<i>Model</i>			
	(Kung <i>at al.</i> 2013)			
				13
				14
4	Kinerja	<i>Planning</i>	1. Anggaran dikelola berorientasi kepada pemangku kepentingan 2. <i>Value for Money</i> merupakan sarana untuk mencapai <i>good corporate governance</i>	15
	Penyusunan			
	Anggaran			
	(Y)			
				24
	(Kung <i>at al.</i> 2013 dan Mardiasmo, 2002)	<i>Coordinating</i>	Adanya peran pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi atau kepentingan masyarakat	21
		<i>Negotiating</i>	Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan public	22
		<i>Representing</i>	Anggaran dikelola secara adil (<i>equity</i>) dimana ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas	19
		<i>Evaluating</i>	1. Anggaran dikelola secara merata (<i>equality</i>), sehingga penggunaan dana public tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu 2. Anggaran dikelola dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu 3. Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan 4. Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros atau tidak produktif 5. Anggaran selalu digunakan secara efisien atau hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan	20
				17
				18
				16
				23

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dibagi ke dalam empat tahap. Pertama, pengujian kualitas data. Tahap kedua, melakukan pengujian asumsi klasik. Tahap ketiga, analisis regresi berganda. Tahap keempat, melakukan pengujian hipotesis. Pengujian kualitas data yang akan dilakukan meliputi uji reliabilitas, uji validitas yang berfungsi untuk mengetahui handal atau tidaknya kuesioner serta valid atau tidaknya kuisisioner yang digunakan.

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh partisipasi dan komunikasi anggaran terhadap kinerja penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Persamaan matematis untuk melihat pengaruh yang dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{KPA} = \alpha + \beta_1\text{PA} + \beta_2\text{KA} + \beta_3\text{DA} + e$$

Keterangan:

KPA = Kinerja Penyusunan Anggaran

α = Konstanta

PA = Partisipasi Anggaran

KA = Komunikasi Anggaran

DA = Detail Anggaran

β_1 - β_3 = Koefisien regresi

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Pegawai pada SKPD di Kabupaten Lampung Timur yang terlibat dalam penyusunan anggaran berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 72% dan wanita sebanyak 28%. Berdasarkan kriteria umur mayoritas berumur 45 tahun sebanyak 19% dan umur 52 tahun sebanyak 15%. Berdasarkan faktor umur dapat disimpulkan bahwa para pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran memiliki pengalaman yang cukup. Faktor demografi lainnya diketahui mayoritas pendidikan adalah S1 sebanyak 65% dan S2 sebanyak 28% dan latar belakang pendidikan sekolah menengah atas hanya sebanyak 7%. Masa kerja terbanyak adalah 18 tahun sebanyak 17% dengan pangkat/golongan IIIA sebanyak 20% dan IVB sebanyak 18%. Berdasarkan kriteria demografi dapat disimpulkan bahwa pegawai SKPD yang menyusun anggaran memiliki kemampuan yang cakap dikarenakan memiliki pengalaman kerja yang cukup dengan latar belakang pendidikan yang memadai.

Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2 Hasil Pengujian Hipotesis

KPA= α + β 1PA + β 2KA + β 3DA + e			
Variabel Independen	Ekspektasi Hubungan	Koefisien	Signifikansi
C		1,644	0.002
PA	+	0,415	0.002
KA	+	0,289	0.008
DA	+	0,171	0.027
Adjusted R-squared		0.536	
Prob(F-statistic)		0.003	
N		162	

Sumber: Hasil Regresi

Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi anggaran secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja penyusunan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor partisipasi anggaran merupakan faktor penting dalam kinerja penyusunan anggaran. Item pengukuran pemimpin secara berkala berdiskusi saat pembuatan anggaran direspon secara baik oleh pegawai penyusun anggaran SKPD. Hal ini membuktikan bahwa pimpinan mempunyai posisi penting dalam proses penyusunan anggaran dan menjadi faktor yang memiliki kontribusi besar terhadap partisipasi anggaran.

Namun demikian masih terdapat item-item pengukuran yang belum optimal diantaranya para penyusun anggaran belum mendapatkan porsi yang sesuai dengan kemampuannya, penyusun anggaran belum mendapatkan alasan yang kuat apabila anggaran direvisi, kurangnya pengaruh dan inisiatif para penyusun anggaran. Hal ini diketahui dari jawaban atas keempat item pertanyaan rata-rata lebih dari 30% yang menyatakan tidak memiliki pendapat (netral) sampai dengan sangat tidak setuju, terutama pada item pertanyaan inisiatif secara rutin dalam penyusunan anggaran yang menyatakan tidak memiliki pendapat (netral) sampai dengan sangat tidak setuju sebesar 37 %. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong partisipasi lebih aktif para penyusun anggaran dalam berkontribusi pada proses pada proses penyusunan anggaran. Yang perlu dilakukan adalah untuk lebih melibatkan atau mengikut sertakan pegawai yang terlibat dalam kegiatan penyusunan anggaran pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Timur dari Musyawarah tingkat kecamatan sampai musyawarah tingkat kabupaten.

Hasil penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Yahya *et al.* (2008) dan Leach-Lopez *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran merupakan variabel dari *budget planning model* dengan pengaruh terbesar terhadap kinerja penyusunan anggaran. Dominasi yang relatif cukup besar ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Kung *et al.* (2013), juga menemukan bahwa dalam model *budget planning model* faktor partisipasi anggaran merupakan faktor dominan dalam mempengaruhi kinerja.

Berdasarkan temuan ini juga diketahui bahwa *budget planning model* dapat diterapkan bukan hanya pada organisasi bisnis tetapi juga dapat diterapkan pada pemerintahan. Hal ini juga menguatkan bahwa penggunaan Teori Kontinjensi dalam penelitian ini dapat mengungkap hal-hal secara kualitatif respon pegawai atas indikator-indikator variabel penelitian. Teori ini membantu menjelaskan faktor deskriptif dengan hasil perhitungan kuantitatif.

Komunikasi Anggaran Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komunikasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja penyusunan anggaran. Pengaruh ini jika dibandingkan dengan jawaban responden secara kualitatif untuk item-item pertanyaan variabel komunikasi cukup besar yaitu 76% yang menjawab setuju sampai sangat setuju. Tetapi hasil jawaban kualitatif tersebut tidak mampu meningkatkan pengaruh komunikasi anggaran terhadap kinerja penyusunan anggaran. Pengaruh ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh variabel partisipasi anggaran. Hasil tabulasi data jawaban para Pegawai SKPD penyusun anggaran secara umum dapat dikatakan bahwa komunikasi yang terjadi antara para penyusun anggaran dalam hal ini Pimpinan SKPD, Bendahara dan Kasubbag/Kasi Perencanaan berjalan baik. Hal ini diketahui dari rata-rata jawaban untuk item variabel komunikasi diatas 70% menyatakan sangat setuju dan setuju. Namun demikian, masih munculnya jawaban Netral sampai dengan sangat Tidak Setuju untuk pertanyaan pimpinan sering sering berdiskusi memecahkan masalah anggaran dengan pegawai lainnya diatas 25 %, hal menggambarkan bahwa masih diperlukannya inisiatif dari pimpinan untuk sering melakukan rapat koordinasi antar internal atau eksternal pegawai SKPD dalam melakukan kegiatan penyusunan anggaran.

Komunikasi yang baik antar penyusun anggaran dan pegawai yang lain perlu ditingkatkan dan dipertahankan agar proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi penyusunan anggaran berjalan dengan baik. Inti dari komunikasi anggaran adalah diskusi yang dilakukan baik secara orang per orang, ataupun secara tim, diskusi yang dilakukan secara reguler untuk memantau pelaksanaan anggaran dan jalur komunikasi yang lancar antar pimpinan dan bawahan menjadi modal yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun APBD-nya. Hasil temuan ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Kung *et al.* (2013) dan Hung dan Chen (2010).

Komunikasi Anggaran Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran

Hasil pengujian menunjukkan bahwa detail anggaran adalah variabel dengan pengaruh terkecil yaitu sebesar 17,1% terhadap kinerja penyusunan anggaran. Jika memperhatikan jawaban para Pegawai SKPD penyusun anggaran terdapat item pertanyaan pimpinan hanya memperhatikan capaian anggaran masih relatif tinggi, jawaban “Setuju” sampai “Sangat Setuju” sebesar 71 %. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat peran sentral pimpinan “seolah-olah” hanya ingin capaian yang sukses atas anggaran SKPD saja tanpa ingin tahu dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini diperkuat dari jawaban item pertanyaan yang menyatakan penyusun anggaran diminta untuk melaporkan secara detail penyimpangan anggaran diatas 20%.

Dari jawaban responden diketahui bahwa tidak semua penyusun anggaran memiliki kemampuan baik secara teknis maupun administrasi dalam melaporkan penyimpangan penyusunan anggaran. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai khususnya dalam menyusun laporan secara detail supaya penyimpangan anggaran tidak terjadi dan sangat lebih baik jika Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerapkan sistem *E-budgetting* dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah. Pengaruh detail anggaran yang reatif kecil pada penelitian ini ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Chen (2010).

Fungsi manajerial dalam kinerja penyusunan anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, secara umum baik yaitu pada fungsi perencanaan (*planning*), koordinasi (*coordinating*), negosiasi (*negotiating*), keterwakilan (*representing*) dan evaluasi (*evaluating*). Namun demikian, masih didapati belum optimalnya pada fungsi manajerial perencanaan (*planning*) saat penyusunan anggaran. Keadaan ini diketahui dari jawaban responden atas item pertanyaan anggaran dikelola berorientasi kepada pemangku kepentingan yang menjawab setuju dan sangat setuju tinggi dan anggaran selalu digunakan secara efisien dan mencapai *good corporate governance* masih terdapat pernyataan netral sampai dengan sangat tidak setuju lebih dari 25%. Hal ini harus menjadi perhatian bagi para pemangku kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, jika para pemangku kebijakan pada saat penyusunan anggaran berorientasi kepada kesejahteraan publik maka, akan lebih mudah pencapaian *good corporate governance* pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Oleh karena itu, sangat diperlukan Pendidikan dan Pelatihan tentang penyusunan anggaran yang baik secara rutin dan berkala kepada seluruh pemangku kebijakan, pimpinan SKPD dan Pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran.

Teori *Expectancy* digunakan dalam penelitian ini untuk membantu menarik kesimpulan atas jawaban deskriptif masing-masing variabel dan mengidentifikasi jawaban pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran jika dikaitkan dengan hasil perhitungan regresi. Dari hasil regresi menjelaskan bahwa *expectancy* atau kebijakan yang diharapkan oleh para penyusun anggaran adalah semakin diberikannya ruang untuk partisipasi dan

komunikasi yang lebih luas serta baik pada saat proses penyusunan anggaran SKPD. Untuk itu keterlibatan penyusun anggaran dalam pelaksanaan Musrenbang atau kegiatan kegiatan lain yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran harus ditingkatkan. Penggunaan *Goal teory* dalam penelitian ini relevan, karena teori ini mampu membantu membantu menjelaskan perilaku para pegawai penyusun anggaran berdasarkan jawaban dari kuesioner. Berdasarkan hasil tabulasi dan regresi dapat disimpulkan tujuan penyusunan anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tergantung pada visi dan misi para pemangku kebijakannya, dapat dilihat dari jawaban responden atas item pertanyaan anggaran dikelola berorientasi kepada pemangku kepentingan yang menjawab setuju dan sangat setuju tinggi, jika visi dan misi para pemangku kebijakan terutama Kepala Daerah baik maka kinerja penyusunan anggaran SKPD di lingkungan Kabupaten Lampung Timur akan baik juga.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran, komunikasi anggaran dan detail anggaran terhadap kinerja penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: **pertama**, partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Semakin baik partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka akan meningkatkan kinerja manajerial dalam melakukan penyusunan anggaran di lingkungan Kabupaten Lampung Timur. **Kedua**, komunikasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pimpinan SKPD dan pemangku kebijakan dapat meningkatkan kinerja penyusunan anggaran dengan meningkatkan komunikasi yang baik dan intens kepada pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran. **Ketiga**, detail anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja penyusunan anggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Semakin pimpinan SKPD melakukan fungsi pengawasan anggaran secara detail, maka akan dapat mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan anggaran, sehingga kinerja penyusunan anggaran semakin baik. Penelitian selanjutnya disarankan memasukan variabel lain diluar variabel- variabel *budget planning model* sebagai variabel moderasi untuk mengukur kinerja penyusunan anggaran.

REFERENSI

- Walgito, W. (2003) *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset, Yogyakarta Elmassri Harris, M. (2011) "Rethinking budgetary slack as budget risk management", *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 12 Issue: 3, pp.278-293,
- Huang, C., Chen, M., (2010) "Playing devious games, budget-emphasis in performance evaluation, and attitudes towards the budgetary process", *Management Decision*, Vol. 48 Issue: 6, pp.940-951
- Hansen, Don R., dan Maryanne, M, (2013) *Akuntansi Manajerial*. Edisi Kedelapan, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Herujito, Yayat, M. (2006) *Dasar Dasar Manajemen*, PT. Grasindo, Jakarta Sutrisno, H. (2001) *Statistik jilid II*, Andi Offset, Yogyakarta
- Sutrisno, H. (2001) *Metodologi Research Jilid II*, Andi Offset, Yogyakarta Hasibuan, P. (2006) *Organisasi Dan Motivasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ghozali, I., Yusfaningrum, K. (2005) "Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial melalui Komitmen Tujuan Anggaran dan Job Relevant Information (JRI) sebagai Variabel Intervening" (Penelitian terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia), *SNA VIII*, Solo.
- Ghozali, I. (2005) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BPUNDIP, Semarang
- Ghozali, I. (2006) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Kedua, BPUNDIP, Semarang
- Ghozali, I. (2008), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Joshi, P., Jawahar, A., Bremser, W. (2003) "Corporate budget planning, control and performance evaluation in Bahrain", *Managerial Auditing Journal*, Vol. 18 Issue: 9, pp.737-750,

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Perhitungan Variabel Partisipasi Anggaran

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya terlibat dalam penyusunan anggaran berdasarkan porsi saya	36 (22%)	85 (52%)	24 (15%)	11 (7%)	6 (4%)
2	Terdapat alasan yang kuat ketika anggaran direvisi	12 (7%)	95 (59%)	24 (15%)	20 (12%)	11 (7%)
3	Saya berinisiatif berdiskusi secara rutin dalam penyusunan anggaran	18 (12%)	83 (51%)	28 (17%)	22 (13%)	11 (7%)
4	Saya memiliki sejumlah pengaruh atas anggaran keuangan yang disusun	17 (11%)	94 (58%)	17 (11%)	23 (13%)	11 (7%)
5	Saya memiliki kontribusi penting dalam penyusunan anggaran	50 (31%)	70 (43%)	23 (14%)	12 (8%)	7 (4%)
6	Pemimpin secara berkala berdiskusi saat pembuat anggaran	45 (28%)	84 (52%)	13 (8%)	14 (9%)	6 (4%)

Lampiran 2 Hasil Perhitungan Variabel Komunikasi Anggaran

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Pimpinan memanggil saya untuk mendiskusikan penyimpang anggaran secara <i>face to face</i>	38 (24%)	93 (57%)	14 (9%)	13 (8%)	4 (2%)
2	Pimpinan sering berdiskusi memecahkan masalah anggaran dengan pegawai lainnya	32 (20%)	87 (54%)	17 (10%)	18 (11%)	8 (5%)
3	Masalah anggaran secara regular didiskusikan dengan pimpinan meskipun tidak ada penyimpangan	37 (22%)	102 (63%)	8 (5%)	14 (9%)	1 (1%)
4	Saya berdiskusi dengan pimpinan bagaimana mencapai target anggaran	26 (16%)	95 (59%)	15 (10%)	22 (13%)	4 (2%)
5	Saya memiliki jalur komunikasi tertentu dengan pimpinan jika berkaitan dengan isu anggaran	22 (13%)	102 (63%)	19 (12%)	15 (10%)	4 (2%)

Lampiran 3 Hasil Perhitungan Variabel Detil Anggaran

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Pimpinan saya hanya memperhatikan capaian anggaran secara keseluruhan	24 (15%)	91 (56%)	10 (6%)	28 (17%)	9 (6%)
2	Saya diminta untuk melaporkan secara detail penyimpang anggaran dari pagu anggaran	47 (29%)	80 (50%)	12 (7%)	18 (11%)	5 (3%)
3	Saya menyadari bahwa evaluasi pemimpin atas anggaran berguna bagi SKPD saya	45 (28%)	100 (62%)	8 (5%)	6 (4%)	2 (1%)

Lampiran 4 Hasil Perhitungan Variabel Kinerja Penyusunan Anggaran

No	Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Anggaran dikelola berorientasi kepada pemangku kepentingan.	31 (19%)	96 (59%)	11 (7%)	16 (10%)	2 (1%)
2	<i>Value for Money</i> merupakan sarana untuk mencapai <i>good corporate governance</i>	21 (13%)	87 (53%)	18 (11%)	27 (17%)	9 (6%)
3	Adanya peran pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi atau kepentingan masyarakat	21 (12%)	101 (62%)	11 (7%)	27 (17%)	2 (1%)
4	Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik	28 (17%)	103 (63%)	11 (7%)	16 (10%)	4 (3%)
5	Anggaran dikelola secara adil (<i>equity</i>) dimana ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas	26 (16%)	106 (65%)	15 (9%)	11 (7%)	4 (3%)
6	Anggaran dikelola secara merata (<i>equality</i>), sehingga penggunaan dana public tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu	17 (10%)	100 (62%)	14 (9%)	22 (13%)	9 (6%)
7	Anggaran dikelola dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu	29 (18%)	91 (56%)	18 (11%)	21 (12%)	3 (2%)
8	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan	33 (21%)	95 (59%)	15 (9%)	18 (10%)	1 (1%)
9	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros atau tidak produktif	22 (13%)	92 (56%)	18 (11%)	21 (13%)	3 (2%)
10	Anggaran selalu digunakan secara efisien atau hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan	17 (11%)	99 (60%)	17 (11%)	18 (11%)	11 (7%)

**Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Restatement* Laporan Keuangan
(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI)
Sari Indah Oktanti Sembiring**

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
email: sari.indah@feb.unila.ac.id

Mega Metalia²⁾

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung
email: mega.metalia@feb.unila.ac.id

ABSTRACT

Using independent variable institutional ownership, managerial ownership, independent commissioner, audit committee, and BIG4, this research wanted to see the influence of corporate governance to financial restatement. By using sample of financial report from 2015 until 2017, this research found that institutional ownership is significant but unaccordance with the analyzed hypothesis. And the other independent variable is not significant with financial restatement. This founding may happened because the sample used in this research was not separated between the restated company because of error correction and because of the changes in accounting method that happened because the changes in accounting standard.

Keywords: *Restatement, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioner, Audit Committee*

A. PENDAHULUAN

Bagi suatu perusahaan yang sudah publikasi dan memasarkan sahamnya di bursa efek, laporan keuangan merupakan pintu mereka dalam menarik investor agar tertarik menanamkan modalnya di perusahaan mereka. Hal ini dikarenakan, laporan keuangan dianggap sebagai suatu bentuk transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak agen (manajemen) terhadap para pemegang saham sebagai cerminan *good corporate governance*. Salah satu bentuk pengungkapan itu dapat dilakukan ketika perusahaan menemukan kesalahan dalam laporan keuangannya dan melakukan *restatement* laporan keuangan, sehingga investor dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan sesungguhnya setelah adanya perubahan.

Penelitian ini ingin membuktikan apakah *restatement* yang terjadi karena koreksi kesalahan dapat dikendalikan dengan *corporate governance* yang baik atau tidak. Karena banyak penelitian terdahulu membuktikan bahwa *restatement* karena koreksi kesalahan dapat dicegah atau ditanggulangi dengan adanya pengelolaan internal yang kuat (Huang dan Zhang,

2011; Baber dan Kang, 2009; dan Hazarika, Karpoff, dan Nahata, 2011), serta adanya auditor independen yang memiliki kredibilitas (Files, Sharp, dan Thompson, 2012 dan Rani, 2011).

Huang dan Zhang (2011) menunjukkan bahwa *restatement* karena adanya salah saji laporan keuangan dapat dicegah dengan adanya *internal control* yang kuat. Baber dan Kang (2009) juga membuktikan bahwa *restatement* dapat dicegah dengan adanya peran aktif pemilik saham dalam pengambilan keputusan. Files dan Sharp (2012) menemukan bahwa *restatement* secara berulang kali dalam suatu perusahaan disebabkan oleh kualitas audit yang buruk. Peraturan mengenai *restatement* sudah ditetapkan dalam PSAK No. 25 Revisi 2009 tanggal 15 Desember 2009. Dalam PSAK No. 25 disebutkan bahwa *restatement* laporan keuangan dapat dilakukan untuk memperbaiki laporan keuangan karena adanya perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan atau adanya koreksi kesalahan. Namun di Indonesia, isu mengenai *restatement* laporan keuangan masih jarang digunakan sebagai bahan penelitian. Terutama penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap ada atau tidaknya *restatement* laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan *restatement* karena koreksi kesalahan masih belum ada.

Berdasarkan hasil penelitian Huang dan Zhang (2011) dan Praditia (2010), maka penelitian ini ingin memodifikasi pengujian terhadap variabel-variabel yang dapat mengendalikan terjadinya *restatement* karena adanya salah saji laporan keuangan. Memodifikasi penelitian Huang dan Zhang (2011), penelitian ini menguji kemampuan variabel yang ada dalam penelitian Huang dan Zhang (2011), yaitu komite audit dan *outside director* (komisaris independen), dengan menambahkan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial, dalam mengendalikan atau mencegah terjadinya *restatement* karena adanya salah saji laporan keuangan. Untuk menguji hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Restatement Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI)”**.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Agency Theory

Agency theory menjelaskan permasalahan yang mungkin timbul ketika kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dilakukan oleh dua pihak berbeda, dalam hal ini pihak *principal* (pemilik perusahaan) dan *agent* (manajemen perusahaan). Dalam praktik *agency theory*, dapat terjadi *asymmetry information* yang timbul dari adanya konflik kepentingan antara pihak *agent* (manajer) dan pihak *principal* (pemilik perusahaan). Maka salah satu cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pengungkapan informasi oleh pihak agen, dalam bentuk laporan keuangan perusahaan, sehingga *agency theory* dijadikan landasan oleh perusahaan dalam menerapkan *corporate governance*.

Pada kenyataannya, terkadang dalam melakukan pengungkapan tersebut, pihak agen melakukan kesalahan pencatatan sehingga perusahaan perlu melakukan *restatement* laporan

keuangan yang dapat mempengaruhi penilaian investor terhadap kredibilitas perusahaan dan agen yang mengelolanya. Oleh karena itu, diperlukan pihak luar yang tidak memiliki kepentingan dengan profitabilitas perusahaan yang dapat memperjuangkan hak investor dan pemegang saham dalam mengawasi manajemen dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu komisi independen dan auditor berkompeten, dimana kedua unsur tersebut termasuk dalam unsur-unsur *corporate governance*.

Corporate Governance

Corporate governance menurut Sutedi (2011) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Sementara Cadbury (2002) dalam Sutedi (2011), *good corporate governance* adalah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Dengan kata lain, *corporate governance* dapat dikatakan sebagai upaya pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan akuntabilitas perusahaan agar menjadi lebih baik dan tercapai kesinambungan antara pemegang saham dan manajemen, serta tercipta *good corporate governance* untuk keberhasilan usaha jangka panjang. Dengan adanya *good corporate governance*, diharapkan agar pemegang saham dan kreditor terlindungi dan dapat memperoleh investasinya kembali.

Jika dalam suatu perusahaan pengawasannya lemah dan manajemen bebas dalam melakukan pengambilan kebijakan perusahaan, besar kemungkinan terjadinya *earnings management* dan kepentingan pemegang saham serta kreditor tidak dapat terlindungi, sejalan dengan *agency theory* yang dikemukakan di atas. Maka ada dua hal yang ditekankan dalam konsep *good corporate governance* ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu, serta kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan *disclosure* (pengungkapan) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *good corporate governance* ini, yaitu :

Fairness, menjamin perlindungan hak para pemegang saham dan menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor;

Transparency, mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan, yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan;

Accountability, adanya peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh Dewan Komisaris; dan

Responsibility. memastikan dipatuhinya peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin dipatuhinya nilai-nilai social.

Dengan adanya empat komponen *good corporate governance* dan didukung dengan unsur-unsur internal *corporate governance* diantaranya pemegang saham (kepemilikan institusional), manajer (kepemilikan manajer), direksi dan dewan komisaris (komisaris independen), dan komite audit, diharapkan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat dihindari, dan perusahaan tidak perlu melakukan *restatement* karena koreksi kesalahan di masa akan datang.

Stakeholder Theory

Stakeholder dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu *stakeholder* pasar modal (kreditur dan pemegang saham), *stakeholder* pasar komoditi (pelanggan, pemasok, dan komunitas), serta *stakeholder* organisasi (karyawan). Dalam pengertian secara umum, teori *stakeholder* menyatakan bahwa tujuan akhir dari teori *shareholder value* telah gagal untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, pemasok, dan tenaga kerja. Maka, dalam tulisannya, *Business of Economics* (1996, OUP), Kay mengusulkan bahwa model alternatif dalam melindungi kepentingan stakeholder setidaknya memiliki dewan direksi yang dipimpin oleh direktur independen dengan sekurangnya memiliki tiga direktur independen.

Carrol (1979) dan Freeman (1984) dalam Pfarrer (2010), menyatakan bahwa perusahaan yang mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* perusahaan dalam pengambilan keputusan, akan mencapai kinerja lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang hanya fokus pada kepentingan *shareholder*. Carrol (1979) dalam Pfarrer (2010), juga menjelaskan bahwa perusahaan memiliki empat tanggungjawab utama, yaitu tanggungjawab ekonomi (meningkatkan kesejahteraan pemegang saham), tanggungjawab legal (mematuhi aturan hukum dan regulasi), tanggungjawab etika (memahami bahwa perusahaan merupakan bagian dari komunitas, sehingga memiliki kewajiban dan dampak pada sekitarnya), dan tanggungjawab *discretionary* (memberikan sumbangsih bagi lingkungan sekitarnya).

Carrol (1979) dan Freeman (1984) dalam Pfarrer (2010), menyatakan bahwa perusahaan yang berhasil menciptakan nilai bagi *stakeholder*-nya, maka akan mampu menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya. *Stakeholder theory* yakin dengan mempertimbangkan kepentingan semua kelompok merupakan cara terbaik untuk memaksimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Para penggerak perusahaan juga diyakini secara sukarela bekerja tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi karena mereka yakin bahwa dengan melakukan hal tersebut mereka akan dapat memperoleh keuntungan pribadi yang lebih pula, yang sering disebut oleh ahli ekonomi sebagai "*psychic benefit*", dan bukan sekedar keuntungan material.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *stratified random sampling* dengan jumlah 240 perusahaan sampel yang melakukan *restatement*. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yakni data laporan keuangan perusahaan yang melakukan *restatement* laporan keuangan dari tahun 2015 sampai dengan 2017.

Variabel dependen yang digunakan yaitu *restatement* laporan keuangan, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajer, komisaris independen, komite audit, dan KAP Big 4. Dan variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, *earning to price*, dan *book to market*.

Alat analisis regresi yang digunakan adalah regresi logistik dengan memodifikasi model yang digunakan oleh Huang dan Zhang (2011), dirumuskan sebagai berikut :

$$Re = \beta_0 + \beta_1KepIns_i + \beta_2KepMan_i + \beta_3KomInd_i + \beta_4KA_i + \beta_5BIG4_i + \beta_6Size_i + \beta_7EP_i + \beta_8 BM_i + \varepsilon$$

Keterangan:

- Re = dummy variabel, dengan nilai 1 jika perusahaan melakukan *restate*, dan 0 jika sebaliknya
- KepIns = Kepemilikan institusional
- KepMan = Kepemilikan manajerial
- KomInd = Komisaris independen
- KA = Komite audit
- BIG4 = KAP big 4
- Size = Ukuran perusahaan
- EP = *Earning to Price*
- BM = *Book to Market*

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Korelasi Pearson

Hasil analisis pengujian korelasi pearson untuk penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.2. Korelasi Pearson

		RE	KepIns	KepMan	KomInd	KA	BIG4	SIZE	EP	BM
RE	R	1	.121	-.085	-.028	-.056	.094	.169**	.028	-.078
	Sig		.061	.187	.666	.392	.149	.009	.667	.229
KepIns	R	.121	1	.031	.091	.040	.077	.015	-.096	.033
	Sig	.061		.631	.161	.533	.235	.819	.138	.609
KepMan	R	-.085	.031	1	-.100	.012	.005	-.048	.098	.006
	Sig	.187	.631		.121	.854	.933	.457	.130	.927
KomInd	R	-.028	.091	-.100	1	-.075	.005	.014	.057	-.076
	Sig	.666	.161	.121		.250	.944	.827	.382	.240

KA	R	-.056	.040	.012	-.075	1	-.088	-.168**	-.005	.001
	Sig	.392	.533	.854	.250		.174	.009	.943	.988
BIG4	R	.094	.077	.005	.005	.088	1	.120	.098	.090
	Sig	.149	.235	.933	.944	.174		.064	.132	.165
SIZE	R	.184**	.001	-.042	.088	-.189**	.129*	1	.062	-.371**
	Sig	.004	.985	.521	.176	.003	.046		.340	.000
EP	R	.028	-.096	.098	.057	-.005	.098	.061	1	.005
	Sig	.667	.138	.130	.382	.943	.132	.350		.939
BM	R	-.078	.033	.006	-.076	.001	.090	-.370**	.005	1
	Sig	.229	.609	.927	.240	.988	.165	.000	.939	

** Korelasi signifikan pada level 0.01 (2-tailed)

*Korelasi signifikan pada level 0.05 (2-tailed)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa ada hubungan positif antara variabel kepemilikan institusional, BIG4, size, dan *earning to price* terhadap *restatement*. Ada pun untuk variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit dan *book to market* memiliki hubungan negatif terhadap *restatement*. Uji korelasi *pearson* pada tabel di atas juga menunjukkan koefisien korelasi antar variabel memiliki besaran kurang dari 0,5. Hal ini menunjukkan tidak ada variabel yang memiliki hubungan sangat kuat dengan variabel lainnya sehingga tidak ada multikolinieritas dan tidak ada variabel yang dikeluarkan dari model.

Model Regresi Logistik Untuk *Restatement* Laporan Keuangan

Berikut ini ditampilkan tabel koefisien regresi logistik dari hasil pengolahan data penelitian :

Tabel 4.3. Koefisien Regresi Logistik

Variabel	β	Wald
Constanta	-.926	.587
Kepemilikan Institusional (X_1)	.980	4.330
Kepemilikan Manajerial (X_2)	-1.244	1.780
Komisaris Independen (X_3)	-1.130	.755
Komite Audit (X_4)	-.114	.261
BIG4 (X_5)	.300	1.061
<i>SIZE</i> (X_6)	.360	3.626
<i>Earning to Price</i> (X_7)	.026	.029
<i>Book to Market</i> (X_8)	-.096	.306

Dari tabel di atas, diketahui bahwa variabel kepemilikan institusional, BIG4, *size*, dan *earning to price* berpengaruh positif terhadap *restatement* laporan keuangan. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dan *book to market* berpengaruh negatif terhadap *restatement* laporan keuangan.

Analisis *Goodness of Fit*

Uji ketepatan model regresi atau *goodness-of-fit test binary logistic* dengan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbedaan yang nyata antara yang diprediksi dengan yang diamati

H1 : Ada perbedaan yang nyata antara yang diprediksi dengan yang diamati.

Berikut disajikan hasil Hosmer dan Lemeshow yang diperoleh :

Tabel 4.4. Uji Hosmer dan Lemeshow

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	Df	Sig.
1	6.315	8	.612

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai chi-square sebesar 6.315 dengan taraf signifikansi 0.612. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 atau lebih besar dari 5%, maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi *binary logistic* terhadap *restatement* laporan keuangan sebagai variabel dependen sesuai dengan data sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Signifikansi Model (*Likelihood Ratio Test*)

Tabel 4.5. Chi-Square dan Likelihood

Likelihood & Chi-Square Test

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	314.750	.061	.082

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai -2 likelihood adalah sebesar 314.750 dan akan dibandingkan dengan nilai *chi-square* pada taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan sebesar 239. Berdasarkan tabel *chi-square* diperoleh nilai sebesar 276,0624. Sehingga nilai -2 log likelihood < *chi-square* ($314,750 > 276,0624$). Karena nilai -2 log likelihood lebih besar dari *chi-square table*, hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan model layak untuk diinterpretasikan. Diketahui juga nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.082. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebesar 8,2% variabel independen yang dapat menjelaskan varians yang mampu mencegah terjadinya *restatement* laporan keuangan. Dan sisanya sebesar 91,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian.

Pengujian Hipotesis

Uji Statistik

Tabel 4.8. Hasil Uji Statistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp (β)	Hasil
KepIns	.980	.471	4.330	1	.037	2.666	H ₁ Ditolak
KepMan	-1.244	.933	1.780	1	.182	.288	H ₂ Ditolak
KomInd	-1.130	1.300	.755	1	.385	.323	H ₃ Ditolak
KA	-.114	.223	.261	1	.609	.892	H ₄ Ditolak
BIG4	.300	.291	1.061	1	.303	1.350	H ₅ Ditolak
SIZE	.360	.189	3.626	1	.057	1.434	
EP	.026	.152	.029	1	.864	1.027	
BM	-.096	.174	.306	1	.580	.908	
Constanta	-.926	1.209	.587	1	.444	.396	

Nilai konstanta sebesar -0,926 menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, BIG4, *size*, *earning to price*, serta *book to market* dianggap konstan, maka rata-rata tingkat *restatement* laporan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 0,926.

Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa hasil regresi pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.980 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan namun berlawanan arah dengan hipotesis yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengujian juga diperoleh bahwa kepemilikan manajerial mempunyai nilai koefisien -1.244 dan signifikan sebesar 0,182. Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan, dan tidak mendukung hipotesis H₂.

Berdasarkan hasil pada tabel juga diperoleh bukti bahwa komisaris independen mempunyai nilai koefisien -1,130 dan signifikan sebesar 0,385. Hal ini berarti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Hasil yang diperoleh pada tabel 4.8 terlihat pengujian hipotesis komite audit menunjukkan nilai koefisien -0,114 dan tingkat signifikan sebesar 0,609. Hal ini berarti bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.8 juga diketahui bahwa hasil hipotesis BIG4 menunjukkan nilai koefisien 0,300 dan tingkat signifikan sebesar 0,303. Hal ini berarti bahwa variabel BIG4 tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan.

Pembahasan Hasil Variabel Penelitian

Kepemilikan Institusional

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa hasil regresi pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.980 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terbalik terhadap *restatement* laporan keuangan. Hal ini tidak mendukung hipotesis H₁ dan penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Zhang (2011), serta penelitian yang dilakukan oleh Praditia (2010). Penelitian ini juga tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan satu mekanisme alternatif dari *good corporate governance*. Peneliti menduga, hal ini terjadi karena sampel penelitian yang kurang banyak, dan rata-rata sampel penelitian memiliki kepemilikan institusional yang relatif kecil.

Kepemilikan Manajer

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.8 diperoleh bahwa kepemilikan manajerial mempunyai nilai koefisien -1.244 dan signifikan sebesar 0,182. Hal ini berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan, dan tidak mendukung hipotesis H₂. Penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Praditia (2010), Nugroho (2012), serta Soraya dan Harto (2014). Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang ada, yang menyatakan bahwa kepemilikan oleh manajemen merupakan salah satu mekanisme alternatif dari *good corporate governance*. Kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah keagenan dengan cara menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Peneliti menduga hal ini terjadi karena dari data yang ada, masih banyak perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan saham manajerial.

Komisaris Independen

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8 diperoleh bukti bahwa komisaris independen mempunyai nilai koefisien -1,130 dan signifikan sebesar 0,385. Hal ini berarti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Zhang (2011). Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang telah di paparkan sebelumnya, bahwa komisaris independen merupakan salah satu mekanisme alternatif dari *good corporate governance*, perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang jumlah anggotanya minimal 30% dari total seluruh dewan komisaris perusahaan. Jumlah komisaris independen dalam dewan direksi yang lebih besar diduga akan memiliki kendali atas keputusan manajerial yang lebih kuat pula. Komisaris independen juga dapat bertindak sebagai pengawas atas kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen. Peneliti menduga, hal ini disebabkan oleh data

penelitian yang kurang banyak dan lama tahun penelitian yang pendek, yaitu hanya tiga tahun laporan keuangan yang digunakan.

Komite Audit

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.8 terlihat hasil pengujian hipotesis komite audit menunjukkan nilai koefisien -0,114 dan tingkat signifikan sebesar 0,609. Hal ini berarti bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Praditia (2010), dan Huang dan Zhang (2011), yang menyatakan bahwa komite audit akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya *restatement* laporan keuangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Rani (2011) yang menyatakan bahwa independensi komite audit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *earnings restatement*. Peneliti menduga, hal ini terjadi karena pengukuran yang digunakan hanya ukuran komite audit saja. Sedangkan pengukuran komite audit yang lainnya tidak digunakan, seperti jumlah rapat komite audit, independensi komite audit dan keahlian anggota komite audit dibidang keuangan.

KAP Big 4

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 4.8 juga diketahui bahwa hasil hipotesis BIG4 menunjukkan nilai koefisien 0,300 dan tingkat signifikan sebesar 0,303. Hal ini berarti bahwa variabel BIG4 tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Becker *et al.* (1998), Qi *et al.* (2004), Praditia (2010), serta Huang dan Zhang (2011). Peneliti menduga hal ini mungkin terjadi karena laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai sampel penelitian mayoritas tidak di audit oleh KAP Big 4, dan perusahaan yang *go public* di Indonesia menilai besarnya KAP tidak berpengaruh terhadap independensi auditor.

Size

Hasil regresi pada variabel *size* menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.360 dengan signifikan sebesar 0.057 di atas signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *size* tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Huang dan Zhang (2011). Hal ini tidak mendukung teori yang menyatakan bahwa semakin besar perusahaan akan cenderung menurunkan kemungkinan perusahaan melakukan *restatement* laporan keuangan, karena perusahaan besar secara politis akan lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga mereka akan cenderung memperhatikan tindakan yang akan mereka ambil.

Earning to Price

Hasil regresi pada variabel *earning to price* yang diperoleh dan ditampilkan pada tabel 4.8, menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.026 dengan signifikan sebesar 0,864. Nilai signifikan 0.864 diatas signifikan 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *earning to price* tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Peneliti menduga hal ini terjadi mungkin karena perusahaan tidak melihat *expected earning* di masa yang akan datang berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan pada saat ini.

Book to Market

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh untuk variabel *book to market* yang tampak pada tabel 4.8, menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.096 dengan signifikan sebesar 0,580. Nilai signifikan 0,580 diatas signifikan 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *book to market* tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Peneliti menduga hal ini terjadi karena mungkin perusahaan tidak melihat bahwa harga pasar saham berpengaruh terhadap kinerja laporan keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional akan dapat mencegah terjadinya kesalahan yang dapat dilakukan oleh manajemen, diantaranya mencegah terjadinya kesalahan kebijakan dan pencatatan mengenai pertanggungjawaban keuangan perusahaan, sehingga perusahaan tidak akan melakukan *restatement* laporan keuangan. Peneliti menduga hal ini terjadi karena sampel penelitian yang digunakan kurang banyak dan rata-rata kepemilikan institusional sampel penelitian relatif kecil.
2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang menemukan rata-rata kepemilikan manajerial dari total saham perusahaan yang besar. Dan hasilnya menunjukkan pada perusahaan yang memberikan proporsi saham kepada manajer, kinerja perusahaan akan semakin baik, masalah keagenan semakin kecil, dan tata kelola perusahaan juga akan semakin baik. Peneliti menduga hal ini terjadi karena masih banyak perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan saham manajerial.
3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya. Temuan ini diduga karena sampel penelitian yang digunakan kurang banyak sehingga tidak mewakili populasi sesungguhnya.

4. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang hasilnya signifikan. Temuan ini diduga karena pengukuran yang digunakan hanya ukuran komite audit saja. Sedangkan mekanisme pengukuran komite audit yang lainnya tidak digunakan, seperti jumlah rapat komite audit, independensi komite audit dan keahlian anggota komite audit dibidang keuangan.
5. KAP BIG4 tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang signifikan. Temuan ini diduga karena sampel penelitian mayoritas tidak di audit oleh KAP Big 4, dan perusahaan yang *go public* di Indonesia menilai besarnya KAP tidak berpengaruh terhadap independensi auditor.
6. Diantara variabel kontrol *SIZE*, *earning to price*, dan *book to market*, hanya variabel *SIZE* saja yang signifikan. Sedangkan *earning to price* dan *book to market* tidak berpengaruh terhadap *restatement* laporan keuangan.

Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti agar penelitian tentang *restatement* laporan keuangan kedepannya dapat lebih baik lagi, yaitu :

1. Penelitian tentang *accounting restatement* di Indonesia masih relatif sedikit, sehingga tersedia peluang yang besar untuk mengembangkan riset dengan tema ini. Pengujian dengan klasifikasi dan variabel lain, sektor industri atau karakteristik perusahaan lainnya, serta jangka waktu penelitian yang lebih lama tentunya akan memperkaya literatur mengenai *restatement* laporan keuangan.
2. Penelitian selanjutnya untuk dapat memilah sampel antara yang melakukan *restatement* karena adanya koreksi kesalahan dank arena adanya perubahan kebijakan, merger, akuisisin dan atau yang lainnya.
3. Perusahaan agar dapat lebih mengikutsertakan pihak ekstern dalam pengelolaan perusahaan, dan lebih melibatkan manajer dalam kepemilikan perusahaan, sehingga perusahaan akan lebih maju.
4. Perusahaan hendaknya lebih berhati-hati dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan akuntansi. Kesalahan yang dapat menyebabkan terjadinya *restatement* laporan keuangan sebaiknya dihindari, karena *restatement* laporan keuangan dapat mempengaruhi kepercayaan pasar terhadap informasi yang disajikan.
5. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang dapat mengukur pengaruh *corporate governance* terhadap *restatement* laporan keuangan, seperti pergantian akuntan publik dan pergantian direksi.

REFERENSI

- Agrawal, Anup dan Chadha, Shahiba. 2005. Corporate Governance and Accounting Scandals. *Journal of Law and Economics* 48: 371-406.
- Alyousef, Husain Y and Almutairi, Ali R. 2010. An Empirical Investigation of Accounting Restatement by Public Companies: Evidence from Kuwait. *International Review of Business Research Paper* Vol.6 No.1: 513-535.
- Ashbaugh, Hollis, Collins, Daniel W., and LaFond, Ryan. 2004. Corporate Governance and the Cost of Equity Capital. <http://ssrn.com/abstract=639681> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.639681>
- Baber, William R., Sok Hyon Kang, Lihong Liang, Zinan Zhu. 2009. Shareholder Rights, Corporate Governance, and Accounting Restatement. Working Paper, The George Washington University, Washington DC.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Keputusan Ketua Badan Pengawas pasar Modal No. Kep-38/PM/1996 tentang Laporan Tahunan.
- Ball R. and P. Brown. 1968. An empirical Evaluation of Accounting Numbers. *Journal of Accounting Research* 6 (Autumn): 159-178.
- Botosan, Christine A. and Plumlee, Marlene A. 2002. A Re-examination of Disclosure Level and The Expected Cost of Equity Capital. *Journal of Accounting Research* Vol.40 No.1. University of Chicago.
- Callen, Jeffrey L., Livnat, Joshua, and Seagal. 2005. Accounting Restatement : Are They Always Bad News for Investor? *Journal of Investing* Forthcoming, University of Toronto, Canada.
- Chiang, Hsiang-tsai. 2005. An Empirical Study of Corporate Governance and Corporate Performance. *Journal of American Academy of Business* Vol.6 No.1. Cambridge.
- Dewi, Dian Nirmala. 2013. Reaksi Pasar Atas Accounting Restatement. Tesis. Universitas Lampung.
- Feldmann, Dorothy A., William J. Read, dan Mohammad J. Abdolmohammadi. 2009. Financial Restatement, Audit Fess, and the Moderating Effects of CFO Turnover. *Auditing: A Journal of Practice and Theory* Vol.28 No.21: 205-223. American Accounting Association.
- Files, Rebecca., Sharp, Y Nathan., dan Thompson, Anne M. 2012. Empirical Evidence On Repeat Restatement Firms and Their Auditors. University of Illinois.
- Freeman, R. Edward. 1994. The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions. *Business Ethics Quarterly* 4 : 409-421.
- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Indonesia.
- Gujarati, Damodar N. 2010. Basic Econometrics Buku 1 Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Indonesia.

- Hazarika, Sonali., Karpoff, Jonathan M., and Nahata, Rajarishi. 2011. Internal Corporate Governance, CEO Turn Over, and Earnings Management. University of New York. University of Washington.
- Hribar, P., N. Jenkins. 2004. The effect of Accounting Restatements on Earnings Revisions and The Estimated Cost of Capital. *Review of Accounting Studies* 9 (2/3): 337 -356.
- Huang, Zhizhong., Zhang, Juan., Shen, Yanzhi., dan Xie, Wenli. 2011. Dose corporate governance effect restatement of financial reporting? Evidence from China. *Restatement of Financial Reporting* : 289-302.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 25 (revisi 2009). Jakarta.
- Jensen, Michael C. and Meckling, William H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol. 3 No.4 : 305-360. Harvard Business School.
- Jiang, Xiaoquan and Lee, Bong-Soo. 2006. Stock Return, Dividend Yield, and Book-to-Market Ratio. *Journal of Banking and Finance* 31: 455-475.
- Nugroho, Deffa Agung. 2012. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, *Debt Covenant*, Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan, dan Risiko Litigasi Terhadap Konservatisme Akuntansi. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Pfarrer, Michael D. 2010. What is the Purpose of the Firm? Shareholder and Stakeholder Theories. *Good Business: Exercising Effective and Ethical Leadership*. New York.
- Praditia, Okta Rezika. 2010. Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Tahun 2005-2008. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Rani, Prawita Mandhega. 2011. Pengaruh Kinerja Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Dengan Menggunakan Earnings Restatement sebagai Proksi dari Manajemen Laba). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Richardson, S. I. Tuna and M. Wu. 2002. *Predicting Earnings Management: The Case Of Earnings Restatement*. Working Paper Series. London.
- Rotenstein, Aliza. 2011. Corporate Governance Changes Following Earnings Restatement: A Research Tool. *The Journal of Applied Business Research* Vol.27, No.1: 123-140.
- Schmidt, Jaime and Mike Wilkins. 2011. Bringing Darkness to Light: The Influence of Auditor Quality and Audit Committee Expertise on the Timelines of Financial Statement Restatement Disclosure.
- Scott, David L. 2003. An A to Z Guide to Investment Terms for Today's Investor. Houghton Mifflin Company. United States.
- Sharpe, William F. 1997. Morningstar's Performance Measures. Working Paper. Stanford University.
- Soraya, Intan dan Puji Harto. 2014. Pengaruh Konservatisme Akuntansi

- Terhadap Manajemen Laba Dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Pemoderasi. Diponegoro Journal of Accounting Vol.3 No.3.: 1-11. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Srinivasan, Suraj, Aida Sijamic Wahid, Gwen Yu. 2011. Admitting Mistakes: An Analysis of Restatement by Foreign Firms Listed in the US. Working Paper, Harvard Business School.
- Sutedi, Andrian. 2012. Good Corporate Governance. Sinar Grafika. Jakarta.

ANALISIS KELAYAKAN INVESTASI PENAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA XYZ PADA PT BANK LAMPUNG

Neny Desriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

email: neny.desriani@feb.unila.ac.id

Pigo Nauli

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

email: pigonauli@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to measure the value of investment is ideal amount and feasible to invest by Government City XYZ to PT Bank Lampung. The methods used in this study is ratio analysis and investment faeasibility analysis (Payback Period, Net Present Value, Internal Rate of Return, Profitability Index). The result of this study indicate that investment the results of this study indicate that the investment made by the XYZ city government was feasible in a certain amount.

Keywords: investasi, analisis rasio, analisis kelayakan investasi

A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi yaitu penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi ini dapat dilakakuan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penyertaan modal itu dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada BUMN dan/atau BUMD.

Pemerintah Kota XYZ telah melakukan investasi pada PT Bank Lampung terhitung sejak tahun 2011 hingga akhir tahun 2018 . Total modal disetor ini menempatkan Kota XYZ sebagai kabupaten/kota terbanyak kelima pemilik saham pada PT Bank Lampung. Secara agregat informasi ini menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi (*Retun on Investment*) pada Bank Lampung menunjukkan tingkat hasil investasi yang sangat signifikan bagi sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Kota XYZ. Data ini memberikan pertimbangan bagi Pemerintah Kota XYZ untuk melakukan upaya penjagaan/pemeliharaan dan upaya intensifikasi/peningkatan jumlah pendapatan atas sumber pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan dividen Bank Lampung. Pilihan investasi tersebut salah

satunya adalah dengan menambah modal atau mempertahankan proporsi kepemilikan saham pemerintah kota XYZ Pada PT Bank Lampung.

Salah satu upaya penjagaan dilakukan dengan menjaga porsi kepemilikan saham pada PT Bank Lampung. Pada kondisi *ceteris paribus*, tidak ada perubahan porsi modal dari pemegang saham lainnya, maka porsi kepemilikan akan aman, namun bila sebaliknya (bila ada penambahan modal) maka porsi modal Pemerintah Kota XYZ akan terdilusi yang berdampak pada perolehan dividen tahunan yang berkurang. Selain itu keputusan investasi tentu mempertimbangkan aspek tingkat pengembalian investasi yang diharapkan.

Studi kelayakan itu sendiri adalah kegiatan untuk mengevaluasi sejauhmana potensi proyek, baik proyek baru atau tambahan, yang akan dikelola dinyatakan layak (atau tidak layak) dijalankan sehingga dapat berhasil atau sukses. Hasil studi kelayakan merupakan dasar pengambilan keputusan apakah investor atau pengambil keputusan akan mengimplementasikan rencana atau tidak. Studi kelayakan investasi ini berkaitan dengan rencana penambahan modal Pemerintah Kota XYZ pada PT Bank Lampung di tahun 2019. Penambahan investasi ini diharapkan akan mampu menjadga porsi kepemilikan Pemerintah Kota XYZ dan menjadi sumber pemasukan atau potensi pendapatan asli daerah dari kenaikan dividen yang akan diterima di akhir tahun 2019. Dikatakan layak jika proyek yang dijalankan memenuhi semua kriteria kelayakan investasi.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan kajian analisis kelayakan finansial, aspek teknis serta aspek hukum investasi yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi atas rencana investasi. Penilaian investasi dilakukan dengan tujuan agar investasi pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian Studi Kelayakan

Studi kelayakan proyek Menurut Husnan (2000) adalah penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan baik. Kelayakan yang dimaksud adalah menghasilkan keuntungan yang layak bila telah dioperasikan dikemudian hari. Bagi pihak swasta keberhasilan adalah manfaat ekonomis dari investasi. Sementara bagi pemerintah keberhasilan dapat berarti bermanfaat bagi masyarakat luas yang dapat mewujudkan penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan sumber daya yang melimpah, peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu (Permendagri nomor 52 tahun 2012 pasal 2 ayat 2).

Pemerintah daerah perlu menggunakan studi kelayakan bisnis terutama untuk melihat atau menilai dampak dari adanya usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Sofyan, 2002), proses pengambilan keputusan untuk menilai layak atau tidak layaknya investasi atau *project* (Suliyanto, 2010).

Pengertian Investasi

Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang (Mulyadi, 2001:284). Investasi juga dapat didefinisikan sebagai penanaman modal atau pemilikan sumber-sumber dalam jangka panjang yang akan bermanfaat pada beberapa periode akuntansi yang akan datang (Supriyono, 1987:424). Investasi dapat pula didefinisikan sebagai penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim, 2003:2).

Analisis Kinerja Keuangan Perbankan

Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis untuk mengetahui hubungan antara pos-pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun bersama-sama. Umumnya rasio keuangan digunakan untuk mengukur nilai kesehatan bank. Namun rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis lanjutan. Kinerja Keuangan dapat dilihat dari berbagai macam rasio keuangan diantaranya adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return On Equity*), rasio likuiditas terdiri dari Rasio Lancar (*Current Ratio*), Rasio Cepat (*Quick Ratio*), dan FDR (*Financing Deposit Ratio*), rasio biaya terdiri dari BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan NIM (*Net Interest Margin*), dan rasio modal dengan CAR (*Capital Adequency Ratio*).

Metode Penilaian Kelayakan Investasi

Ada beberapa metode untuk menilai perlu tidaknya suatu investasi atau memilih berbagai macam alternatif investasi, Berikut ini dibahas beberapa metode untuk menilai suatu usulan investasi:

1. *Payback Period* (PP)

Payback Period (Periode Pengembalian) diartikan sebagai jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi awal (*initial investment*) melalui penerimaan-penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Atau dengan kata lain metode ini merupakan salah satu metode investasi yang menilai berapa lama nilai uang yang diinvestasikan akan kembali *payback period* ini menunjukkan perbandingan antara investasi awal (*initial investment*) dengan aliran kas (*cash flow*) tahunan. Jika pajak penghasilan belum diperhitungkan dalam penentuan *payback period*, dalam investasi perluasan usaha, *payback period* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Payback Period} \text{ (dalam tahun)} = \frac{\textit{Investasi}}{\textit{Laba tunai rata-rata per tahun}}$$

Sedangkan jika dampak pajak penghasilan diperhitungkan, maka penentuan payback period dilakukan dengan rumus berikut ini:

$$\text{Payback Period (dalam tahun)} = \frac{\text{Investasi}}{\text{Kas masuk bersih}}$$

Keunggulan Metode Payback Period:

- a. Untuk investasi yang besar risikonya dan sulit untuk diperkirakan, maka tes dengan metode ini dapat mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi.
- b. Metode ini dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya paling cepat.
- c. Metode ini merupakan alat yang sederhana untuk memilih usul-usul investasi sebelum meningkat ke penilaian lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan investasi untuk menghasilkan laba.

Kelemahan Metode Payback Period

- a. Metode ini tidak mempertimbangkan seluruh arus kas dan tidak menghitung nilai sekarang (*present value*) terhadap arus kasnya.
Dengan tidak mempertimbangkan seluruh arus kas, berarti metode ini mengabaikan sejumlah besar arus kas negatif yang mungkin saja terjadi setelah proses pengembalian (tidak memperlihatkan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok kembali).
- b. Metode ini tidak mampu menjawab apakah sebuah rencana investasi layak untuk dilaksanakan atau tidak. Secara implisit, rekomendasi dari metode ini hanyalah memilih rencana investasi yang jangka waktu pengembaliannya lebih pendek.
- c. Tidak mengukur profitabilitas.

2. *Internal Rate of Return (IRR)*

Internal Rate of Return (Tingkat Pengembalian Internal) adalah tingkat bunga yang dapat menyamakan nilai sekarang arus kas masuk dengan *present value* arus kas untuk pengeluaran investasi. Rencana investasi dianggap layak jika $IRR \geq \text{Biaya modal}$ dan ditolak jika $IRR < \text{Biaya modal}$.

IRR adalah tingkat diskonto yang membuat nilai sekarang bersih arus kas masuk sama dengan nilai sekarang bersih arus kas keluar sama dengan nol. Metode ini mengasumsikan bahwa arus kas masuk diinvestasikan kembali pada tingkat pengembalian internal yang besarnya sama.

Rumus *Internal Rate of Return* dapat dituliskan sebagai berikut (Riyanto, 1995:132):

$$\sum_{t=0}^n \frac{A_t}{(1+r)^t} = 0$$

Di mana:

r = Tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proceeds yang diharapkan akan diterima (PV dari proceeds) sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal (PV dari capital outlays).

A_t = Cash flow untuk periode t.

n = Periode yang terakhir dari cash flow yang diharapkan.

Apabila “*initial cash flow*” terjadi pada waktu 0, maka persamaannya dapat dinyatakan sebagai berikut (Riyanto, 1995:132):

$$A_0 = \frac{A_1}{(1+r)} + \frac{A_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{A_n}{(1+r)^n}$$

Keunggulan Metode Internal Rate of Return

- a. Metode ini memperhitungkan nilai waktu uang.

Kelemahan Metode Internal Rate of Return

- a. Sulit dan memakan waktu dalam proses penghitungannya, khususnya pada situasi di mana arus kas tidak sama besar.
- b. Tidak mempertimbangkan besarnya dana investasi yang berbeda-beda untuk proyek-proyek yang sedang diperbandingkan, serta profitabilitas nominal dari masing-masing proyek.
- c. Pada situasi di mana terdapat beberapa aliran arus kas yang negatif, maka proyek tersebut bisa jadi akan menghasilkan lebih dari satu angka IRR.

3. *Net Present Value* (NPV)

Net Present Value (Nilai Sekarang Bersih) membandingkan nilai sekarang arus kas di masa depan yang diharapkan berasal dari proyek investasi dengan pengeluaran kas awal untuk investasi tersebut. Arus kas bersih adalah selisih antara perkiraan arus kas masuk yang diperoleh karena adanya investasi dengan perkiraan arus kas keluar untuk investasi tersebut. NPV dapat dicari dengan rumus:

$$NPV = [\sum CF_t / (1+i)^t] - I$$

Di mana:

CF = Arus kas masuk yang diterima dalam periode t

i = Tingkat pengembalian yang diperlukan.

t = Umur proyek investasi.

I = Nilai sekarang dari biaya proyek

NPV menunjukkan besarnya nilai produktif dari suatu investasi, yaitu apakah nilai tersebut lebih besar, sama dengan atau lebih kecil dari biaya investasinya. NPV yang positif menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan tingkat penghasilan yang melebihi tingkat yang diminta sehingga investasi tersebut harus diterima. Sebaliknya NPV negatif menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari tingkat yang diminta sehingga investasi tersebut harus ditolak.

Keunggulan Metode Net Present Value

- a. Metode ini memperhitungkan nilai waktu uang.
- b. Dalam metode net present value semua arus kas selama umur proyek investasi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi.

Kelemahan Net Present Value

- a. Membutuhkan perhitungan yang cermat dalam menentukan tarif kembalian investasi.
- b. Dalam membandingkan dua proyek investasi yang tidak sama jumlah investasi yang ditanamkan di dalamnya, nilai tunai arus kas bersih dalam rupiah tidak dapat dipakai sebagai pedoman.

4. *Profitability Index (PI)*

Profitability Index menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih di masa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. PI dapat dicari dengan rumus:

$$PI = \frac{\text{Nilai sekarang aliran kas masuk}}{\text{Nilai investasi}}$$

Dengan kriteria penerimaan dan penolakan sebagai berikut:

Jika $PI > 1$, maka proyek diterima

Jika $PI = 1$, maka tidak menjadi masalah apakah proyek diterima/ditolak

Jika $PI < 1$, maka proyek ditolak

C. METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, metode yang akan digunakan untuk menilai kelayakan investasi adalah dengan cara melakukan kajian secara keuangan. Analisis kelayakan investasi dilakukan dengan dua tahapan penting, yaitu pertama menganalisis kinerja keuangan PT Bank Lampung pada periode yang relevan. Kemudian melakukan analisis kriteria-kriteria kelayakan investasi. Kriteria kelayakan investasi yang digunakan terdiri atas Periode Pembayaran Kembali (*Payback Period*), Kriteria Nilai Sekarang Bersih (*Net Present Value*), Kriteria Tingkat Imbal Hasil Internal (*Internal Rate of Return*), dan Kriteria Indeks Profitabilitas (*Profitability Index*).

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisa Aspek Kinerja Keuangan

Berikut kinerja keuangan PT Bank Lampung berdasarkan rasio-rasio keuangan tahun 2014-2018.

Tabel 1 Rasio Keuangan Bank Lampung 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%	%
	Audit	Audit	Audit	Audit	Audit
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/CAR	18,87	23,46	20,39	20,57	19,69
Kredit Bermasalah/ NPL	1,06	1,12	1,25	0,99	1,01
Rasio Laba Rugi terhadap Jumlah Aset (ROA)	3,89	3,25	2,85	2,44	2,49
Rasio Laba Rugi terhadap Ekuitas (ROE)	34,72	30,45	29,39	21,75	16,27
Margin Bunga Bersih (NIM)	7,61	7,21	6,07	5,26	6,05
Beban Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO)	69,33	68,73	74,08	74,75	77,18
Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	112,96	87,66	101,1	88,22	97,47
Rasio Aset Produktif terhadap Jumlah Aset	96,54	98,19	97,44	96,5	97,70
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	80,66	64,44	69,16	67,55	71,53
Rasio Liabilitas terhadap ekuitas	813,87	779,7	638,1	638,79	794,01
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	89,06	88,63	86,45	86,46	88,81

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kinerja Keuangan PT. Bank Lampung menunjukkan kinerja yang positif.

Analisis Kriteria Kelayakan Investasi

1. Periode Pembayaran Kembali (Payback Period)

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, kepemilikan saham Pemerintah Kota XYZ setelah penyertaan modal menjadi 6.50% sedangkan jika tanpa penyertaan modal adalah sebesar 6,23%. Data perhitungan bersumber dari dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank Lampung (Audited).

Penghitungan nilai ekonomis dari investasi tersebut dapat diketahui dengan memprediksi arus kas dari investasi untuk beberapa tahun yang akan datang. Penjelasan mengenai penghitungan pengembalian investasi digambarkan dalam perhitungan dan tabel berikut ini.

Berikut ini disajikan prediksi perolehan deviden Pemerintah Kota XYZ sampai dengan tahun 2027 dengan menggunakan prediksi persentase kepemilikan yang konstan:

Tabel 2. Prediksi perolehan deviden Pemerintah Kota XYZ sampai dengan tahun 2025 dengan menggunakan prediksi yang konstan.

Tahun	Potensi Deviden Akumulatif
A	J
2018	Rp0,00
2019	Rp227.579.256,62
2020	Rp477.916.438,90
2021	Rp753.287.339,41
2022	Rp1.056.195.329,97
2023	Rp1.389.394.119,59
2024	Rp1.755.912.788,17
2025	Rp2.159.083.323,60
2026	Rp2.602.570.912,58
2027	Rp3.090.407.260,46

Berdasarkan perhitungan diatas, maka dapat dilihat perkiraan *Payback period* atas penambahan investasi yang dilakukan. Jika dilakukan penambahan investasi 2 Milyar sampai 2,1 Milyar maka *Payback period* pada tahun ke 7, karena nilai pengembalian investasi di tahun ke 7 telah mencapai Rp. 2.159.083.323,60, artinya arus kas sudah positif. Dengan demikian penanaman investasi sebesar 2 Milyar dan 2,1 Milyar sudah kembali dalam jangka waktu 6 tahun lebih.

Kelebihannya dihitung dengan cara berikut:

a. Jika investasi 2 Milyar maka:

$$\frac{(1.755.912.788,17 - 2.000.000.000)}{403.170.535,44} \times 365 \text{ hari} = \frac{244.087.212}{403.170.535} \times 365 \text{ hari} = 221 \text{ hari}$$

Jadi, *Payback Period* (PP) adalah 6 tahun 221 hari atau sekitar 6 tahun 7 bulan 11 hari, yaitu pada tahun 2025.

Jika dihitung dengan cara yang sama maka *Payback Period* untuk penambahan modal sebesar 2 sampai 2,5 Milyar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Payback period untuk penambahan modal 2-2,5 milyar rupiah

Jumlah Investasi	Payback Period
Rp2.000.000.000	6 Tahun, 7 Bulan, 11 Hari
Rp2.100.000.000	6 Tahun, 10 Bulan, 12 Hari
Rp2.200.000.000	7 Tahun, 1 Bulan, 4 Hari
Rp2.300.000.000	7 Tahun, 3 Bulan, 26 Hari
Rp2.400.000.000	7 Tahun, 6 Bulan, 18 Hari
Rp2.500.000.000	7 Tahun, 9 Bulan, 11 Hari

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jika Pemerintah Kota XYZ menambah investasi 2 Milyar atau 2,1 Milyar akan kembali dalam jangka waktu 6 tahun lebih, akan tetapi jika menambah investasi 2,2 Milyar sampai dengan 2,5 Milyar maka baru akan kembali dalam jangka waktu 7 tahun.

2. Kriteria Nilai Sekarang Bersih (*Net Present Value*)

Perhitungan Nilai Sekarang Bersih (*Net Present Value*) dilakukan dengan melihat *present value* (PV) *cashflow*, diperoleh dengan cara mendiskontokan (mengalikan *cashflow*-nya dengan *discount factor*), *Discount Factor* kami asumsikan sama dengan tingkat bunga *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* Maret 2019 yaitu 6%. Tabel 4. Perhitungan Net Present Value (NPV), PV Cash Inflow, dan Profitabiliti Index (PI)

Tahun	Cashflow A	DF (6%) B	PV Cashflow 2M	PV Cashflow 2,1M	PV Cashflow 2,2M	PV Cashflow 2,3M	PV Cashflow 2,4M	PV Cashflow 2,5M
			C=AxB	C=AxB	C=AxB	C=AxB	C=AxB	C=AxB
2019		1,00000	-Rp2.000.000.000	-Rp2.100.000.000	-Rp2.200.000.000	-Rp2.300.000.000	-Rp2.400.000.000	-Rp2.500.000.000
2020	Rp227.579.256,62	0,94340	Rp214.698.271	Rp214.698.271	Rp214.698.271	Rp214.698.271	Rp214.698.271	Rp214.698.271
2021	Rp250.337.182,28	0,89000	Rp222.800.092	Rp222.800.092	Rp222.800.092	Rp222.800.092	Rp222.800.092	Rp222.800.092
2022	Rp275.370.900,51	0,83960	Rp231.201.408	Rp231.201.408	Rp231.201.408	Rp231.201.408	Rp231.201.408	Rp231.201.408
2023	Rp302.907.990,56	0,79210	Rp239.933.419	Rp239.933.419	Rp239.933.419	Rp239.933.419	Rp239.933.419	Rp239.933.419
2024	Rp333.198.789,62	0,74730	Rp248.999.455	Rp248.999.455	Rp248.999.455	Rp248.999.455	Rp248.999.455	Rp248.999.455
2025	Rp366.518.668,58	0,70500	Rp258.395.661	Rp258.395.661	Rp258.395.661	Rp258.395.661	Rp258.395.661	Rp258.395.661
2026	Rp403.170.535,44	0,66510	Rp268.148.723	Rp268.148.723	Rp268.148.723	Rp268.148.723	Rp268.148.723	Rp268.148.723
2027	Rp443.487.588,98	0,62740	Rp278.244.113	Rp278.244.113	Rp278.244.113	Rp278.244.113	Rp278.244.113	Rp278.244.113
2028	Rp487.836.347,88	0,59190	Rp288.749.585	Rp288.749.585	Rp288.749.585	Rp288.749.585	Rp288.749.585	Rp288.749.585
	NPV		Rp151.170.728	Rp51.170.728	-Rp48.829.272	-Rp148.829.272	-Rp248.829.272	-Rp248.829.272
	Total PV Cash inflow		Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728	Rp2.251.170.728
	Profitability Index (PI)		1,13	1,07	1,02	0,98	0,94	0,90

Dari tabel di atas dapat disimpulkan jika ingin mendapatkan NPV yang positif di tahun 2028 maka Nilai Investasi yang **LAYAK** adalah antara, 2 Milyar sampai 2,2 Milyar karena nilai NPV nya positif. Karena jika lebih dari itu di Tahun tersebut NPV nya negatif. Hal ini berarti jika menggunakan kriteria NPV untuk menilai kelayakan investasi, maka nilai investasi yang layak untuk dilakukan adalah pada kisaran Rp 2 Milyar hingga 2,2 Milyar. **Kriteria Tingkat Imbal Hasil Internal (*Internal Rate of Return*)**

Perhitungan nilai IRR dilakukan dengan membandingkan antara tingkat keuntungan yang mungkin dapat dihasilkan dengan biaya modal dari investasi tersebut. Dalam hal ini biaya modal diasumsikan mengikuti tingkat bunga *BI 7-day (Reverse) Repo Rate* Maret 2019 yaitu 6%..

Misalnya dicoba pada tingkat bunga 8% dan 9%, maka perhitungan IRR untuk rencana investasi Kota XYZ pada Bank Lampung sebesar 2 Milyar disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Perhitungan IRR

Tahun	Cashflow	DF (9%) Trial 1		PV Cashflow	Tahun	Cashflow	DF (8%) Trial 2		PV Cashflow
		A	B				A	B	
2019	-Rp2.000.000.000		1,0000	-Rp 2.000.000.000	2019	-Rp2.000.000.000		1,0000	-Rp2.000.000.000
2020	Rp227.579.256,62		0,9174	Rp 208.781.210	2020	Rp227.579.256,62		0,9259	Rp210.715.634
2021	Rp250.337.182,28		0,8417	Rp 210.708.806	2021	Rp250.337.182,28		0,8573	Rp214.614.066
2022	Rp275.370.900,51		0,7722	Rp 212.641.409	2022	Rp275.370.900,51		0,7938	Rp218.589.421
2023	Rp302.907.990,56		0,7084	Rp 214.580.021	2023	Rp302.907.990,56		0,7350	Rp222.637.373
2024	Rp333.198.789,62		0,6499	Rp 216.545.893	2024	Rp333.198.789,62		0,6806	Rp226.775.096
2025	Rp366.518.668,58		0,5963	Rp 218.555.082	2025	Rp366.518.668,58		0,6302	Rp230.980.065
2026	Rp403.170.535,44		0,547	Rp 220.534.283	2026	Rp403.170.535,44		0,5835	Rp235.250.007
2027	Rp443.487.588,98		0,5019	Rp 222.586.421	2027	Rp443.487.588,98		0,5403	Rp239.616.344
2028	Rp487.836.347,88		0,4604	Rp 224.599.855	2028	Rp487.836.347,88		0,5002	Rp244.015.741
			NPV	-Rp50.467.020				NPV	Rp43.193.748

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai r (IRR) pasti berada di antara 8% dan 9%, karena NPV-nya bila dibuat 8% hasilnya negatif dan bila dibuat 9% hasilnya positif. Sehingga nilai persisnya dapat diketahui dengan cara interpolasi dengan menggunakan rumus:

$$IRR = r_1 + \frac{NPV_1 - NPV_2}{NPV_1} \cdot (r_2 - r_1), \text{ sehingga}$$

$$IRR = 8,45\%$$

Artinya penambahan modal Kota XYZ ini dapat menghasilkan tingkat keuntungan menjadi 8,45%, lebih tinggi daripada biaya modalnya yang hanya 6%. Dengan demikian metode IRR juga merekomendasikan dilaksanakannya investasi (rencana ini *feasible* dari aspek keuangan)

Dengan menggunakan cara perhitungan yang sama maka nilai IRR masing-masing nilai investasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Perhitungan IRR dengan opsi investasi 2 - 2,5 milyar rupiah

INVESTASI	-Rp2 M	-Rp2,1 M	-Rp2,2 M	-Rp2,3 M	-Rp2,4 M	-Rp2,5 M
IRR	8,45%	7,43%	6,47%	5,57%	4,72%	3,93%

Dari tabel di atas yang menghasilkan IRR lebih besar dari 6% adalah pada tingkat investasi 2 Milyar hingga 2,2 Milyar.

3. Kriteria Indeks Profitabilitas (*Profitability Index*)

Dengan menggunakan tabel yang sama pada saat menghitung NPV, perhitungan PI juga dapat dilakukan, yaitu penjumlahan dari semua PV Cash inflow dibagi dengan jumlah investasi. Nilai Profitability Index untuk masing-masing jumlah investasi dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 7. Perhitungan Kriteria Indeks Profitabilitas (*Profitability Index*)

Jumlah investasi	Profitabiliti Index (PI)
Rp2.000.000.000	1,13
Rp2.100.000.000	1,07
Rp2.200.000.000	1,02
Rp2.300.000.000	0,98
Rp2.400.000.000	0,94
Rp2.500.000.000	0,90

Jika dilihat dari nilai Profitability Index (PI) masing-masing nilai investasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penambahan investasi Pemerintah Kota XYZ pada Bank Lampung yang LAYAK adalah antara Rp 2 Milyar hingga 2,2 Milyar, karena menghasilkan $PI > 1$.

Hasil analisis kriteria kelayakan investasi kami rangkum pada tabel berikut:

Tabel 8. Resume Hasil Analisis Kriteria Kelayakan Investasi

Kriteria Kelayakan Investasi	Jumlah Penambahan Investasi					
	2 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M
PP	6 tahun, 7 bulan, 11 hari	6 Tahun, 10 Bulan, 12 Hari	7 Tahun, 1 Bulan, 4 Hari	7 Tahun, 3 Bulan, 26 Hari	7 Tahun, 6 Bulan, 18 Hari	7 Tahun, 9 Bulan, 11 Hari
NPV	Positif	Positif	Positif	Negatif	Negatif	Negatif
IRR	8,45%	7,43%	6,47%	5,47%	4,72%	3,93%
PI	1,13	1,07	1,02	0,98	0,94	0,90

E. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa penambahan investasi modal Pemerintah Kota XYZ pada PT. Bank Lampung di tahun 2019, dapat dinyatakan LAYAK untuk dilakukan. Hal ini berdasarkan beberapa kriteria yang telah dikaji yaitu Pertama, dari Analisa Aspek Kinerja Keuangan, semua rasio keuangan PT Bank Lampung menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Bank Lampung sangat baik. Kedua, dari Analisis beberapa Kriteria Kelayakan Investasi dapat dilihat bahwa nilai investasi yang paling direkomendasikan adalah Rp 2 Milyar, karena *Payback Period* nya paling cepat yaitu 6 Tahun 7 bulan 11 hari, NPV nilai positif, IRR paling besar, dan PI lebih dari 1.

REFERENSI

- Halim, Abdul. 2005. Analisis Investasi. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta
- Husnan. 2002. Studi Kelayakan Proyek. Salemba Empat. Jakarta
- Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional. Februari 2019. Bank Indonesia Cabang Lampung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah
- Sofyan, Iban. 2002. Jurusan Manajemen FE Universitas Lampung
- Suliyanto, Studi Kelayakan Bisnis. Pendekatan praktis. 2010. Penerbit Andi, Yogyakarta

Pedoman Penulisan Jurnal Akuntansi Keuangan

1. Naskah berupa ringkasan hasil penelitian lapangan (empiris), penelitian kepustakaan dan karya ilmiah populer dalam Bahasa Indonesia belum dipublikasi dalam media cetak lain.
2. Fonts yang dipergunakan adalah Times New Roman ukuran 12 dan compatible dengan MS-Word. Lampiran riset seperti daftar pertanyaan dan instrumen lainnya harus dikirim bersama naskah. Pemuatan lampiran pada jurnal tergantung tersedianya ruang (halaman).
3. Keaslian Tulisan. Penulis harus menjamin keaslian artikel yang dikirim dalam bentuk surat pernyataan keaslian artikel. Pelanggaran hak cipta dan etika akademis menjadi tanggung jawab penulis.
4. Panjang artikel yang diserahkan antara 15-20 halaman 1 spasi, serta dilengkapi dengan abstrak sebanyak 100-250 kata. Penulisan abstrak serta menggunakan Bahasa Inggris dan disertai dengan keyword.
5. Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a) Judul, nama penulis, lembaga dan biodata
 - b) Abstrak
 - c) Batang Tubuh:
 - Untuk penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan:**
 1. Pendahuluan berupa latar belakang dan masalah.
 2. Landasan teori dan pengembangan hipotesis.
 3. Metoda penelitian.
 4. Analisis dan pembahasan.
 5. Simpulan dan saran.
 - File template dapat diunduh di:**
<https://drive.google.com/open?id=1Jo5I9fryZKINK6epFWYmtsCSfiQAXtvM>
 - Untuk karya ilmiah populer:**
 1. Pendahuluan berupa latar belakang dan masalah.
 2. Landasan teori (jika ada).
 3. Pembahasan.
 4. Simpulan.
 - d) Referensi
 - e) Lampiran
6. Penomoran sub judul mempergunakan huruf A, B, C, D sedang sub judul dengan angka Arab dan seterusnya.
7. Persamaan. Semua persamaan matematika atau rumus dituliskan pada garis terpisah ditengah halaman (centered). Persamaan atau rumus diberi nomor berurutan dengan angka Arab di dalam kurung pada margin kanan.
8. Catatan kaki. Catatan kaki pada halaman depan mempergunakan tanda asteriks (*), sedang pada teks menggunakan angka Arab secara urut. Catatan kaki hanya untuk memperjelas tulisan.

9. Tabel. Penomoran tabel mempergunakan angka Arab. Setiap tabel diberikan judul yang diikuti dengan penjelasan legend yang sesuai dengan isi tabel. Tabel yang dicetak pada kertas berukuran lebih besar, diserahkan apa adanya, tanpa perlu diperkecil dengan fotokopi. Tabel dicetak pada halaman terpisah di akhir tulisan. Letak tabel di dalam teks harus ditunjukkan secara tepat dan jelas, sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca isi teks.
10. Gambar, diagram, grafik. Penomoran mempergunakan angka Romawi, dicetak di tengah halaman (centered) terpisah dari teks, dan diletakkan pada akhir tulisan. Letak gambar, tabel, grafik di dalam teks harus ditunjukkan secara tepat dan jelas, sehingga pembaca dapat memahaminya tanpa harus membaca isi teks.
11. Referensi. Referensi dicetak di halaman akhir sebelum tabel dan gambar, spasi dubel, terpisah, urut abjad, dan dengan judul REFERENSI.
 - a. Referensi yang dikutip pada teks dapat dituliskan sebagai berikut:
 - o Pinches dan Taingo (1973) melaporkan bahwa
 - o Nilai-nilai sosial ditunjukkan (Stolle, 1976).
 - o Penyebutan halaman referensi yang dikutip, hanya untuk kutipan langsung. Nomor halaman dituliskan setelah tanda titik dua. Contoh:
 - (Pinches dan Taingo, 1973:17)
 - Pinches dan Taingo (1973:17)
 - o Penulisan sumber referensi di dalam teks dengan penulis lebih dari dua, dapat dituliskan satu nama dengan menambahkan dkk. Contoh:
 - (Zikmund dkk., 1977)
 - Zikmund dkk. (1977)
 - b. Penulisan referensi dalam daftar referensi.
 - o Buku teks (monograph)

Pyndyk, R.S. and D. L. Rubinfeld. 1987. *Econometric Model & Economic Forecasts*, 3rd ed. NY: McGraw-Hill Publishing, Inc.
 - o Artikel (periodicals)

Porcano, T.M. 1984a. *Distributive Justice and Tax Policy*, *The Accounting Review* 59 (October): 619-636.

_____. 1984b. *The Perceived Effects of Tax Policy on Corporate Investment Intentions*. *The Journal of the American Taxation Association* 6 (Fall): 7-19.
 - o Artikel pada penerbitan kolektif. Brennan, M.J. dan E.S. Schwartz. 1994. *A New Approach to Evaluating Natural Resource Investments*, dalam edisi Stern, Joel M. dan D.H. Chew Jr. *The Revolution Corporate Finance*, 2nd ed, Massachusetts; Blackwell Publisher.
 - o Artikel (website)

Standberg, C, 2005. *The Convergence of Corporate Governance and Corporate Sosial Responsibility: Though-Leader Study*. Diunduh dari <http://www.corostranberg.com/>